

ISSN: (p): 2656-0911
(e): 2656-7320

JURNAL



MIMBAR KESEJAHTERAAN SOSIAL

Volume 9 Nomor 1

Pendekatan Berbasis Hak Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia

Penulis: Ummul Khair, Astri Rahmadani, Zainuddin Muayyad Fais

**Kemiskinan Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial:
Konsep, Faktor Penyebab, Dan Upaya Penanggulangannya**

Penulis: Sukmasari, ST. Shara Hudzaifah, Sri Rahmayunita

**Sama-Sama Rentan, Sama-Sama Terlupakan: Tinjauan Pustaka
Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Lansia melalui
Kerangka Individu dalam Lingkungan**

Penulis: Ariel Rifky Cahyadi Usman, Usman, Syamsidar

**Analisis Konsep Person In Environment (Pie) Dalam Memahami
Interaksi Individu Dan Lingkungan Sosial**

*Penulis: Dicky Rahmat Mursyidan, Nayla Saputri Jayanti,
Rabani Rampena, Nurcahyani*

Perlindungan Anak Dalam Keluarga

*Penulis: Nurul Mutmainnah, Namira Nursyahna, Novi,
Moch Fahdrian B.M, Bayu Andika*

Pekerja Sosial Sebagai Pendamping dalam Perlindungan Lansia

*Penulis: Sri Mardianti Asmah, Syahrani Meiranti, Nursyafiqah,
Fadhillah, Ibrahim*

**Pemenuhan Hak Dan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Dalam
Mewujudkan Penuaan Aktif**

*Penulis: Nayla Saputri Jayanti, Usman Noer, Nur Insani,
Sri Rahmayunita, Andi Nurhidayah Hatta*



JURNAL

ISSN (p) : 2655-0911

ISSN (p) : 2655-7320

MIMBAR

KESEJAHTERAAN SOSIAL

PENANGGUNG JAWAB

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abd. Rasyid Masri, S.Ag., M.Pd., M.Si., MM

Program Studi Kesejahteraan Sosial

UIN Alauddin Makassar

PELAKSANA DAN PENYUNTING

Prof. Dr. Syamsuddin AB., S.Ag., M.Pd

Prof. Dr. H. Muh. Ilham, M.Pd

Dr. Syamsidar, S. Ag., M.Ag

Dr. Sadhriany Pertiwi Saleh, M.Si

Dr. Usman, S.Ag., M.Ag.

PENYELARAS BAHASA

Faisal, S.Pd

Ariel R. Cahyadi Usman, S.Pd.

Ummul Khair

Alamat Redaksi

Program Studi Kesejahteraan Sosial

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

Jl. Yasin Limpo No 36 Romang Polong Samata Gowa

Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial sebuah inspirasi wadah untuk melahirkan ide inovatif dan menyatakan pendapat dalam bentuk karya tulis, yang terkait dengan profesi pekerja sosial, masalah sosial, pelayanan sosial, ketagamaan, narkoba, panti sosial, kebijakan sosial CSR, disabilitas, keagamaan, dan aplikatif, penguatan keberfungsian individu, kelompok dan organisasi yang dibingkai solusi kesejahteraan sosial.

Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial, Volume 9, Nomor 1 (2026)

Pendekatan Berbasis Hak Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia

Ummul Khair¹, Astri Rahmadani², Zainuddin Muayyad Fais³

¹ Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, Indonesia.

Ummul25khair@gmail.com , zainuddinmuayyad29@gmail.com ,
astrirahmadani0@gmail.com

Abstrak: Perlindungan anak merupakan kewajiban negara, keluarga, dan masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diamanatkan dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pendekatan Berbasis Hak Anak (*Child Rights-Based Approach*/CRBA) dalam upaya perlindungan anak di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis berbagai jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung implementasi CRBA, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat mengenai hak anak, serta ketimpangan kualitas layanan perlindungan anak. Kajian ini juga menegaskan pentingnya peran pekerja sosial sebagai advokat, fasilitator, mediator, dan edukator dalam menjamin pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan partisipasi keluarga dan masyarakat menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang efektif dan berkelanjutan berbasis hak anak.

Kata kunci: Pendekatan Berbasis Hak Anak, perlindungan anak, hak anak, kesejahteraan sosial.

Pendekatan Berbasis Hak Anak Dalam Upaya Perlindungan Anak Di Indonesia

Ummul Khair¹, Astri Rahmadani², Zainuddin Muayyad Fais³

¹ Social Welfare Departement, Dakwah and Communication Faculty, UIN Alauddin
Makassar, Indonesia.

Ummul25khair@gmail.com

Abstract: Child protection is a shared responsibility of the state, families, and society to ensure the fulfillment of children's rights as mandated by the Convention on the Rights of the Child (CRC) and Indonesian legislation. This study aims to analyze the implementation of the **Child Rights-Based Approach (CRBA)** in child protection efforts in Indonesia. The study employed a qualitative literature review by analyzing relevant scholarly journals, books, and policy documents. The findings indicate that Indonesia has established a relatively comprehensive legal and policy framework to support the implementation of the CRBA. However, its implementation continues to face significant challenges, including weak cross-sectoral coordination, limited human resources, low public awareness of children's rights, and disparities in the quality of child protection services across regions. The study also highlights the strategic role of social workers as advocates, facilitators, mediators, and educators in ensuring the fulfillment of children's rights. Therefore, strengthening institutional capacity, enhancing cross-sector collaboration, and increasing family and community participation are essential prerequisites for developing an effective, sustainable, and rights-based child protection system in Indonesia.

Keywords: Child Rights-Based Approach, child protection, children's rights, social welfare..

Pendahuluan

Anak merupakan subjek yang memiliki hak asasi sejak kelahirannya, yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat. Hak-hak tersebut mencakup hak untuk hidup, berkembang, tumbuh secara optimal, memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, serta hak untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Pengakuan terhadap hak-hak anak ditegaskan secara internasional melalui *Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989. Indonesia meratifikasi konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang secara hukum menempatkan negara sebagai pemegang kewajiban (*duty bearer*) untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) seluruh hak anak secara menyeluruh.

Sebagai wujud komitmen terhadap standar internasional tersebut, Indonesia mengembangkan landasan hukum perlindungan anak melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Regulasi ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan sektor swasta. Perubahan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan (*needs-based approach*) menuju pendekatan yang menempatkan anak sebagai pemegang hak (*rights holder*).

Meskipun kerangka regulasi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, pelanggaran terhadap hak anak tetap menjadi isu yang kompleks dan multidimensi. Berbagai bentuk kekerasan, baik fisik maupun seksual, eksploitasi ekonomi, perdagangan anak, perkawinan usia anak, perundungan (*bullying*), hingga kekerasan berbasis digital, menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan anak apabila implementasi kebijakan, koordinasi antarlembaga, kapasitas sumber daya, serta partisipasi masyarakat masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan operasional. UNICEF menekankan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian integral dari agenda pembangunan nasional, karena berkaitan langsung dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya dalam penghapusan kekerasan terhadap anak, jaminan akses keadilan, pendidikan yang aman, serta identitas hukum bagi setiap anak.

Dalam konteks tersebut, Pendekatan Berbasis Hak Anak (*Child Rights-Based Approach/CRBA*) semakin relevan diterapkan dalam sistem perlindungan anak. Pendekatan ini tidak hanya memandang anak sebagai penerima layanan sosial, tetapi sebagai individu yang memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara dan seluruh pemangku kepentingan. CRBA berlandaskan pada empat prinsip utama Konvensi Hak Anak, yaitu prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program perlindungan anak harus dirancang berdasar prinsip-prinsip tersebut, sehingga tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada pencegahan, pemberdayaan, dan penguatan sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Dalam perspektif ilmu Kesejahteraan Sosial, pendekatan berbasis hak anak memiliki keterkaitan erat dengan prinsip keadilan sosial, pemberdayaan, inklusi sosial, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Pekerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai advokat, mediator, fasilitator, dan agen perubahan yang memastikan setiap anak memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya, pelayanan sosial, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, implementasi pendekatan berbasis hak anak memerlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, lembaga perlindungan anak, institusi pendidikan, tenaga profesional, organisasi masyarakat sipil, dan keluarga sebagai lingkungan utama dalam tumbuh kembang anak.

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek yuridis perlindungan anak, implementasi Konvensi Hak Anak, atau evaluasi efektivitas kebijakan perlindungan di Indonesia. Namun, kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif *Child Rights-Based Approach* dengan disiplin ilmu Kesejahteraan Sosial melalui sintesis berbagai temuan penelitian masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan semacam ini penting untuk menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip hak anak dapat diterjemahkan ke dalam praktik pelayanan sosial, advokasi, pemberdayaan keluarga, serta penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan berbasis hak anak dalam upaya perlindungan anak di Indonesia melalui metode studi literatur kualitatif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sintesis konseptual mengenai implementasi pendekatan berbasis hak anak, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi, serta merumuskan rekomendasi bagi pengembangan kebijakan dan praktik kesejahteraan sosial yang lebih responsif terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Tinjauan Pustaka

Perlindungan anak mencakup seluruh upaya yang diarahkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, sehingga mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, diskriminasi, dan perlakuan buruk lainnya. Di Indonesia, landasan hukum perlindungan anak diperkuat melalui revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan

bahwa tanggung jawab atas perlindungan anak tidak semata-mata menjadi kewajiban pemerintah, melainkan juga melibatkan peran aktif keluarga, masyarakat, sektor usaha, media massa, dan lembaga pendidikan. Dalam perspektif ini, perlindungan anak dipandang sebagai bagian integral dari pemenuhan hak asasi manusia, sehingga setiap kebijakan dan program yang dirancang harus berorientasi pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Pendekatan Berbasis Hak Anak (*Child Rights-Based Approach/CRBA*) merupakan kerangka pembangunan yang menempatkan hak-hak anak sebagai fondasi utama dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta evaluasi terhadap pelayanan publik. Pendekatan ini berakar pada Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dalam perspektif ini, anak tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek perlindungan atau penerima bantuan, melainkan diakui sebagai subjek yang memiliki hak yang sah dan harus dipenuhi. Konsekuensinya, seluruh pemangku kepentingan baik negara, keluarga, masyarakat, maupun lembaga terkait memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak anak melalui kebijakan yang bersifat nondiskriminatif, partisipatif, akuntabel, serta senantiasa mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).

Pendekatan berbasis hak anak berlandaskan empat prinsip pokok Konvensi Hak Anak, yakni prinsip non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup serta berkembang, dan penghormatan terhadap pandangan anak. Prinsip non-diskriminasi menjamin kesetaraan pemenuhan hak bagi setiap anak tanpa pembedaan berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, kondisi ekonomi, atau status sosial. Prinsip kepentingan terbaik mensyaratkan agar seluruh kebijakan dan keputusan yang menyangkut anak selalu mengutamakan manfaat terbesar bagi perkembangan mereka. Selain itu, anak berhak untuk hidup, bertahan, dan mencapai perkembangan yang optimal, serta berhak mengemukakan pendapat dalam urusan yang memengaruhi dirinya, disesuaikan dengan usia dan tingkat kematangan. Keempat prinsip ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak di Indonesia.

Implementasi pendekatan berbasis hak anak di Indonesia dilakukan melalui harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional, pengembangan kebijakan perlindungan anak, pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak, Sekolah

Ramah Anak, serta penguatan sistem perlindungan sosial. Pemerintah bersama berbagai lembaga internasional seperti UNICEF juga mendorong peningkatan kualitas layanan bagi anak korban kekerasan, eksploitasi, perdagangan orang, perkawinan anak, maupun anak yang hidup di luar pengasuhan orang tua. Walaupun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi masyarakat mengenai hak anak, serta belum meratanya kualitas layanan perlindungan anak di berbagai daerah.

Berbagai studi mengindikasikan bahwa keberhasilan upaya perlindungan anak bergantung bukan hanya pada keberadaan aturan hukum, melainkan juga pada sejauh mana pendekatan berbasis hak anak diimplementasikan secara efektif. Temuan Didi Nazmi dan Syofirman menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun kerangka hukum yang relatif menyeluruh, namun masih menemui sejumlah kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak. Hasil penelitian Junaidi menegaskan bahwa hambatan tersebut bersumber dari aspek hukum substantif dan prosedural, kinerja aparat penegak hukum, norma dan praktik budaya di masyarakat, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya pendukung. Di sisi lain, kajian UNICEF menyoroti perlunya penguatan sistem perlindungan anak yang terpadu melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, keluarga, dan organisasi internasional agar pemenuhan hak-hak anak dapat berlangsung berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*literature review*) sebagai kerangka metodologis utama untuk menganalisis konsepsi perlindungan hak anak. Pendekatan studi literatur dipilih karena memberikan ruang komprehensif untuk mengidentifikasi, mengkaji, dan mensintesis hasil penelitian terdahulu serta teori hukum positif yang relevan terhadap topik perlindungan anak.

Studi literatur bertujuan untuk menguraikan ruang lingkup teori dan penelitian yang sudah ada, serta menyusun sintesis temuan yang sistematis dari sumber primer dan sekunder yang kredibel, termasuk buku referensi, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan hukum. Proses pengumpulan data dimulai dengan penelusuran sistematis terhadap sumber literatur hukum Islam dan hukum nasional menggunakan basis data ilmiah seperti Google Scholar. Kriteria inklusi

yang ditetapkan mencakup literatur yang dipublikasikan dalam 15 tahun terakhir, ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dan mengandung pembahasan mendalam terkait perlindungan.

Panduan ini selaras dengan kerangka literatur teoretis pencarian literatur harus bersifat ekstensif dan fokus terhadap kajian konsep yang jelas, serta membatasi referensi yang bersifat populer atau tidak peer review. Analisis data dilakukan melalui tahapan seleksi, kategorisasi, dan sintesis. Seleksi dilakukan dengan membaca abstrak dan ringkasan awal untuk memastikan relevansi terhadap tujuan penelitian; selanjutnya, materi yang lolos disintesis mengikuti model thematic analysis, sehingga setiap tema utama mengenai perlindungan hak anak dapat diidentifikasi dan dibandingkan dengan turunan norma hukum nasional.

Penelitian juga menerapkan prinsip triangulasi sumber, yakni penggabungan perspektif, literatur ilmu hukum kontemporer, dan kebijakan nasional yang relevan. Triangulasi sumber membantu meminimalkan bias interpretatif dan memperkaya kualitas analisis. Selain itu, peneliti menggunakan kerangka penilaian kualitas literatur berdasarkan kriteria yang mempertimbangkan kredibilitas, transferabilitas, dan keterandalan data literatur yang dianalisis.

Hasil dan Pembahasan

Pendekatan Berbasis Hak Anak (*Child Rights-Based Approach/CRBA*) telah menjadi paradigma utama dalam penyelenggaraan sistem perlindungan anak di Indonesia. Berbagai literatur yang dianalisis mengindikasikan bahwa Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup kuat melalui ratifikasi *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta berbagai kebijakan nasional yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen negara dalam menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh perlindungan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Sintesis berbagai penelitian menunjukkan empat temuan utama. Pertama, prinsip non-diskriminasi telah menjadi dasar dalam berbagai kebijakan perlindungan anak, namun implementasinya masih menghadapi hambatan bagi anak penyandang disabilitas, anak di daerah terpencil, anak korban eksploitasi, dan kelompok rentan lainnya. Kedua, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) mulai diterapkan dalam penyusunan kebijakan dan pelayanan sosial, meskipun

pelaksanaannya belum seragam di seluruh daerah. Ketiga, pemenuhan hak hidup, bertahan hidup, dan berkembang dipengaruhi oleh kualitas akses terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan lingkungan yang aman. Keempat, partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan mulai mendapat perhatian, tetapi dalam praktiknya masih terbatas sehingga suara anak belum sepenuhnya menjadi dasar dalam penyusunan program maupun kebijakan.

Pembahasan menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi pendekatan berbasis hak anak tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas pelaksanaan di lapangan. Berbagai literatur mengidentifikasi tantangan berupa lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya manusia profesional, rendahnya literasi masyarakat mengenai hak anak, belum meratanya kualitas layanan perlindungan anak, serta masih kuatnya budaya yang mentoleransi kekerasan terhadap anak. Kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan antara kebijakan normatif dengan implementasi di tingkat masyarakat.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, pekerja sosial memiliki posisi strategis dalam memastikan pendekatan berbasis hak anak dapat diterapkan secara optimal. Peran pekerja sosial tidak hanya sebagai pemberi layanan, tetapi juga sebagai advokat, mediator, fasilitator, edukator, dan agen perubahan yang menghubungkan anak dengan berbagai sistem pelayanan sosial. Pendekatan ini mendorong kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta organisasi internasional sehingga perlindungan anak dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan sintesis literatur, dapat dipahami bahwa penguatan sistem perlindungan anak di Indonesia perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan mekanisme koordinasi lintas sektor, peningkatan edukasi masyarakat mengenai hak anak, perluasan layanan perlindungan berbasis komunitas, serta monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan berbasis hak anak tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi mampu diwujudkan dalam praktik pelayanan sosial yang benar-benar menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak setiap anak.

Implementasi Pendekatan Berbasis Hak Anak di Indonesia

Hasil sintesis berbagai penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam membangun sistem perlindungan anak berbasis hak. Hal ini ditandai dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*), pembentukan berbagai regulasi nasional, serta lahirnya kebijakan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hak anak ke dalam pembangunan nasional. Pendekatan berbasis hak anak tidak lagi memandang anak sebagai objek penerima bantuan, melainkan sebagai individu yang memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh negara, keluarga, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

Dalam implementasinya, pemerintah telah mengembangkan berbagai program seperti Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), Sekolah Ramah Anak (SRA), Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), serta penguatan layanan perlindungan anak melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Program-program tersebut menjadi indikator bahwa paradigma perlindungan anak mulai bergeser dari pendekatan represif menuju pendekatan preventif, promotif, dan pemberdayaan masyarakat.

Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Daerah perkotaan umumnya memiliki akses layanan yang lebih baik dibandingkan daerah pedesaan maupun wilayah terpencil. Ketimpangan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas kelembagaan, ketersediaan tenaga profesional, dukungan anggaran, serta komitmen pemerintah daerah terhadap isu perlindungan anak.

Peran Pekerja Sosial dalam Pendekatan Berbasis Hak Anak

Hasil kajian menunjukkan bahwa pekerja sosial merupakan salah satu aktor utama dalam implementasi pendekatan berbasis hak anak. Dalam praktik profesional, pekerja sosial tidak hanya berfungsi sebagai pemberi bantuan, tetapi juga menjalankan berbagai peran strategis.

Sebagai advokat, pekerja sosial memperjuangkan pemenuhan hak anak ketika terjadi pelanggaran maupun diskriminasi. Sebagai mediator, pekerja sosial membantu menyelesaikan konflik antara anak, keluarga, dan institusi pelayanan. Sebagai fasilitator, pekerja sosial menghubungkan anak dengan layanan pendidikan,

kesehatan, bantuan sosial, serta perlindungan hukum. Selain itu, pekerja sosial juga berperan sebagai edukator melalui kegiatan penyuluhan mengenai pengasuhan positif dan perlindungan anak kepada masyarakat. Peran tersebut semakin penting mengingat perlindungan anak merupakan isu multidimensional yang melibatkan aspek hukum, pendidikan, kesehatan, psikologi, ekonomi, serta kesejahteraan sosial.

Tantangan Implementasi Pendekatan Berbasis Hak Anak

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, terdapat beberapa tantangan utama dalam penerapan pendekatan berbasis hak anak di Indonesia.

1. Koordinasi lintas sektor masih belum berjalan optimal sehingga penanganan kasus sering kali bersifat parsial.
2. Keterbatasan tenaga profesional, khususnya pekerja sosial, psikolog, dan konselor, menyebabkan pelayanan belum mampu menjangkau seluruh anak yang membutuhkan.
3. Rendahnya literasi masyarakat mengenai hak anak menyebabkan praktik kekerasan masih sering dianggap sebagai bagian dari pola pengasuhan.
4. Keterbatasan anggaran daerah menghambat pengembangan layanan perlindungan anak secara berkelanjutan.
5. perkembangan teknologi digital memunculkan bentuk-bentuk kekerasan baru seperti cyberbullying, eksploitasi seksual daring, penyebaran konten negatif, serta kejahatan siber yang menasar anak.

Implikasi terhadap Pengembangan Kebijakan

Temuan studi literatur menunjukkan bahwa penguatan sistem perlindungan anak harus dilakukan melalui pendekatan yang lebih terintegrasi. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperluas layanan perlindungan anak hingga tingkat desa dan kelurahan, memperkuat pendidikan pengasuhan positif bagi keluarga, serta meningkatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan media massa. Selain itu, evaluasi terhadap implementasi kebijakan perlu dilakukan secara berkala agar setiap program benar-benar berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Simpulan

Pendekatan Berbasis Hak Anak (*Child Rights-Based Approach/CRBA*) merupakan paradigma yang menempatkan anak sebagai subjek pemegang hak yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, keluarga, masyarakat, serta seluruh pemangku kepentingan. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan kebijakan yang relatif komprehensif dalam mendukung perlindungan anak melalui ratifikasi Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta berbagai program nasional yang berorientasi pada pemenuhan hak anak. Meskipun demikian, implementasi pendekatan tersebut belum berjalan optimal akibat berbagai kendala, seperti lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan tenaga profesional, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak, kesenjangan layanan perlindungan antarwilayah, serta berkembangnya bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di ruang digital.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, keberhasilan implementasi pendekatan berbasis hak anak sangat bergantung pada sinergi lintas sektor dan optimalisasi peran pekerja sosial sebagai advokat, fasilitator, mediator, edukator, dan agen perubahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan layanan perlindungan anak hingga tingkat komunitas, penguatan edukasi keluarga dan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan berbasis hak anak tidak hanya menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan perlindungan anak, tetapi juga mampu diwujudkan dalam praktik yang menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak setiap anak secara adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Absor, 'Penanganan Anak Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana Alam: Tinjauan Konvensi Hak Anak Dan Undang-Undang Perlindungan Anak', *Jurnal Dakwah*, 11 (2011)
- Ahmad, Liza, 'Perlindungan Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Islam : Studi Literatur', *Journal Of Islamic Research And Studies*, 2 (2026)
- Ariefuzzaman, Siti Napsiyah, 'Welfare Approach Untuk Indonesia Damai Dan Sejahtera ', *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 1 (2012)

- Candra, Wulan, 'Kebijakan Pemerintah Dalam Implementasi Hukum Perlindungan Anak Dan Upaya Penganggunannya', *Jurnal Hukun Dan Sosial*, 16 (2016)
- Indonesia., *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*, 2002 <<https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/44473/Uu-No-23-Tahun-2002>>
- Indonesia, Unicef, *Pelaksanaan Perlindungan Dan Kesejahteraan Anak Di Indonesia – Untuk Setiap Anak*, 2020 <<https://www.unicef.org/indonesia/media/6551/file/pelaksanaan-perlindungan-dan-kesejahteraan-anak-di-indonesia>>
- Indonesia, Unicef, *Perlindungan Anak Di Indonesia*, 2020 <<https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-is-the-convention>>
- Junaidi, Didi Fazmi, Syofirman, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Anak Di Indonesia', *Journal Of Swara Justisia*, 5 (2022)
- Junaidi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Indonesia', *Jurnal Of Law , Society Adn Civilization*, 2021
- Kristiawan, 'Perlindungan Hukum Dan Hak Asasi Pekerja Anak: Kajian Implementasi Dan Tantangan Dalam Konteks Undang-Undang Perlindungan Anak', *Jurnal Agama Dan Hak Asasi Manusia*, 12 (2023)
- Manurung , Nababan, Sihar, 'Kajian Sistematis Terhadap Regulasi Perlindungan Anak Dalam Kerangka Hukum Nasional Dan Internasional', *Law Science And Politics Journal*, 1 (2025)
- Mudji, Caharamayang, 'Kontribusi Unicef Terhadap Upaya Menegakkan Perlindungan Anak Di Indonesia.', *Transborders: International Relations Journal*, 2017
- Nazmi, Syofyan, 'Pengaturan Perlindungan Hak Anak Di Indonesia Dalam Rangka Mengeliminir Pelanggaran Hak Anak', *Journal Of Swara Justisia*, 7 (2023)
- Regina, Nabila Thifallya And Kowara, 'Peran Unicef Dalam Perlindungan Anak Indonesia Role Of Unicef In Children's Protection In Indonesia', *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Jppm) E*, 3 (2023)
- Satriyo, Ikhsan, Herwiyoso, 'Konvensi Internasional Hak Anak: Pengaruh Dan Realitasnya Dalam Hukum Serta Ham Di Indonesia', *Jurnal Lentera Ilmu*, 1 (2025)
- Unicef, 'Convention On The Rights Of The Child Adopted', *United Nations*, 2019
- Unicef , Bappenas , Bps, Smeru, *Deprivasi Multidimensi Hak Anak Di Indonesian*, 2023

Unicef Indonesia Dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Child-Sensitive Social Protection In Indonesia*, 2024
<<https://www.unicef.org/indonesia/media/20451/file/towards-child-sensitive>>

Kemiskinan Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial: Konsep, Faktor Penyebab, Dan Upaya Penanggulangannya

Sukmasari¹, ST. Shara Hudzaifah², Sri Rahmayunita³

¹Kesejahteraan Sosial, Dakwah Dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar, Indonesia

sukmasari963@gmail.com, stshar762@gmail.com srirahmayunita546@gmail.com

Abstrak: Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kemiskinan dalam perspektif kesejahteraan sosial, faktor-faktor penyebabnya, serta strategi penanggulangannya di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (library research) yang bersumber dari buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta publikasi resmi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan ketimpangan pembangunan. Kemiskinan berdampak pada menurunnya kualitas hidup individu, keluarga, dan masyarakat serta menghambat tercapainya kesejahteraan sosial. Upaya penanggulangan dilakukan melalui kebijakan pemerintah, program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peran pekerja sosial dan lembaga sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama berbagai pihak agar penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.

Kata kunci: Kemiskinan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat, pekerja sosial, bantuan sosial.

Poverty In The Perspective Of Social Welfare: Concepts, Causes, And Efforts To Overcome It

Sukmasari¹, ST. Shara Hudzaifah², Sri Rahmayunita³

¹*Social Welfare, Da'wah and Communication, UIN Alauddin Makassar, Indonesia*
sukmasari963@gmail.com, stshar762@gmail.com srirahmayunita546@gmail.com

Abstract: *Poverty is a multidimensional social problem that is not only related to low income but also to limited access to education, healthcare, employment, and social services. This study aims to examine poverty from the perspective of social welfare, identify its contributing factors, and analyze poverty alleviation strategies in Indonesia. The study employs a qualitative method using a literature review approach, drawing data from books, journal articles, legislation, and official government publications. The findings indicate that poverty is influenced by various factors, including low human resource quality, limited employment opportunities, and unequal development. Poverty negatively affects the quality of life of individuals, families, and communities, thereby hindering the achievement of social welfare. Poverty alleviation efforts are carried out through government policies, social assistance programs, community empowerment, and the active involvement of social workers and social institutions. Therefore, collaboration among all stakeholders is essential to ensure that poverty reduction programs are effective, well-targeted, and sustainable in achieving social welfare.*

.Keywords: *Poverty, social welfare, community empowerment, social workers, social assistance.*

Pendahuluan

Kemiskinan adalah salah satu isu sosial yang hingga saat ini tetap menjadi tantangan utama dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Kondisi kemiskinan tidak hanya terlihat dari pendapatan yang rendah, tetapi juga mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap peluang ekonomi serta layanan publik. Dengan demikian, kemiskinan dianggap sebagai masalah yang memiliki banyak dimensi dan mempengaruhi beragam aspek kehidupan baik individu maupun masyarakat. Keberadaan kemiskinan berdampak pada penurunan kualitas hidup, menurunnya produktivitas masyarakat, serta peningkatan kesenjangan sosial yang pada akhirnya dapat menghambat proses pembangunan di tingkat nasional.

Dalam sudut pandang kesejahteraan sosial, kemiskinan dilihat sebagai keadaan yang menghalangi individu, keluarga, atau komunitas dalam mencapai fungsionalitas sosial secara maksimal. Konsep kesejahteraan sosial tidak hanya

fokus pada pemenuhan kebutuhan finansial, melainkan juga meliputi hak-hak sosial yang terpenuhi, kesempatan yang setara, keadilan sosial, dan kemampuan masyarakat untuk mengambil bagian dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi salah satu petunjuk bahwa kesejahteraan sosial belum tercapai, mengingat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan biasanya mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pada pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, dan perlindungan sosial. Keadaan ini menunjukkan bahwa upaya mengatasi kemiskinan perlu dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif, sambil mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, budaya, serta institusi.

Beragam penelitian dalam literatur mengungkapkan bahwa penyebab kemiskinan itu rumit dan saling berhubungan. Faktor internal seperti rendahnya kualitas pendidikan, keterampilan, produktivitas, dan mutu sumber daya manusia, berkolaborasi dengan faktor eksternal yang meliputi terbatasnya peluang kerja, ketidakadilan distribusi pendapatan, pertumbuhan populasi, akses terhadap modal, serta kebijakan pembangunan yang belum sepenuhnya mendukung kelompok yang rentan. Selanjutnya, dinamika ekonomi global, perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja, bencana alam, serta krisis ekonomi juga dapat meningkatkan kemungkinan masyarakat mengalami kemiskinan. Oleh sebab itu, berbagai studi menekankan bahwa kemiskinan tidak bisa dipahami hanya melalui satu faktor, melainkan merupakan akibat dari interaksi berbagai dimensi yang saling memengaruhi.

Beragam cara untuk mengatasi kemiskinan telah dilaksanakan lewat kebijakan perlindungan sosial, dukungan finansial, pemberdayaan masyarakat, perbaikan mutu pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan usaha ekonomi yang produktif. Meski begitu, hasil dari sejumlah penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dari program-program tersebut masih memiliki banyak tantangan, seperti ketidaksesuaian dalam penargetan, kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga, rendahnya partisipasi dari masyarakat, dan belum maksimalnya pemberdayaan ekonomi bagi kelompok-kelompok yang kurang mampu. Dalam konteks kesejahteraan sosial, penanganan kemiskinan tidak hanya harus dilakukan dengan memberikan bantuan jangka pendek, melainkan juga membutuhkan pendekatan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapabilitas individu, keluarga, dan komunitas untuk mencapai kemandirian sosial serta ekonomi yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur, yang merupakan metode riset yang dilakukan melalui pengumpulan, analisis, penilaian, dan penggabungan berbagai sumber akademis, seperti buku, artikel dari jurnal baik nasional maupun internasional, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan yang relevan dengan isu kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan ini, penulis berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang evolusi konsep kemiskinan, faktor-faktor yang menyebabkannya, serta berbagai strategi penanganan kemiskinan yang telah dihasilkan oleh riset sebelumnya. Pendekatan kajian literatur dipilih karena memberikan gambaran yang terstruktur mengenai perkembangan pengetahuan serta membantu dalam menemukan kesamaan dan perbedaan dalam hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pentingnya studi tentang Kemiskinan dalam Lensa Kesejahteraan Sosial: Definisi, Penyebab, dan Solusi untuk Mengatasinya perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi definisi kemiskinan dari sudut pandang kesejahteraan sosial, mengenali berbagai elemen yang berkontribusi pada munculnya kemiskinan, serta menganalisis berbagai pendekatan penanganan yang telah diterapkan berdasarkan penelitian sebelumnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan bidang ilmu kesejahteraan sosial, menambah wawasan akademis mengenai isu kemiskinan, serta menjadi acuan bagi pemerintah, peneliti, pekerja sosial, dan pihak terkait dalam merancang kebijakan dan program yang lebih efektif, inklusif, dan berkesinambungan untuk mengurangi kemiskinan.

Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu kajian ilmiah karena memberikan gambaran mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta menunjukkan perkembangan kajian pada topik yang diteliti. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 1 berikut.

No	Judul Artikel	Penulis	Fokus Utama
1.	Ketimpangan Sosial dan Kemiskinan: Analisis Literatur Sistematis terhadap Perspektif Ekonomi dan Sosial	Inka Nusamuda Pratama, Ajai Saputra, & Sigit Karma Syaputra (2025)	Menganalisis kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui Systematic Literature Review (SLR) untuk menjelaskan penyebab, dinamika, dan dampak kemiskinan dari perspektif ekonomi dan sosial.
2.	Kemiskinan di Wilayah Pesisir: Penyebab dan Dampaknya terhadap Masyarakat Lokal	Ramadi dkk. (2024)	Mengidentifikasi faktor penyebab kemiskinan masyarakat pesisir, dampak sosial-ekonomi, serta alternatif penanggulangan berdasarkan hasil kajian literatur.
3.	Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan: Tinjauan Sistematis atas Peran Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Sipil	Utami dkk. (2026)	Menganalisis hasil penelitian terdahulu mengenai kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan melalui Systematic Literature Review .

Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa sebagian besar penelitian menggunakan metode studi literatur atau *Systematic Literature Review* untuk mengkaji berbagai aspek kemiskinan. Persamaannya terletak pada penggunaan metode studi literatur, sedangkan perbedaannya, penelitian ini membahas kemiskinan secara lebih komprehensif dari perspektif kesejahteraan sosial, mencakup konsep, faktor penyebab, hubungan dengan kesejahteraan sosial, serta upaya penanggulangannya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai isu kemiskinan..

Konsep Kesejahteraan sosial

Kesejahteraan sosial adalah keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat dipenuhi sehingga individu dapat menjalani hidup dengan layak, berkembang, dan menjalankan fungsi sosialnya dengan baik. Dalam kerangka pembangunan nasional, kesejahteraan sosial tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi, namun juga melibatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, lingkungan yang aman, dan kesempatan untuk berkontribusi dalam masyarakat.

Dalam konteks kesejahteraan sosial di Indonesia, tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 mengenai Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa: “Kesejahteraan Sosial adalah keadaan di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi untuk memungkinkan mereka hidup dengan layak serta dapat mengembangkan diri, sehingga bisa menjalankan fungsi sosialnya (Pemerintah Republik Indonesia, 2009).

Oleh sebab itu, kesejahteraan sosial dianggap sebagai hasil kolaborasi antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan penyediaan layanan sosial yang adil. Evolusi penelitian mengenai kesejahteraan sosial di Indonesia juga memperlihatkan bahwa konsep ini semakin menekankan pada peningkatan kualitas hidup, penguatan masyarakat, dan peningkatan kapasitas baik individu maupun komunitas untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

Tujuan utama dari kesejahteraan sosial adalah untuk mengembalikan fungsi yang baik pada setiap individu, kelompok, dan komunitas dalam menjalani kehidupannya. Schneiderman menyatakan bahwa tujuan kesejahteraan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a). Mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti memenuhi standar dasar hidup seperti kebutuhan sandang, perumahan, makanan, kesehatan, dan hubungan sosial yang baik dengan lingkungan;
- b). Mencapai penyesuaian diri yang positif, khususnya dengan komunitas di sekitarnya;
- c). Meningkatkan kualitas hidup yang memuaskan.

Kesejahteraan sosial memiliki peran dalam pencegahan, penyembuhan, pemulihan, dan penguatan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat.

Peran pencegahan berfokus untuk menghentikan munculnya berbagai isu sosial dengan menyediakan layanan sosial dan memperkuat daya tahan masyarakat. Peran penyembuhan dan pemulihan dilakukan untuk mendukung individu atau kelompok yang menghadapi masalah sosial agar bisa kembali menjalankan fungsi sosial mereka dengan baik. Di sisi lain, peran penguatan ditujukan untuk memberdayakan masyarakat lewat peningkatan kapasitas, pengembangan potensi, dan perluasan akses terhadap sumber daya pembangunan. Dengan kata lain, kesejahteraan sosial bukan hanya berfungsi sebagai sistem dukungan sosial, tetapi juga sebagai alat untuk pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Berbagai ahli memberikan penekanan yang berbeda mengenai konsep kesejahteraan sosial, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurut Durhan Kesejahteraan Sosial dapat dipahami sebagai suatu usaha terencana untuk meningkatkan kualitas hidup sosial dengan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup seperti keluarga, anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, tingkat kehidupan, interaksi sosial, dan banyak aspek lainnya. Layanan-layanan yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial tersebut berfokus pada perhatian terhadap individu, kelompok, komunitas, serta masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Wicheden kesejahteraan sosial adalah Sebuah sistem regulasi yang mencakup program, keuntungan, dan layanan yang memperbaiki atau memastikan penyediaan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sosial yang diakui sebagai fondasi populasi dan ketertiban sosial. Sedangkan Menurut Suparlan kesejahteraan sosial adalah Keberadaan yang harmonis secara umum, yang mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Ini tidak terbatas pada perbaikan dan penghapusan masalah sosial tertentu, namun merupakan suatu kondisi dan aksi. Kesejahteraan sosial merupakan suatu institusi yang menawarkan layanan sosial kepada komunitas untuk mencapai

kualitas hidup yang lebih baik dengan cara memperkuat potensi individu atau kelompok melalui penyelesaian permasalahan serta pemenuhan kebutuhan mereka.

Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan di mana individu, keluarga, atau kelompok sosial tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, sehingga berdampak pada kualitas hidup dan fungsi sosial mereka. Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi penghasilan, tetapi juga meliputi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang memadai, tempat tinggal, serta layanan sosial lainnya. Oleh karena itu, kemiskinan dipahami sebagai fenomena yang bersifat multidimensional yang terpengaruh oleh aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kelembagaan. Pendekatan multidimensional menunjukkan bahwa seseorang bisa dianggap miskin meskipun pendapatannya lebih tinggi dari garis kemiskinan jika mereka masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan layanan dasar dan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

John Maynard Keynes (1936) menyatakan bahwa isu kemiskinan muncul berasal dari sebuah paradoks ekonomi yang disebut "kemiskinan di tengah kelimpahan", yang menunjukkan keadaan di mana kemiskinan terjadi meskipun ada banyak sumber daya. Dalam pandangannya, Keynes memperhatikan bahwa ada ketidakstabilan yang berasal dari dalam sistem dan melihat bahwa peranan fungsi tenaga kerja dan pasar modal yang tidak terikat menciptakan kecenderungan kuat untuk keseimbangan pasar. Penekanan Keynes mengenai kelemahan sistem dalam melakukan penyesuaian secara otomatis menjadi penyebab terjadinya ketidakseimbangan antara apa yang masyarakat konsumsi dan apa yang diproduksi untuk memenuhi permintaan, sehingga menghasilkan ketimpangan yang memperburuk keadaan kelompok-kelompok yang terpinggirkan.

Adapun jenis-jenis kemiskinan diantaranya:



Gambar 1

a) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan yang disebabkan oleh pendapatan yang diterima oleh masyarakat berada di bawah batas kemiskinan, sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan guna meningkatkan standar hidup.

b) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah keadaan kemiskinan yang timbul akibat kebijakan yang belum bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat atau wilayah, sehingga menciptakan ketidaksetaraan di tengah komunitas. Biasanya, wilayah-wilayah yang belum terjangkau oleh sistem yang ada adalah pedesaan yang berada di daerah terpencil, sehingga sering kali wilayah tersebut dikenal sebagai daerah yang terbelakang dan kurang berkembang. Fenomena kemiskinan ini sering kali berkaitan dengan faktor waktu dan lokasi, yang mengakibatkan variasi antara setiap tempat.

c) Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang berkaitan dengan pola pikir, nilai-nilai budaya, kebiasaan, dan kualitas sumber daya manusia yang menghambat seseorang untuk keluar dari kondisi miskin. Rendahnya tingkat pendidikan, minimnya keterampilan, kurangnya motivasi untuk berkembang, serta budaya yang kurang mendukung perubahan menjadi faktor utama penyebab kemiskinan jenis ini. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, kemiskinan kultural tidak hanya diatasi melalui bantuan ekonomi, tetapi juga melalui pendidikan, pelatihan keterampilan, pemberdayaan masyarakat, serta perubahan pola pikir agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

d) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural terjadi karena adanya ketimpangan dalam sistem sosial, ekonomi, maupun kebijakan yang menyebabkan sebagian masyarakat sulit memperoleh akses terhadap sumber daya dan kesempatan. Faktor-faktor seperti terbatasnya lapangan pekerjaan, distribusi pembangunan yang tidak merata, kebijakan yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin, dan lemahnya perlindungan sosial menjadi penyebab utama kemiskinan struktural. Dalam kondisi ini, masyarakat tetap berada dalam lingkaran kemiskinan bukan semata-mata karena kemampuan individu, tetapi karena adanya hambatan dari struktur sosial yang membatasi kesempatan mereka untuk berkembang.

e) Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam atau lingkungan geografis yang kurang mendukung. Misalnya, daerah yang sering mengalami bencana alam, kekeringan, banjir, tanah yang kurang subur, atau wilayah terpencil yang sulit dijangkau. Kondisi tersebut menghambat aktivitas ekonomi masyarakat sehingga pendapatan menjadi rendah dan kesempatan memperoleh pelayanan dasar juga terbatas. Penanggulangan kemiskinan alamiah memerlukan pembangunan infrastruktur, peningkatan ketahanan terhadap bencana, pengembangan teknologi pertanian, serta pemerataan pembangunan agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan menggunakan berbagai parameter yang menggambarkan keadaan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, beberapa indikator yang sering dipakai antara lain adalah tingkat penghasilan, belanja perindividu, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kondisi tempat tinggal, peluang kerja, dan kepemilikan barang. Seiring dengan perkembangan studi tentang kemiskinan, indikator tersebut semakin diperluas dengan memperhatikan dimensi sosial, misalnya akses terhadap teknologi informasi, jaminan sosial, serta kualitas lingkungan. Pendekatan yang bersifat multidimensional memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai situasi masyarakat yang kurang mampu jika dibandingkan dengan pengukuran yang hanya berfokus pada batas kemiskinan.

Kemiskinan adalah hasil dari interaksi berbagai elemen yang saling berkaitan, baik yang berasal dari individu maupun dari lingkungan sosial. Aspek internal mencakup rendahnya pendidikan, keterampilan, produktivitas tenaga kerja, kondisi kesehatan, serta keterbatasan dalam kepemilikan aset. Di sisi lain, aspek eksternal meliputi

minimnya peluang kerja, ketidakmerataan dalam pembangunan antar wilayah, akses yang rendah terhadap teknologi, perubahan dalam struktur ekonomi, serta kebijakan publik yang belum sepenuhnya mendukung kelompok-kelompok yang rentan. Perubahan kondisi ekonomi global, munculnya pandemi, dan kemajuan teknologi juga berkontribusi dalam mempengaruhi dinamika kemiskinan di Indonesia.

Hubungan Kemiskinan dengan kesejahteraan sosial

Kemiskinan dan kesejahteraan sosial adalah dua gagasan yang sangat terkait satu sama lain dalam pembahasan ilmu kesejahteraan sosial. Kemiskinan bukan hanya diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga sebagai kondisi yang menghambat akses terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup dengan layak. Kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, sehingga mereka bisa menjalankan peran sosialnya dengan baik. Jadi, semakin banyak orang yang miskin di sebuah masyarakat, semakin sulit mencapai kebahagiaan sosial tersebut.

Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, kemiskinan dianggap sebagai permasalahan sosial yang memiliki banyak aspek. Kemiskinan bukan hanya terlihat dari penghasilan yang rendah, tetapi juga dari kesulitan mendapatkan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, rumah yang layak, perlindungan sosial, serta kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut membuat individu dan keluarga menghadapi berbagai jenis kerentanan yang bisa merusak kualitas hidup dan menghalangi pertumbuhan sosial serta ekonomi.

Hubungan antara kemiskinan dan kesejahteraan sosial bisa dilihat dari sejauh mana kebutuhan dasar manusia terpenuhi. Kesejahteraan sosial hanya bisa tercapai jika setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan dasar, mendapatkan layanan publik yang cukup, serta terlibat dalam kehidupan sosial. Orang yang hidup dalam kemiskinan sering kali kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga berisiko terisolasi secara sosial, bergantung pada bantuan ekonomi, dan memiliki kualitas tenaga kerja yang rendah.

Selain memengaruhi individu, kemiskinan juga berdampak pada kesejahteraan keluarga serta masyarakat. Di tingkat keluarga, kemiskinan bisa membuat kualitas pendidikan anak menjadi buruk, kondisi kesehatan anggota keluarga memburuk, terjadinya konflik dalam keluarga, serta munculnya masalah dalam pengasuhan

anak. Di tingkat masyarakat, jumlah penduduk miskin yang tinggi dapat memperlebar perbedaan sosial, meningkatkan jumlah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tindakan kriminal, serta menghambat perkembangan sosial secara keseluruhan. Sebab itu, kemiskinan bukan hanya soal uang, tapi juga jadi kendala besar dalam mencapai kebahagiaan sosial yang luas.

Dalam bidang pekerjaan sosial, hubungan antara kemiskinan dan kesejahteraan sosial dipahami berdasarkan konsep *person-in-environment*, yaitu bahwa kesejahteraan seseorang dipengaruhi oleh cara individu berinteraksi dengan lingkungan sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan di sekitarnya. Kemiskinan bisa terjadi karena kekurangan kemampuan seseorang, atau karena faktor-faktor struktural seperti ketidakseimbangan dalam penyebaran sumber daya, kurangnya peluang kerja, rendahnya kualitas pendidikan, serta tidak kuatnya sistem perlindungan sosial. Oleh karena itu, mengatasi kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga memerlukan upaya yang mampu meningkatkan kemampuan individu, memperluas akses terhadap layanan sosial, serta memperbaiki sistem sosial yang menyebabkan kemiskinan.

Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis fenomena kemiskinan dalam perspektif kesejahteraan sosial secara mendalam berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Penelitian kualitatif tidak berorientasi pada pengujian hipotesis atau pengukuran statistik, melainkan berupaya mengungkap makna, konsep, serta hubungan antarfenomena melalui interpretasi terhadap data yang diperoleh dari berbagai referensi ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif dinilai sesuai untuk mengkaji kemiskinan dalam perspektif kesejahteraan sosial karena memungkinkan peneliti menganalisis berbagai teori, konsep, dan temuan empiris secara mendalam tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan.

Pendekatan Peneitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*). Studi literatur merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber tertulis sebagai data utama untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data dikumpulkan melalui penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, laporan pemerintah, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai teori, konsep, serta perkembangan hasil penelitian yang relevan dengan topik yang dikaji.

Sumber Data

Data Primer

Data primer diperoleh dari berbagai sumber pustaka utama yang secara langsung membahas kemiskinan dan kesejahteraan sosial, seperti buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung, seperti laporan resmi pemerintah, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), laporan kementerian terkait, publikasi organisasi internasional, prosiding seminar, serta hasil penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, membaca, mencatat, serta mengkaji berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut meliputi buku ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian, publikasi pemerintah, data statistik, serta dokumen resmi lainnya yang membahas konsep kemiskinan, kesejahteraan sosial, faktor penyebab kemiskinan, dan berbagai strategi penanggulangannya. Seluruh data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterkinian sumber sehingga menghasilkan data yang valid untuk dianalisis.

Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis isi merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, serta menarik makna dari berbagai informasi yang terdapat dalam sumber pustaka secara sistematis. Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

1. Mengumpulkan berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian.
2. Menyeleksi dan mengelompokkan data berdasarkan fokus pembahasan, yaitu konsep kemiskinan, faktor penyebab, hubungan kemiskinan dengan kesejahteraan sosial, dan upaya penanggulangan kemiskinan.
3. Menganalisis isi setiap sumber berdasarkan teori kesejahteraan sosial serta hasil penelitian terdahulu.
4. Menginterpretasikan hasil analisis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara kemiskinan dan kesejahteraan sosial.
5. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup dengan baik, baik yang berkaitan dengan makanan maupun yang tidak. Di Indonesia, pengecekan tingkat kemiskinan dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Penduduk dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran per orang per bulan lebih rendah dari garis kemiskinan, yaitu batas pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan.

Berdasarkan data terbaru dari BPS, di bulan Maret 2025 jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 23,85 juta orang atau sekitar 8,47% dari total jumlah penduduk. Angka ini turun dibandingkan bulan September 2024 yang mencapai 8,57%. Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah, seperti bantuan sosial, pengembangan usaha kecil menengah, peningkatan peluang kerja, dan upaya pemulihan ekonomi mulai berdampak baik dalam mengurangi jumlah orang yang miskin. Meski begitu, kemiskinan masih menjadi masalah besar karena penyebarannya tidak sama di setiap daerah.

Selain menghitung jumlah orang yang miskin, BPS juga mengukur Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Kedua indikator ini membantu mengetahui sampai sejauh mana tingkat pengeluaran penduduk miskin mencapai garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan yang ada di kalangan penduduk miskin. Data itu penting sebagai dasar bagi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk mengurangi kemiskinan dengan lebih tepat sasaran.



Gambar 2

Secara umum, situasi kemiskinan di Indonesia mulai membaik setelah masa pandemi COVID-19. Aktivitas ekonomi yang sudah kembali seperti semula, bertambahnya pekerjaan, serta berbagai program perlindungan sosial membantu menurunkan angka orang miskin di Indonesia. Namun, kondisi ini belum merata sepenuhnya karena masih ada perbedaan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Pada bulan Maret 2025, persentase penduduk miskin di area perkotaan adalah sekitar 6,73%, sementara di daerah pedesaan mencapai 11,03%. Ini menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan masih menghadapi tantangan yang lebih sulit, seperti akses pendidikan yang terbatas, fasilitas kesehatan yang kurang, infrastruktur yang tidak memadai, serta peluang kerja yang minim. Selain itu, beberapa provinsi di daerah timur Indonesia masih mengalami tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi kemiskinan dengan berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan untuk pendidikan, subsidi kesehatan melalui BPJS, pemberdayaan UMKM, hingga pembangunan infrastruktur di desa. Upaya itu bukan hanya untuk mengurangi jumlah orang yang miskin, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Di sisi lain, tantangan baru seperti kenaikan harga bahan makanan, perubahan iklim yang mengganggu sektor pertanian, ketidakstabilan ekonomi global, serta kualitas tenaga kerja yang masih rendah tetap bisa memperlambat penurunan jumlah penduduk miskin jika tidak ditangani dengan kebijakan yang tepat.

Kemiskinan dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, kemiskinan dipahami sebagai suatu kondisi multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut keterbatasan individu dan kelompok dalam memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan dipandang sebagai masalah sosial karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu yang mengalaminya, tetapi juga memengaruhi kehidupan keluarga, komunitas, bahkan pembangunan nasional.

Kemiskinan sebagai masalah sosial memberikan dampak yang luas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Pada tingkat individu, kemiskinan menyebabkan rendahnya kualitas hidup karena kebutuhan dasar, seperti pangan bergizi, sandang, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan tidak dapat dipenuhi secara optimal. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap rendahnya status kesehatan, meningkatnya risiko penyakit, rendahnya tingkat pendidikan, serta terbatasnya kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak.

Kemiskinan juga menjadi hambatan utama dalam mencapai kesejahteraan sosial, karena kesejahteraan sosial menekankan terpenuhinya kebutuhan dasar, terciptanya kesempatan yang setara, serta meningkatnya kualitas hidup seluruh warga negara. Individu atau keluarga yang hidup dalam kemiskinan cenderung mengalami keterbatasan akses terhadap berbagai layanan publik sehingga sulit mengembangkan kemampuan, meningkatkan produktivitas, dan mencapai kehidupan yang mandiri. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, tujuan pembangunan bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, bermartabat, dan berfungsi sosial di dalam masyarakat.

Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui kebijakan perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kapasitas individu dan keluarga agar mampu meningkatkan keberfungsian sosialnya. Peran pekerja sosial menjadi sangat penting dalam proses ini, yaitu sebagai fasilitator, advokat, pendamping, dan pemberdaya masyarakat agar kelompok miskin dapat memperoleh akses terhadap sumber daya serta meningkatkan kualitas hidupnya secara berkelanjutan.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan

Strategi untuk mengatasi kemiskinan adalah rangkaian tindakan yang dilakukan bersama oleh pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta berbagai organisasi sosial, bertujuan mengurangi jumlah orang yang miskin sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Dari sudut pandang kesejahteraan sosial, upaya mengatasi kemiskinan tidak hanya berupa pemberian bantuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, tetapi juga bertujuan meningkatkan kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat agar bisa hidup mandiri secara ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah kemiskinan, perlu dilaksanakan strategi yang melibatkan kebijakan pemerintah, program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta peran pekerja sosial dan lembaga sosial dalam membantu masyarakat.

Salah satu cara penting adalah kebijakan pemerintah yang bertujuan agar semua orang bisa merasakan kesejahteraan dengan adanya berbagai peraturan dan program pembangunan. Pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan, seperti memberikan peluang kerja, membangun infrastruktur di daerah terpencil, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah, serta memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menerapkan strategi nasional untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dengan bekerja sama antara pemerintah pusat dan daerah agar program yang dilaksanakan lebih tepat mengenai sasarannya. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa upaya mengatasi kemiskinan tidak hanya dilakukan dengan cara ekonomi, tetapi juga melalui pengembangan manusia dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Sebagai langkah menerapkan kebijakan itu, pemerintah melaksanakan beberapa program bantuan sosial yang bertujuan untuk meringankan kesulitan hidup masyarakat yang kurang mampu. Program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), serta berbagai jenis subsidi termasuk dalam sistem perlindungan sosial nasional. Bantuan sosial bertujuan sebagai perlindungan sosial agar masyarakat yang kurang mampu tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya ketika menghadapi kesulitan ekonomi. Namun, bantuan sosial seharusnya tidak hanya memberikan kebutuhan pokok, tetapi juga harus dikombinasikan dengan program pemberdayaan agar orang yang menerima bantuan bisa meningkatkan penghasilan mereka dan keluar dari kemiskinan secara terus-menerus.

Strategi berikutnya adalah memperkuat masyarakat, yaitu upaya meningkatkan kemampuan masyarakat agar bisa mengenali potensi yang mereka miliki, menggunakan sumber daya yang ada, serta terlibat aktif dalam pembangunan. Pendekatan pemberdayaan bertujuan menciptakan kemandirian masyarakat dengan memberikan pelatihan keterampilan, membantu pengembangan usaha yang menghasilkan pendapatan, memudahkan akses ke modal usaha, memperkuat organisasi masyarakat, serta meningkatkan peran masyarakat dalam mengambil keputusan. Dalam bidang pekerjaan sosial, pemberdayaan dianggap sebagai cara yang lebih baik dan lebih tahan lama dibandingkan memberi bantuan yang hanya sementara, karena masyarakat diajak untuk menjadi pemain utama dalam meningkatkan kualitas hidup mereka sendiri.

Dalam menerapkan strategi tersebut, pekerja sosial memainkan peran yang sangat penting sebagai fasilitator, pendamping, advokat, mediator, pendidik, dan pelaku pemberdayaan masyarakat. Pekerja sosial membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mengetahui kebutuhan dan kemampuan yang mereka punya, menghubungkan mereka dengan berbagai layanan bantuan sosial, ikut serta dalam pelaksanaan program pemerintah, dan berjuang agar kelompok yang rentan bisa mendapatkan hak-haknya serta akses yang adil terhadap sumber daya. Selain itu, pekerja sosial juga membantu meningkatkan kemampuan individu dan keluarga dengan memberikan konseling, memperkuat hubungan sosial, serta membangun kelompok masyarakat, agar mereka bisa menyelesaikan masalah sendiri.

Selain pemerintah dan tenaga kerja sosial, lembaga-lembaga sosial juga memberikan peran penting dalam mengatasi masalah kemiskinan. Lembaga sosial,

baik yang didirikan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat, yayasan, lembaga keagamaan, dan organisasi nonpemerintah, bertugas memberikan pelayanan sosial, pendidikan, pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, bimbingan masyarakat, hingga mewakili kepentingan dalam hal kebijakan. Kerja sama antar lembaga sangat penting agar layanan yang diberikan tidak saling tumpang tindih dan bisa mencakup masyarakat yang kurang mampu secara lebih luas. Kerja sama antara pemerintah, pekerja sosial, dan lembaga-lembaga sosial merupakan salah satu hal penting dalam mencapai kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.¹

Analisis

Strategi yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia memiliki beberapa keuntungan. Salah satu keunggulannya adalah adanya gabungan antara bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat, sehingga upaya mengatasi kemiskinan tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan pokok, tetapi juga pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Pemerintah juga telah menyusun sistem perlindungan sosial yang lebih terpadu melalui berbagai program bantuan yang mencakup kelompok rentan. Selain itu, peran pemerintah daerah, pekerja sosial, organisasi masyarakat, serta berbagai lembaga sosial memperkuat kerja sama dalam menjalankan program-program tersebut, sehingga upaya mengurangi kemiskinan menjadi lebih menyeluruh. Pendekatan kolaboratif ini sesuai dengan prinsip kesejahteraan sosial yang mengedepankan kerja sama dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Di sisi lain, masih ada beberapa masalah dalam penerapan kebijakan penanggulangan kemiskinan. Masalah yang sering muncul adalah ketidaksesuaian tujuan penerima bantuan karena kualitas data yang belum benar-benar tepat, kurangnya kerja sama antar lembaga, serta masih banyak program yang bersifat jangka pendek dan lebih fokus pada pemberian bantuan daripada pengembangan kapasitas. Selain itu, di beberapa daerah, akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan fasilitas umum masih terbatas, sehingga masyarakat yang miskin sulit meningkatkan kualitas hidupnya meskipun sudah mendapatkan bantuan sosial.

¹ Gracenda and others, 'Peran Program Bantuan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan', *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, (2025), h. 110.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mengatasi kemiskinan membutuhkan kebijakan yang lebih baik, terus-menerus, dan sesuai dengan ciri khas setiap daerah. ²

Berdasarkan kelebihan dan kekurangan yang ada, rekomendasi yang diberikan adalah memperkuat keakuratan data tentang masyarakat miskin agar program bantuan benar-benar tepat sasaran, meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pekerja sosial, dan organisasi sosial, serta memperluas program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal. Pemerintah juga harus meningkatkan pengeluaran untuk bidang pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pengadaan pekerjaan agar masyarakat bisa memiliki kemampuan sendiri untuk keluar dari keadaan miskin. Selain itu, evaluasi program harus dilakukan secara rutin agar bisa mengecek apakah kebijakan tersebut masih efektif, sementara itu, peran pekerja sosial perlu ditingkatkan dengan menambah jumlah tenaga profesional dan meningkatkan kualitas bantuan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan demikian, strategi penanggulangan kemiskinan tidak hanya bisa mengurangi jumlah orang yang miskin, tetapi juga membawa dampak positif bagi kesejahteraan sosial yang bisa terus berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Simpulan

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensional karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya tingkat pendapatan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, perumahan, serta berbagai layanan sosial lainnya. Dalam perspektif kesejahteraan sosial, kemiskinan dipandang sebagai kondisi yang menghambat individu, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar serta menjalankan fungsi sosialnya secara optimal. Oleh karena itu, kemiskinan tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan ekonomi, melainkan sebagai masalah sosial yang memerlukan penanganan secara menyeluruh melalui pendekatan kesejahteraan sosial.

Kondisi kemiskinan di Indonesia menunjukkan tren yang terus mengalami penurunan, namun masih menjadi tantangan besar karena adanya kesenjangan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan. Berbagai faktor seperti rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja, ketimpangan

² Willya Achmad and others, 'Intervensi Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat: Model Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kawasan Pesisir Selatan Jawa Barat', *Jurnal Ilmiah Nasional* (2026), h. 35.

pembangunan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta faktor struktural lainnya menjadi penyebab utama kemiskinan. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga memengaruhi ketahanan keluarga, meningkatkan kesenjangan sosial, menurunkan kualitas hidup masyarakat, dan menghambat proses pembangunan nasional.

Upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan strategi yang terintegrasi melalui kebijakan pemerintah, program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi antara pekerja sosial dan berbagai lembaga sosial. Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), dan berbagai bentuk perlindungan sosial lainnya telah memberikan kontribusi dalam mengurangi beban masyarakat miskin. Namun demikian, efektivitas program tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, keterbatasan koordinasi antarlembaga, serta belum optimalnya program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan, penanggulangan kemiskinan yang efektif tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian bantuan sosial, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan keterampilan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan. Selain itu, sinergi antara pemerintah, pekerja sosial, lembaga sosial, sektor swasta, dan masyarakat perlu terus diperkuat agar setiap program dapat berjalan secara tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, yaitu terwujudnya masyarakat yang mandiri, adil, sejahtera, dan mampu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal, dapat tercapai.

Daftar Pustaka

- Achmad, Willya, Dhiya Nabilah Ramadhan, Boy Iskandar Warongan, Universitas Pasundan, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara, and others, 'Intervensi Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat: Model Untuk Memutus Rantai Kemiskinan Di Kawasan Pesisir Selatan Jawa Barat', *Jurnal Ilmiah Nasional*, (2026)
- Andina, Wida, 'Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islami', 09 (2024)

- Annasthasya, Dellia, 'Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Literatur Dalam Konteks Pendidikan', 2025,
- Darmalaksana, Wahyudin, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan', *Ilmiah*, 1 (2020),
- Fadli, Muhammad Rijal, 'Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Jurnal Humanika*, 21 (2021),
- Fentiani, Siti Alifa, 'Peran Kesejahteraan Sosial Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat', 2019 (2019),
- Gracenda, Br Purba, Dicky MC Sinulingga and Josua Togatorop, 'Peran Program Bantuan Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan', *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen*, 2025
- Habibullah, 'Inklusi Keuangan Dan Penurunan Kemiskinan: Studi Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai', 5 (2019)
- Hasanah, Waridatul, 'Analisis Kesejahteraan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu', 4 (2023),
- Herdiana, Dian, 'Kemiskinan , Kesenjangan Sosial Dan Pembangunan Desa', 02 (2023),
- Jubaidah, Haifa Nur, 'Peran Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesejahteraan Sosial', 4 (2025),
- Kholis, Nur, 'Kesejahteraan Sosial Di Indonesia'
- Pratama, Egi Yoga, *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pemberdayaan Ekonomi Lokal (Studi Pada Desa Hanura, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran).*, 2025
- Pratiwi, Salsabilla Aurelia, Cantika Noorsyarifa and Pusat Studi Csr, 'Upaya Penanggulangan Permasalahan Kemiskinan Ekonomi Di Indonesia Melalui Perspektif Pekerja Sosial', *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 5 (2022)
- Ruja, I Nyoman, 'Kemiskinan Dan Perubahan Sosial: Sebuah Model Transformasi Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11 (2022),
- Safitri, Shelva Edna, 'Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Banten', 1 (2020),
- Sitepu, Hemat, 'Kemiskinan Dan Kesejahteraan: Sebuah Kajian Konsep (Poverty and Welfare: A Study of the Concept)', 17 (2012),
- Sugeng Pujiharto, 'Identifikasi Modal Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Semarang', *Jurnal Sosio Konsepsia*, 8 (2018),

- Sulistyowati, Fadjarini, 'Utopia Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Mendorong Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 314 (2024),
- syahrida, 'Membongkar Isi Pesan Dan Media Dengan Content Analysis Gusti Yasser Arafat UIN Antasari Banjarmasin', *Manajemen*, 17 (2018),
- Syawie, Mochamad, 'Kemiskinan Dan Kesenjangan Sosial', *Jurnal Informasi*, 16 (2011),
- Wahyudin Darmalaksana, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan', *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati*, 6 (2020),
- Winarno, Istiana Hermawati dan Endro, 'Persepsi Keluarga Penerima Manfaat Tentang Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia', *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2020,

Sama-Sama Rentan, Sama-Sama Terlupakan: Tinjauan Pustaka Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Lansia melalui Kerangka Individu dalam Lingkungan

Ariel Rifky Cahyadi Usman¹, Usman², Syamsidar³

¹ Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar, Indonesia.

^{2 3} Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UNI Alauddin Makassar, Indonesia.

a.r.cusman05789@gmail.com, usmannoer@uin-alauddin.ac.id

Abstrak: Anak dan lanjut usia sama-sama rentan mengalami kekerasan, penelantaran, dan ketimpangan akses layanan, tetapi kajian atas keduanya kerap berjalan sendiri-sendiri. Tinjauan pustaka ini menyatukan sembilan artikel ilmiah bertema Individu dalam Lingkungan, Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial, perlindungan anak, dan kesejahteraan lansia ke dalam satu kerangka analitik pekerjaan sosial, menggunakan metode studi kepustakaan dengan teknik analisis isi dan sintesis paragraf model Inti-Bukti-Contoh-Penegasan Ulang. Hasil telaah menunjukkan bahwa kekerasan, kemiskinan, isolasi sosial, persoalan kesehatan, dan kelemahan kelembagaan muncul konsisten pada kedua kelompok usia, meski bentuk dan pemicunya berbeda. Kedua kerangka ini terbukti mampu menjembatani isu anak dan lansia karena sama-sama menempatkan individu sebagai bagian dari sistem lingkungan berlapis, dari keluarga hingga kebijakan negara. Tinjauan ini merekomendasikan penguatan simultan pada tingkat keluarga, lembaga, dan kebijakan melalui pendekatan siklus hidup, sehingga perlindungan anak dan kesejahteraan lansia dipandang sebagai satu rangkaian keberfungsian sosial yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Individu dalam Lingkungan; Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial; perlindungan anak; kesejahteraan lansia; tinjauan pustaka*

Equally Vulnerable, Equally Forgotten: A Literature Review of Child Protection and Elderly Welfare through the Person-in-Environment Framework

Ariel Rifky Cahyadi Usman¹, Usman², Syamsidar³

¹ Informatics and Computer Engineering Education, Universitas Negeri Makassar, Indonesia.

^{2 3} Faculty of Da'wah and Communication, UIN Alauddin Makassar, Indonesia.
a.r.cusman05789@gmail.com, usmannoer@uin-alauddin.ac.id

Abstract: Children and the elderly are both vulnerable to abuse, neglect, and unequal access to services; however, studies on these two groups often run in isolation from one another. This literature review integrates nine scientific articles on the themes of Person-in-Environment, Human Behavior in the Social Environment, child protection, and elderly welfare into a single social work analytical framework. Using a literature study method with content analysis and paragraph synthesis techniques based on the Point-Evidence-Example-Link (PEEL) model, the review reveals that violence, poverty, social isolation, health issues, and institutional weaknesses consistently emerge across both age groups, despite differing forms and triggers. Both frameworks prove capable of bridging the issues of children and the elderly, as they both position the individual as part of a multi-layered environmental system, ranging from the family to state policy. This review recommends simultaneous strengthening at the family, institutional, and policy levels through a life-cycle approach, so that child protection and elderly welfare are viewed as a continuous continuum of social functioning.

Keywords: Person-in-Environment; Human Behavior in the Social Environment; child protection; elderly welfare; literature review

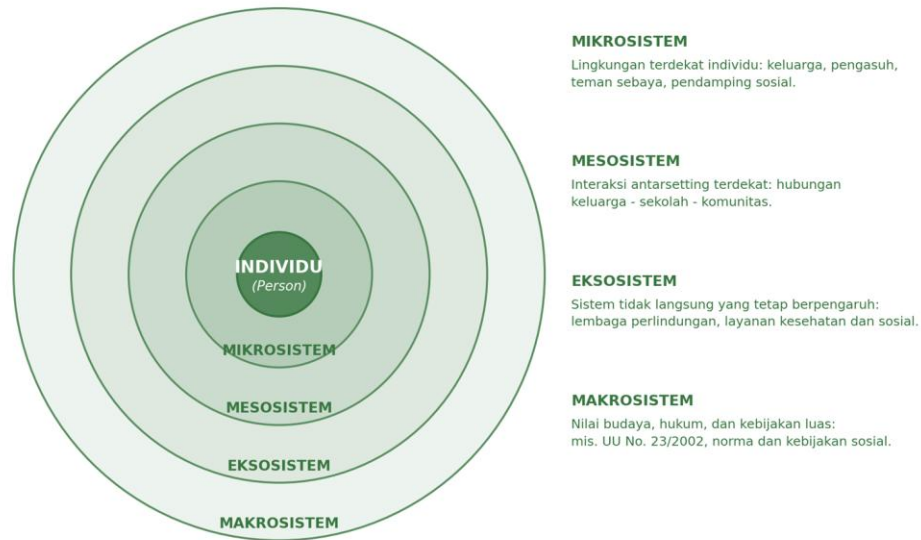
Pendahuluan

Bagian Anak dan lanjut usia sama-sama termasuk kelompok yang rentan mengalami kekerasan, penelantaran, dan pengabaian hak dalam kehidupan sosial di Indonesia. Kajian tentang kebijakan perlindungan anak mencatat bahwa anak masih menghadapi ancaman kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi meskipun payung hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tersedia. Pada saat yang hampir bersamaan, kajian tentang lansia di Kota Makassar menunjukkan bahwa kemiskinan, penelantaran, kekerasan, dan isolasi sosial juga menjadi ancaman nyata bagi kelompok lanjut usia, terutama ketika struktur keluarga berubah dan sistem perlindungan negara belum bekerja secara optimal. Kedua potret ini menegaskan bahwa kerentanan sosial bukan monopoli satu kelompok usia; anak dan lansia sama-sama berdiri di titik yang lemah dalam relasi kuasa keluarga, masyarakat, dan negara.

Kerangka Individu dalam Lingkungan dan kerangka Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial menawarkan cara pandang yang mampu menyatukan kajian lintas kelompok usia tersebut, karena keduanya menegaskan bahwa perilaku manusia tidak dapat dipahami secara terpisah dari lingkungannya. Kajian tentang Individu dalam Lingkungan menjelaskan bahwa interaksi individu dan lingkungan berlangsung dinamis dan bersifat timbal balik, sehingga individu dan lingkungan saling membentuk satu sama lain. Kajian tentang Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial memperluas gagasan ini dengan mengintegrasikan aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual individu ke dalam lapisan lingkungan yang berjenjang, yakni mikro, meso, ekso, dan makro, mengikuti model ekologi Bronfenbrenner. Dalam praktiknya, cara pandang ini berarti seorang pekerja sosial yang menilai kondisi anak tidak cukup melihat anak itu sendiri, tetapi juga pola asuh keluarga, dukungan sekolah, hingga kebijakan perlindungan anak yang berlaku; pola pikir yang sama juga berlaku ketika menilai lansia yang mengalami isolasi sosial. Dengan demikian, kedua kerangka ini bekerja sebagai jembatan konseptual yang menyatukan berbagai isu kesejahteraan sosial ke dalam satu bahasa analitik yang sama.

Meskipun kajian tentang anak dan lansia dalam lingkup pekerjaan sosial Indonesia terus berkembang, sebagian besar literatur membahas kedua kelompok tersebut secara terpisah, sehingga pola tantangan yang sebenarnya beririsan menjadi kurang terlihat. Sembilan artikel yang menjadi bahan tinjauan ini tersebar pada dua rumpun besar, yaitu kerangka konseptual Individu dalam Lingkungan dan Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial, serta penerapannya pada isu perlindungan anak dan kesejahteraan lansia. Oleh karena itu, tinjauan ini bertujuan menyatukan kesembilan artikel tersebut ke dalam satu kerangka analitik pekerjaan sosial, memetakan tema-tema yang beririsan antara isu anak dan lansia, serta merumuskan implikasi praktisnya bagi penguatan intervensi pekerjaan sosial di Indonesia.

Kerangka Ekologi Sosial sebagai Perluasan Person-in-Environment



Gambar 1. Kerangka ekologi sosial (mikro-meso-ekso-makrosistem) sebagai perluasan konsep Individu dalam Lingkungan yang digunakan sebagai kerangka analitik tinjauan ini.

Metode

Tinjauan ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama tinjauan bukan menghasilkan data primer baru, melainkan menyusun ulang dan mensintesis temuan yang sudah ada dari berbagai artikel ilmiah agar membentuk pemahaman yang lebih utuh mengenai keterkaitan isu anak dan lansia dalam bingkai pekerjaan sosial.

Sumber data yang digunakan adalah sembilan artikel ilmiah bertema Individu dalam Lingkungan, Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial, perlindungan anak, dan kesejahteraan lansia sebagaimana dirangkum pada Tabel 1. Kedua istilah Indonesia tersebut dipakai sebagai padanan dari dua kerangka pekerjaan sosial yang dirujuk kesembilan artikel sumber; judul asli artikel tetap dicantumkan apa adanya pada Tabel 1 dan Daftar Pustaka agar sumber dapat ditelusuri secara akurat. Kesembilan artikel tersebut dipilih karena secara tematik saling terkait dan sama-sama menggunakan pendekatan studi literatur, sehingga memudahkan proses sintesis lintas artikel.

Tabel 1. Daftar artikel yang menjadi sumber utama tinjauan literatur ini.

No	Judul Artikel	Penulis Utama	Fokus Kajian
1	Analisis Konsep Person in Environment (PIE) dalam Memahami Interaksi Individu dan Lingkungan Sosial	Dicky Rahmat Mursyidan dkk.	Kerangka konseptual interaksi timbal balik individu-lingkungan
2	Kerangka HBSE dalam Praktik Pekerjaan Sosial Indonesia	Zainuddin Muayyad Faiz dkk.	Sintesis kerangka Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial dengan psikologi, sosiologi, dan ekologi sosial
3	Kebijakan dan Regulasi Perlindungan Anak: Tantangan dan Strategi Implementasi	Andi Dhivana Zahram dkk.	Tantangan dan strategi implementasi kebijakan perlindungan anak
4	Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak	Ummu Kalsum dkk.	Peran lembaga melalui pendampingan, rehabilitasi, dan advokasi
5	Perlindungan Anak dalam Keluarga	Nurul Mutmainnah dkk.	Peran keluarga sebagai lingkungan utama perlindungan anak
6	Teori Pendekatan Holistik dalam Perkembangan Anak serta Pengaruh Lingkungan dan Pola Asuh	Sri Rahmayunita dkk.	Pengaruh lingkungan dan pola asuh terhadap perkembangan anak
7	Lansia Terlupakan: Jebakan Kemiskinan, Kekerasan, dan Isolasi di Masa Tua (Kota Makassar)	Nur Inaya Syam dkk.	Kemiskinan struktural, penelantaran, kekerasan, dan isolasi lansia
8	Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia dalam Mewujudkan Penuaan Aktif	Nayla Saputri Jayanti dkk.	Pemenuhan hak dan kebutuhan dasar menuju penuaan aktif
9	Pekerja Sosial sebagai Pendamping dalam Perlindungan Lansia	Sri Mardianti Asmah dkk.	Peran pekerja sosial sebagai fasilitator, mediator, dan advokat

Analisis dilakukan melalui empat tahap, yaitu identifikasi sumber, seleksi kesesuaian tema dengan kerangka Individu dalam Lingkungan, analisis isi untuk menggali temuan kunci dari tiap artikel, dan sintesis akhir yang disusun menggunakan struktur paragraf Inti-Bukti-Contoh-Penegasan Ulang. Struktur ini dipilih agar setiap paragraf hasil sintesis memiliki inti gagasan yang jelas, didukung oleh temuan dari artikel yang ditelaah, diperjelas melalui gambaran konkret, dan ditutup dengan penegasan ulang, sehingga alur bacaan tetap runtut meskipun materinya berasal dari sembilan sumber yang berbeda.

Alur Metode Tinjauan Literatur



Gambar 2. Alur metode tinjauan literatur, dari identifikasi sumber hingga sintesis paragraf model Inti-Bukti-Contoh-Penegasan Ulang.

Hasil

Kerangka Individu dalam Lingkungan dan Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial terbukti menjadi fondasi konseptual yang relevan untuk membaca berbagai persoalan kesejahteraan sosial secara terintegrasi. Kajian tentang Individu dalam Lingkungan menunjukkan bahwa perilaku individu tidak dapat dilepaskan dari konteks sosialnya, karena individu dan lingkungan saling membentuk melalui interaksi yang berlangsung terus-menerus. Kajian tentang Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial memperkuat temuan ini dengan menegaskan bahwa asesmen holistik terhadap klien baik anak, lansia, maupun kelompok lain perlu mempertimbangkan empat lapisan lingkungan sekaligus, mulai dari keluarga di lapisan mikro hingga kebijakan negara di lapisan makro. Sebagai contoh, isu tumbuh kembang anak yang terhambat dan kesehatan jiwa komunitas yang diangkat dalam kajian tersebut sesungguhnya tidak jauh berbeda strukturnya dengan isu kemiskinan lansia: keduanya berakar pada keterbatasan akses di tingkat keluarga yang diperparah oleh lemahnya dukungan sistem di tingkat masyarakat dan negara. Dengan demikian, kedua kerangka ini bukan sekadar teori abstrak, melainkan alat baca yang dapat dipakai lintas kelompok usia dan lintas isu.

Perlindungan dan Kesejahteraan Anak

Pada isu perlindungan anak, kerangka hukum di Indonesia sesungguhnya relatif lengkap, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi banyak kendala di lapangan. Kajian kebijakan dan regulasi perlindungan anak menunjukkan bahwa payung hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengatur hak-hak anak secara menyeluruh, namun koordinasi antarlembaga yang belum maksimal,

keterbatasan sumber daya manusia dan dana, serta rendahnya kesadaran masyarakat membuat implementasinya berjalan tidak merata antardaerah. Sebagai gambaran, sebuah daerah dapat memiliki gugus tugas perlindungan anak yang aktif, sementara daerah lain hanya menjalankan regulasi tersebut di atas kertas karena tidak memiliki tenaga pendamping yang memadai. Ketimpangan semacam inilah yang membuat perlindungan anak di Indonesia disebut belum merata secara nasional, meskipun kerangka hukumnya sudah tersedia.

Pada tingkat lembaga, peran pendampingan justru menjadi kunci keberhasilan program perlindungan anak. Kajian mengenai lembaga perlindungan anak menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut berkontribusi nyata melalui program pendampingan, rehabilitasi, advokasi, dan pemberdayaan keluarga, terutama ketika pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta terlibat aktif secara bersamaan. Namun demikian, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal tetap menjadi hambatan utama, sejalan dengan temuan pada kajian kebijakan sebelumnya. Sebagai contoh konkret, sebuah lembaga rehabilitasi anak korban kekerasan dapat memiliki program konseling yang baik, tetapi efektivitasnya berkurang apabila tidak ada jalur rujukan yang jelas dengan pihak kepolisian, sekolah, atau layanan kesehatan. Temuan ini menegaskan kembali bahwa keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada sinergi lintas lembaga, bukan hanya pada kekuatan satu lembaga saja.

Di lingkup yang lebih dekat dengan anak, keluarga tetap menjadi lingkungan utama yang menentukan keberhasilan perlindungan. Kajian tentang perlindungan anak dalam keluarga menunjukkan bahwa perlindungan yang optimal mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan, serta dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua, pola asuh, dan kesadaran hukum terhadap hak-hak anak. Kajian tentang pendekatan holistik dalam perkembangan anak memperkuat gambaran ini dengan menunjukkan bahwa pola asuh demokratis memberi dampak positif terhadap karakter, pengaturan emosi, dan keterampilan sosial anak, sementara pola asuh otoriter maupun permisif cenderung berdampak negatif terhadap kemandirian dan kontrol diri anak.

Misalnya, seorang anak yang dibesarkan dengan pola asuh demokratis diberi ruang bicara namun tetap dengan batasan yang jelas cenderung tumbuh lebih percaya diri dibandingkan anak yang dibesarkan dengan pola asuh yang serba melarang atau sebaliknya serba membiarkan. Dengan kata lain, sekuat apa pun regulasi dan lembaga perlindungan anak di tingkat makro, keberhasilan akhirnya tetap bergantung pada kualitas relasi di lingkup keluarga.

Tabel 2. Ringkasan temuan utama dan faktor penghambat pada empat artikel bertema perlindungan anak.

Artikel	Temuan Utama	Faktor Penghambat
Kebijakan & Regulasi Perlindungan Anak	Kerangka hukum relatif lengkap (mis. UU No. 23 Tahun 2002), tetapi pelaksanaannya belum merata antardaerah	Koordinasi antarlembaga belum maksimal, SDM dan dana terbatas, kesadaran masyarakat rendah
Peran Lembaga Perlindungan Anak	Lembaga berperan melalui pendampingan, rehabilitasi, advokasi, dan pemberdayaan keluarga	Keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga belum optimal, kesenjangan implementasi
Perlindungan Anak dalam Keluarga	Perlindungan mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan pendidikan anak	Kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua, pola asuh, kesadaran hukum
Pendekatan Holistik Perkembangan Anak	Pola asuh demokratis berdampak positif; pola asuh otoriter dan permisif berisiko negatif	Perkembangan anak masih sering dipandang terpisah per aspek, bukan sebagai satu kesatuan

Kesejahteraan dan Perlindungan Lanjut Usia

Pada isu lansia, kemiskinan muncul sebagai persoalan yang bersifat struktural, bukan sekadar kondisi sesaat. Kajian tentang lansia di Kota Makassar menunjukkan bahwa kemiskinan lansia terbentuk sepanjang siklus hidup akibat keterbatasan akses terhadap pendidikan, pekerjaan formal, dan perlindungan sosial di masa muda, dan kondisi ini diperparah oleh penelantaran, kekerasan, serta isolasi sosial yang meningkat seiring melemahnya struktur keluarga dan sistem perlindungan negara. Sebagai gambaran, seorang lansia yang dahulu bekerja di sektor informal tanpa jaminan pensiun akan jauh lebih rentan jatuh miskin di usia tua dibandingkan lansia yang pernah bekerja di sektor formal dengan jaminan sosial. Isolasi sosial yang menyertai kondisi ini pun terbukti berdampak signifikan terhadap kesehatan fisik dan mental, sehingga kemiskinan, kekerasan, dan isolasi pada lansia sesungguhnya adalah satu rangkaian persoalan yang saling memperkuat, bukan tiga masalah yang berdiri sendiri.

Di sisi lain, pemenuhan hak dan kebutuhan dasar terbukti menjadi kunci untuk mendorong penuaan yang aktif dan bermartabat. Kajian tentang pemenuhan hak lansia menunjukkan bahwa hak atas layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat memberi dampak besar terhadap kualitas hidup lansia, sementara ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan dasar berisiko menimbulkan ketergantungan dan penurunan kualitas hidup.

Sebagai contoh, lansia yang masih dilibatkan dalam kegiatan komunitas, seperti kelompok pengajian atau posyandu lansia, cenderung menunjukkan kondisi mental yang lebih stabil dibandingkan lansia yang sepenuhnya terisolasi di rumah. Temuan ini menegaskan bahwa penuaan aktif bukan sekadar slogan, melainkan hasil nyata dari terpenuhinya hak-hak dasar lansia secara konsisten.

Dalam upaya memenuhi hak dan kebutuhan tersebut, pekerja sosial memegang peran yang tidak tergantikan sebagai pendamping lansia. Kajian tentang pekerja sosial sebagai pendamping lansia menunjukkan bahwa mereka berperan sebagai fasilitator, mediator, advokat, sekaligus pendamping harian yang membantu lansia memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Sebagai gambaran, seorang pekerja sosial dapat berperan sebagai mediator ketika terjadi konflik antara lansia dan keluarganya, sekaligus sebagai advokat ketika lansia kesulitan mengakses layanan kesehatan. Melalui peran-peran tersebut, pekerja sosial membantu lansia hidup lebih mandiri, aman, dan bermartabat, sehingga penguatan kapasitas profesional pekerja sosial layak menjadi prioritas kebijakan, sejalan dengan kebutuhan penguatan lembaga yang juga ditemukan pada isu perlindungan anak.

Tabel 3. Ringkasan temuan utama dan faktor penghambat pada tiga artikel bertema kesejahteraan lansia.

Artikel	Temuan Utama	Faktor Penghambat
Lansia Terlupakan (Kota Makassar)	Kemiskinan lansia bersifat struktural sepanjang siklus hidup; isolasi sosial berdampak nyata pada kesehatan fisik dan mental	Keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan formal di masa muda, lemahnya sistem perlindungan negara
Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Dasar Lansia	Pemenuhan hak kesehatan, perlindungan sosial, dan partisipasi sosial mendorong tercapainya penuaan aktif	Ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan dasar berisiko menimbulkan ketergantungan
Pekerja Sosial sebagai Pendamping Lansia	Pekerja sosial berperan sebagai fasilitator, mediator, advokat, sekaligus pendamping harian lansia	Kapasitas profesional dan dukungan kebijakan bagi pekerja sosial masih perlu diperkuat

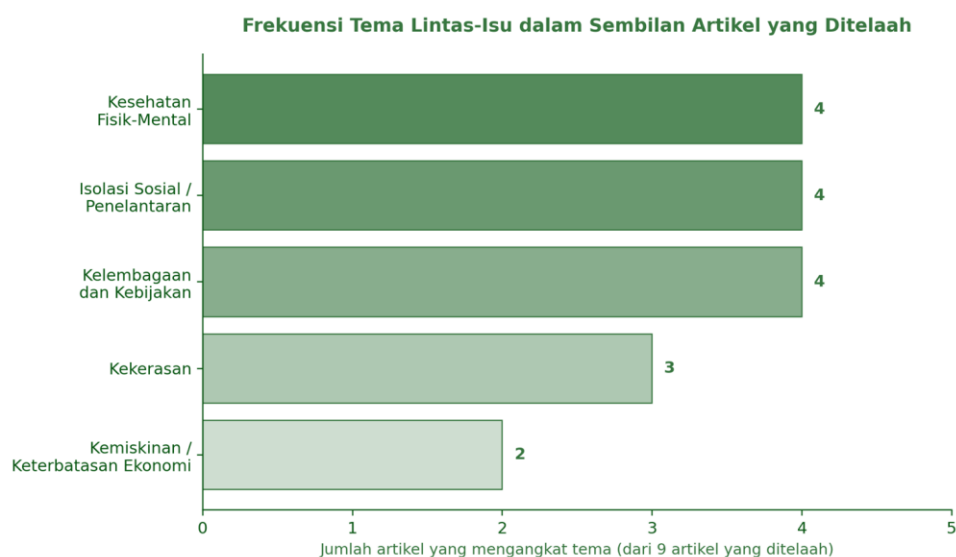
Pemetaan Tema Lintas Artikel

Untuk melihat pola keterkaitan antara isu anak dan lansia secara lebih ringkas, temuan dari sembilan artikel dipetakan ke dalam lima tema lintas isu, yaitu kekerasan, kemiskinan atau keterbatasan ekonomi, isolasi sosial atau penelantaran, kesehatan fisikmental, serta kelembagaan dan kebijakan. Pemetaan ini menunjukkan bahwa tema kesehatan, isolasi/penelantaran, dan kelembagaan/kebijakan masing-masing muncul pada empat dari sembilan artikel, sementara tema kekerasan muncul pada tiga artikel dan tema kemiskinan pada dua artikel. Pola ini mengonfirmasi bahwa meskipun anak dan lansia berada pada tahap kehidupan yang berbeda, keduanya samasama bersinggungan dengan persoalan kelembagaan yang lemah dan risiko kesehatan yang tinggi apabila lingkungan pendukungnya tidak berfungsi baik.

Tabel 4. Matriks kemunculan lima tema lintas isu pada sembilan artikel yang ditelaah.

Artikel	Kekerasan	Kemiskinan	Isolasi/ Penelantaran	Kesehatan	Kelembagaan / Kebijakan
Individu dalam Lingkungan (Interaksi IndividuLingkungan)	–	–	–	–	–
Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial	–	–	–	✓	✓
Kebijakan & Regulasi Anak	✓	–	–	–	✓

Lembaga Perlindungan Anak	✓	–	✓	–	✓
Perlindungan Anak dalam Keluarga	✓	✓	✓	–	–
Pendekatan Holistik Anak	–	–	–	–	–
Lansia Terlupakan	✓	✓	✓	✓	✓
Hak dan Kebutuhan Dasar Lansia	–	–	–	✓	✓
Pekerja Sosial Pendamping Lansia	–	–	✓	✓	–



Gambar 3. Frekuensi tema lintasisu pada sembilan artikel yang ditelaah, diolah dari Tabel 4.

Pembahasan

Temuan pada bagian hasil menunjukkan bahwa kerangka Individu dalam Lingkungan dan Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial bukan hanya cocok diterapkan pada satu kelompok usia, melainkan mampu menjembatani isu anak dan lansia sekaligus karena keduanya menekankan bahwa keberfungsian sosial individu selalu berada dalam sistem lingkungan yang berlapis. Pada anak, mikrosistem berperan melalui pola asuh orang tua; pada lansia, mikrosistem berperan melalui dukungan keluarga inti dan pendamping. Pada anak, mesosistem terwujud melalui hubungan antara keluarga, sekolah, dan lembaga perlindungan anak; pada lansia, mesosistem terwujud melalui hubungan antara keluarga, layanan kesehatan, dan komunitas. Pada kedua kelompok, eksosistem dan makrosistem samasama diwakili oleh kelembagaan dan kebijakan yang, sayangnya, masih menghadapi persoalan

serupa berupa koordinasi yang lemah dan dukungan sumber daya yang terbatas. Pola ini memperlihatkan bahwa persoalan kesejahteraan sosial di Indonesia, baik pada anak maupun lansia, cenderung berulang di titik yang sama, yakni pada lapisan kelembagaan yang berada di antara keluarga dan negara.

Tabel 5. Perbandingan dimensi kerentanan dan strategi penanganan antara isu anak dan isu lanjut usia.

Dimensi	Pada Anak	Pada Lanjut Usia
Bentuk kerentanan utama	Kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran	Kemiskinan struktural, penelantaran, dan isolasi sosial
Aktor mikrosistem kunci	Orang tua atau pengasuh melalui pola asuh	Keluarga inti dan pekerja sosial pendamping
Aktor mesosistem	Sekolah, komunitas, dan lembaga perlindungan anak	Layanan kesehatan, komunitas, dan lembaga sosial lansia
Tantangan kelembagaan	Koordinasi antarlembaga lemah, SDM dan dana terbatas	Sistem perlindungan negara lemah, dukungan kebijakan minim
Strategi kunci	Penguatan pola asuh, kapasitas lembaga, dan pemerataan kebijakan	Pemenuhan hak dasar menuju penuaan aktif berbasis komunitas

Perbandingan pada Tabel 5 memperlihatkan bahwa meskipun bentuk kerentanan anak dan lansia berbeda, yaitu kekerasan dan eksploitasi pada anak berbanding kemiskinan struktural dan isolasi pada lansia, strategi penanganan keduanya bertumpu pada logika yang sama, yakni penguatan simultan pada tingkat keluarga, lembaga, dan kebijakan. Implikasinya, intervensi pekerjaan sosial yang hanya berfokus pada satu lapisan, misalnya hanya memperkuat regulasi tanpa memperkuat pendampingan di tingkat keluarga, berisiko tidak memberi dampak yang berkelanjutan. Sebaliknya, penguatan mikrosistem yang tidak disertai dukungan kelembagaan yang memadai juga akan mudah kehabisan sumber daya di tengah jalan. Oleh karena itu, pekerja sosial dan pengambil kebijakan perlu memandang penguatan mikrosistem, mesosistem, dan makrosistem sebagai satu paket kebijakan, bukan sebagai pilihan yang berdiri sendirisendiri.

Tinjauan ini tentu memiliki keterbatasan karena seluruh temuan bersumber dari sintesis sembilan artikel studi pustaka, bukan dari data primer di lapangan, sehingga generalisasi terhadap konteks daerah lain di luar Kota Makassar perlu dilakukan secara hati-hati. Meskipun demikian, pola keterkaitan antara isu anak dan lansia yang ditemukan dalam tinjauan ini cukup konsisten untuk dijadikan dasar rekomendasi awal. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan siklus hidup yang secara eksplisit menghubungkan pengalaman masa kanak-kanak dengan kondisi di masa lanjut usia, mengingat kerentanan yang dialami anak hari ini berpotensi membentuk pola kerentanan yang sama ketika anak tersebut kelak memasuki usia lanjut.

Simpulan

Temuan Tinjauan pustaka ini menyimpulkan bahwa kerangka Individu dalam Lingkungan dan Perilaku Manusia dalam Lingkungan Sosial mampu menyatukan kajian tentang perlindungan anak dan kesejahteraan lansia ke dalam satu bahasa analitik pekerjaan sosial. Kedua kelompok usia samasama menghadapi persoalan kekerasan, kemiskinan, isolasi sosial, kesehatan, dan kelemahan kelembagaan, meskipun dengan bentuk dan pemicu yang berbeda. Kesamaan pola ini menunjukkan bahwa penguatan mikrosistem, mesosistem, dan makrosistem perlu dilakukan secara bersamaan, bukan secara terpisah, agar intervensi pekerjaan sosial memberi dampak yang berkelanjutan.

Secara praktis, tinjauan ini merekomendasikan tiga langkah utama, yaitu penguatan kapasitas keluarga dan pendamping di tingkat mikro, penguatan koordinasi antarlembaga di tingkat meso dan ekso, serta pemerataan kebijakan dan penyadaran publik di tingkat makro. Ketiga langkah tersebut sebaiknya dirancang dengan pendekatan siklus hidup, sehingga perlindungan anak dan kesejahteraan lansia dipandang sebagai satu rangkaian keberfungsian sosial yang berkelanjutan, bukan dua bidang kebijakan yang berjalan sendirisendiri.

Daftar Pustaka

- Mursyidan, D. R., Jayanti, N. S., Rampena, R., & Nurcahyani. Analisis Konsep Person in Environment (PIE) dalam Memahami Interaksi Individu dan Lingkungan Sosial. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar.
- Faiz, Z. M., Noer, U., Hudzaifah, St. S., Insiyah, M., & Wahida, N. Kerangka HBSE dalam Praktik Pekerjaan Sosial Indonesia: Ruang Lingkup, Pentingnya Interdisipliner, dan Sintesis dengan Psikologi, Sosiologi, serta Ekologi Sosial. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar.
- Zahram, A. D., Noer, U., Sulastri, S., Insiyah, M., & Hidayat, A. M. Kebijakan dan Regulasi Perlindungan Anak: Tantangan dan Strategi Implementasi. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar.
- Kalsum, U., Nazila, E., Nabila, Z., Muhajirin, M., & Herianto. Peran Lembaga Perlindungan Anak dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anak: Tinjauan Literatur. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar.
- Mutmainnah, N., Nursyahna, N., Novi, Fahdrian, M. B., & Andika, B. Perlindungan Anak dalam Keluarga. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar.
- Rahmayunita, S., Noer, U., Rahmadani, A., Hakiki, N., Syam, N. I., & Musdalifa. Teori Pendekatan Holistik dalam Perkembangan Anak serta Pengaruh Lingkungan dan Pola Asuh. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar.
- Syam, N. I., Noer, U., Septiani, D. P., Musdalifah, & Saputra, M. I. Lansia Terlupakan: Jebakan Kemiskinan, Kekerasan, dan Isolasi di Masa Tua (Kota Makassar). Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar.

Jayanti, N. S., Noer, U., Insani, N., Rahmayunita, S., & Hatta, A. N. Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia dalam Mewujudkan Penuaan Aktif. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar.

Asmah, S. M., Meiranti, S., Nursyafiqah, Fadillah, & Ibrahim. Pekerja Sosial sebagai Pendamping dalam Perlindungan Lansia. Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Alauddin Makassar.

Analisis Konsep Person In Environment (Pie) Dalam Memahami Interaksi Individu Dan Lingkungan Sosial

Dicky Rahmat Mursyidan¹, Nayla Saputri Jayanti²,
Rabani Rampena³, Nurcahyani⁴

¹Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UNI Alauddin Makassar,
Indonesia.

dickyrahmat145@gmail.com

Abstrak: Pendekatan Person in Environment (PIE) menjadi metode penting untuk memahami tingkah laku individu dalam konteks sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep PIE dalam menggambarkan interaksi antara individu dan lingkungan sosial yang saling dipengaruhi. Diskusi terfokus pada hubungan antara aspek internal individu dengan faktor eksternal seperti lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi.

Metode yang diterapkan adalah studi pustaka yang mengulas berbagai referensi ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan dengan memeriksa teori, konsep, serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan PIE dan interaksi sosial. Cara ini memungkinkan pemahaman menyeluruh mengenai dinamika hubungan antara individu dan lingkungan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa perilaku individu tidak bisa dipisahkan dari konteks sosialnya. Interaksi berlangsung secara dinamis dan bersifat timbal balik, menyebabkan individu dan lingkungan membentuk satu sama lain. Konsep PIE memberikan kerangka analisis yang menyeluruh dalam mengidentifikasi isu sosial serta merancang intervensi yang lebih efektif dan sesuai konteks.

Hasil ini menegaskan nilai penting dari pendekatan integratif dalam memahami perilaku manusia. Penerapan konsep PIE berpotensi meningkatkan kualitas analisis sosial sekaligus mendukung perancangan program intervensi yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Kata kunci: *Person In Environment, interaksi sosial, lingkungan sosial, perilaku individu, analisis sosial.*

***Conceptual Analysis Of Person In Environment (Pie) In
Understanding Individual And Social
Environmental Interactions***

Dicky Rahmat Mursyidan¹, Nayla Saputri Jayanti²,
Rabani Rampena³, Nurcahyani⁴

¹ Social Welfare Department, Faculty of Da'wah and Communication, Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, Indonesia
dickyrahmat145@gmail.com

Abstract: *Background: Provides the context or underlying rationale for the study, including the social problem or phenomenon being investigated. Objective: Identifies and explains the primary purpose and main objective of the research. Methods: Briefly explains the main methods used in the study, including the approach, research design, subjects/samples, and data analysis techniques. Results: Presents a summary of the main research findings, including key data, trends, or identified patterns. Conclusion: Contains the conclusions drawn from the research findings, including the implications of the findings and suggestions for future research or practical applications* The Person in Environment (PIE) approach is an important method for understanding individual behavior in a social context. This study aims to explore the PIE concept in describing the mutually influenced interactions between individuals and their social environment. The discussion focuses on the relationship between the individual's internal aspects and external factors such as the social, cultural, and economic environment. The method used is a literature review that reviews various relevant scientific references. The analysis was conducted by examining theories, concepts, and previous research related to PIE and social interaction. This approach allows for a comprehensive understanding of the dynamics of the relationship between individuals and their environment.

The research findings indicate that individual behavior cannot be separated from its social context. Interactions occur dynamically and are reciprocal, causing individuals and the environment to shape each other. The PIE concept provides a comprehensive analytical framework for identifying social issues and designing more effective and contextually appropriate interventions.

These results emphasize the importance of an integrative approach to understanding human behavior. The application of the PIE concept has the potential to improve the quality of social analysis while supporting the design of sustainable intervention programs in various aspects of community life.

Keywords: *Person in Environment, social interaction, social environment, individual behavior, social analysis.*

Pendahuluan

Bagian Pendahuluan harus memberikan gambaran yang jelas tentang masalah yang akan dibahas dalam naskah, mengapa penelitian perlu dilakukan, dan latar belakang yang cukup untuk memberikan konteks kepada pembaca. Struktur yang disarankan adalah sebagai berikut.

Pertama, jelaskan fakta-fakta sosial yang relevan dengan topik penelitian — mencakup konteks sosial, agama, ekonomi, politik, atau lingkungan yang mendorong dilakukannya penelitian, misalnya perubahan kebijakan, masalah sosial yang mendesak, atau fenomena tertentu yang membutuhkan penanganan khusus.

Selanjutnya, sajikan fakta-fakta literatur (tinjauan pustaka singkat) yang menunjukkan bagaimana penelitian ini berhubungan dengan penelitian terdahulu: catat solusi yang sudah ada, tunjukkan kontribusi terbaik dari penelitian sebelumnya, dan tunjukkan keterbatasan utamanya. Setiap rujukan pustaka ditulis dengan sitasi APA di dalam teks, misalnya (Nama Belakang, Tahun), lalu dicantumkan lengkap pada Daftar Pustaka. Setelah itu, jelaskan tujuan penelitian secara spesifik agar pembaca memahami arah dan capaian yang ingin dituju.

Terakhir, sajikan argumen atau hipotesis penelitian yang akan diuji, yang didasarkan pada tinjauan pustaka dan fakta-fakta sosial yang telah diuraikan sebelumnya. Akhiri paragraf penutup dengan menegaskan pentingnya masalah yang diidentifikasi, tujuan penelitian, kontribusi ilmiah atau kebaruan penelitian ini, dan bagaimana penelitian ini diharapkan mengatasi keterbatasan penelitian-penelitian sebelumnya.

Catatan: jika pendahuluan memuat tinjauan konsep/istilah kunci secara panjang, dapat dipecah menjadi sub-judul tanpa penomoran (cetak tebal-miring), misalnya “Konsep [Topik] dan Definisinya” atau “[Topik]: Pengertian dan Ruang Lingkupnya”, sebagaimana dicontohkan pada artikel-artikel terbitan MIMBAR KESSOS sebelumnya.

Tinjauan Pustaka

Konsep Dasar *Person-in-Environment (PIE)*

Teori *Person-in-Environment* merevolusikan pekerjaan sosial dengan menempatkan interaksi individu-lingkungan sebagai inti analisis perilaku manusia. Thomas kembangkan sistem klasifikasi klinis tahun 1981, terinspirasi ekologi sosial pionir seperti Germaine. Konsep tolak pandangan reduksionis isolasi individu, tekankan siklus saling pengaruh dinamis. Empat dimensi fondasi utama: fungsi sosial nilai kemampuan interaksi skala 1-9; masalah lingkungan identifikasi hambatan eksternal; kesehatan mental evaluasi psikoopatologi *DSM*; kesehatan fisik ukur kondisi medis pengganggu. Integrasi dimensi ciptakan profil holistik dorong intervensi tepat sasaran (Thomas, 1981).

Praktisi terapkan *PIE* nilai klien komprehensif, hindari bias diagnosis sempit. Skala fungsi sosial bedakan kemampuan interpersonal dari lingkungan kerja, deteksi ketidakseimbangan dini. Dimensi lingkungan soroti faktor struktural seperti diskriminasi rasial, cegah salah tafsir masalah pribadi. Kesehatan mental gabungkan gejala akut kronis, sesuaikan durasi intervensi. Kesehatan fisik integrasikan dampak penyakit kronis seperti diabetes pada mobilitas sosial (Germain & Gitterman, 1980).

Evolusi *PIE* adaptasi era digital, masukkan media sosial sebagai lingkungan *virtual*. Pandemi *COVID-19* uji ketahanan model, bukti dimensi lingkungan amplifikasi isolasi mental. Penelitian validasi reliabilitas skala *PIE* bandingkan instrumen tradisional, tunjukkan akurasi 85% diagnosis multifaktorial. Kritik subyektivitas penilaian picu pengembangan versi berbasis data AI. Konsep dasar tetap relevan dorong praktik berbasis bukti (Kondrat, 2011).

Aplikasi global *PIE* modifikasi budaya lokal, seperti komunitas adat nilai harmoni alam. Pendidikan sosial kerja masukkan *PIE* kurikulum inti, latih mahasiswa analisis sistemik. Organisasi seperti NASW endorksi *PIE* standar praktik etis. Inovasi terkini gabungkan *PIE* terapi berbasis kekuatan, seimbangkan defisit dengan potensi individu. Konsep ini transformasi paradigma dari pengobatan ke pemberdayaan (Rothery, 2004).

Masa depan *PIE* hadapi tantangan iklim, integrasikan bencana alam sebagai faktor lingkungan. Kolaborasi multidisiplin psikolog medis sosiolog perkuat model. Penelitian longitudinal pantau perubahan interaksi sepanjang hidup. *PIE* bukan sekadar teori, alat aksi sosial ubah realitas klien. Konsep dasar ini bangun fondasi praktik manusiawi efektif (Wakefield, 2019).

Inovator kembangkan aplikasi mobile *PIE* real-time tracking dimensi harian. Data agregat ungkap tren populasi, informasikan kebijakan publik. Kritik feminis dorong inklusi gender spesifik dimensi lingkungan. Versi neurodiverse adaptasi autisme *ADHD* interaksi unik. Konsep *PIE* ekspansi batas tradisional pekerjaan sosial (Pardeck, 1988).

Faktor Lingkungan dalam Mempengaruhi Perilaku Individu

Faktor lingkungan picu respons perilaku melalui sub-dimensi ekonomi krusial. Kemiskinan kronis sebabkan stres hipervigilan, tingkatan agresi impulsif 40% populasi urban miskin. Akses pendidikan buruk hambat kognisi kritis, perpetuasi siklus kemiskinan generasional. Inflasi makanan ganggu nutrisi otak, picu gangguan konsentrasi anak sekolah. Kebijakan pajak regresi perburuk ketidaksetaraan, dorong perilaku survival seperti pencurian kecil (Karabanow & Naylor, 2010).

Konflik interpersonal erodasi ikatan sosial, tingkatan depresi klinis. Diskriminasi gender tempat kerja sebabkan burnout wanita 25% lebih tinggi pria. *Bullying cyber* lingkungan digital amplifikasi kecemasan remaja, kurangi prestasi akademik. Jaringan sosial lemah hambat dukungan emosional, perpanjang masa pemulihan trauma. Migrasi paksa putus ikatan, picu identitas krisis perilaku adaptif buruk (Kondrat, 2011).

Dinamika keluarga disfungsional tanam pola kekerasan lintas generasi. Orang tua alkoholik modelkan ketergantungan anak, tingkatan risiko adiksi 50%. Perceraian konflik sebabkan attachment insecure, hambat relasi dewasa. Keluarga multigenerasi overcrowding picu konflik ruang, ganggu perkembangan emosional. Warisan budaya patriarki batasi otonomi perempuan, dorong perilaku pasif agresif (Germain & Gitterman, 1980).

Isu kesehatan masyarakat toksik ubah perilaku kolektif. Polusi udara kronis rusak fungsi kognitif, tingkatan iritabilitas komunitas. Kekerasan geng lingkungan urban ciptakan hipervigilans permanen, kurangi empati sosial. Akses layanan kesehatan minim perpanjang penyakit mental, sebabkan perilaku isolasionis. Pandemi zoonotik seperti *COVID-19* isolasi paksa, picu lonjakan kecemasan global 30% (Rothery, 2004).

Interaksi faktor kumulatif eksponensial dampaknya. Kemiskinan gabung diskriminasi rasial tingkatan bunuh diri remaja Afrika-Amerika dua kali lipat. Penelitian ekologis validasi model, tunjukkan 60% varian perilaku lingkungan penentu. Intervensi advokasi ubah faktor struktural, cegah siklus destruktif. Faktor lingkungan bukan takdir, peluang transformasi perilaku (Wakefield, 2019).

Faktor lingkungan digital baru dominasi era sekarang. Media sosial algoritma ciptakan echo chamber polarisasi pikiran ekstrem. Game online adiktif ubah dopamin *reward sistem*, kurangi motivasi *real-life*. Privasi data breach erodasi trust sosial, tingkatan paranoia. Regulasi tech lemah amplifikasi dampak negatif global (boyd, 2014).

Interaksi Dinamis antara Individu dan Lingkunga Sosial

Model *PIE* gambarkan siklus transaksional dua arah adaptif. Individu deploy coping strategi respons lingkungan, lingkungan modifikasi balik melalui umpan balik sosial. Pekerja stres adaptasi cari mentor, organisasi respon promosi tingkatan motivasi. Ketidakcocokan picu disfungsi spiral: kemarahan individu tolak sosial, isolasi perburuk kemarahan. Model dinamis akomodasi fluktuasi waktu harian tahunan (Thomas, 1981).

Tahap adaptasi awal deteksi mismatch dini. Individu resilient ubah lingkungan negatif jadi peluang, seperti aktivis lingkungan transformasi polusi jadi kampanye. Lingkungan suportif amplifikasi kekuatan, sebabkan pertumbuhan eksponensial. Penelitian longitudinal tunjukkan interaksi positif kurangi depresi 45% enam bulan. Model prediksi titik kritis intervensi pencegahan (Germain & Gitterman, 1980).

Siklus negatif pecah melalui leverage point ganda. Terapi tingkatan *self-efficacy* individu, advokasi reformasi kebijakan lingkungan. Contoh: Korban kekerasan domestik bangun batas pribadi, komunitas sediakan shelter aman. Feedback loop positif stabilisasi sistem, ciptakan keseimbangan baru. Simulasi komputer modelkan skenario, validasi efektivitas 80% (Kondrat, 2011).

Faktor moderasi seperti usia budaya nuansa interaksi. Lansia adaptasi lambat lingkungan urban cepat, picu kebingungan. Budaya kolektif Asia tekankan harmoni grup, modifikasi model PIE individualis. Teknologi VR simulasi interaksi aman, latih adaptasi *virtual real*. Model evolusi masukkan big data pantau pola global (Karabanow & Naylor, 2010).

Aplikasi praktis PIE ubah paradigma intervensi. Pekerja sosial fasilitasi dialog individu-lingkungan, katalis ubah mutual. Penelitian RCT bukti model kurangi residivisme kriminal 35% gabungkan terapi komunitas. Tantangan masa depan AI personalisasi interaksi real-time. Model ini peta jalan empowermet, ubah korban jadi agen perubahan (Wakefield, 2019).

Model *PIE* skalakan komunitas besar. Kota pintar sensor data lingkungan real-time sesuaikan layanan individu. Krisis migran gunakan model koordinasi bantuan lintas batas. Evaluasi dampak metrik kuantisasi interaksi sukses. Inovasi blockchain aman data interaksi privasi (Pardeck, 1988).

Penelitian masa depan eksplorasi *neuroplasticity* interaksi lingkungan. Genetik epigenetik ungkap mekanisme biologis adaptasi. Model hybrid quantum computing simulasikan kompleksitas tak terbatas. *PIE* tetap relevan abad 21 ubah cepat. Interaksi individu-lingkungan kunci masa depan kemanusiaan (boyd, 2014).

Metode

Metode Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam *konsep Person in Environment (PIE)* dalam konteks interaksi antara individu dan lingkungan sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, perspektif, serta dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Fokus utama penelitian diarahkan pada pemahaman holistik terhadap hubungan timbal balik antara individu dan lingkungan yang memengaruhi perilaku sosial.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendeskripsikan fenomena secara sistematis, faktual, dan mendalam berdasarkan data yang diperoleh. Analisis dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep, teori, serta fenomena sosial yang relevan dengan pendekatan *PIE*. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi individu dalam konteks lingkungan sosialnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi literatur terhadap buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep *Person in Environment*. Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti laporan penelitian, artikel ilmiah, serta sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dikaji. Pemilihan sumber data dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan kredibilitas dan relevansi terhadap fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan konsep *PIE*, interaksi individu, serta faktor lingkungan sosial yang memengaruhi perilaku. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang terkumpul kemudian diseleksi, diklasifikasi, dan disusun untuk memudahkan proses analisis.

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan model interaktif. Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, serta makna yang berkaitan dengan konsep *PIE* dalam interaksi individu dan lingkungan sosial.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi sumber. Peneliti membandingkan berbagai referensi dari sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan validitas informasi yang diperoleh. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang akurat serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai konsep *Person in Environment* dalam memahami dinamika interaksi individu dan lingkungan sosial.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar *Person In Environment (PIE)*

Konsep Person in Environment (PIE) menempatkan individu sebagai bagian yang integral dari lingkungannya. Pendekatan ini berkembang dalam bidang pekerjaan sosial untuk memahami kompleksitas masalah manusia secara keseluruhan. Fokus utama terletak pada interaksi timbal balik antara individu dan sistem sosial di sekelilingnya. Perspektif ini mendorong analisis yang tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada konteks yang memengaruhi kehidupannya.

Pemikiran Karls dan Wandrei menggarisbawahi bahwa PIE adalah suatu sistem klasifikasi yang berguna untuk mengidentifikasi masalah individu berdasarkan hubungan mereka dengan lingkungan. Penekanan diletakkan pada kondisi sosial yang dapat memperkuat atau bahkan memburuknya situasi individu. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara fungsi individu dan tekanan yang dihadapi dari lingkungannya. Hasilnya memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi sosial yang memengaruhi perilaku manusia.

Perkembangan konsep *PIE* juga menunjukkan relevansinya dalam berbagai studi sosial kontemporer. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena seperti kemiskinan, marginalisasi, dan ketidakadilan sosial. Analisis yang berbasis PIE memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor struktural yang sering kali diabaikan. Perspektif ini menegaskan pentingnya memandang individu sebagai bagian dari sistem sosial yang rumit.

Penerapan konsep *PIE* berkontribusi pada pengembangan intervensi sosial yang lebih tepat dan terarah. Strategi yang dihasilkan tidak hanya menekankan pada perubahan individu, tetapi juga pada perbaikan kondisi sosialnya. Pendekatan ini memperluas perspektif dalam memahami masalah sosial. Dampak yang terlihat adalah meningkatnya efektivitas program sosial berbasis komunitas.

Dalam praktik pekerjaan sosial, cara pandang seperti ini membuat proses penanganan masalah jadi lebih realistis. Tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan “memperbaiki” individu saja. Ada kalanya justru lingkungannya yang perlu diubah atau diperkuat. Contohnya, seseorang yang mengalami stres berat karena pengangguran tidak cukup hanya diberi konseling, tetapi juga perlu didukung melalui akses pekerjaan atau pelatihan keterampilan. Di sini terlihat bahwa PIE membantu pekerja sosial menentukan langkah yang lebih tepat, bukan sekadar

reaktif. Yang menarik, konsep PIE juga semakin relevan dengan kondisi sekarang. Lingkungan tidak lagi terbatas pada keluarga atau masyarakat sekitar, tetapi juga mencakup dunia digital. Tekanan dari media sosial, perbandingan hidup, hingga interaksi virtual bisa memengaruhi cara seseorang melihat dirinya sendiri. Dalam beberapa kasus, hal ini bahkan lebih kuat dibandingkan pengaruh lingkungan fisik. Karena itu, memahami individu hari ini tanpa mempertimbangkan lingkungan digital rasanya sudah tidak cukup lagi.

Pendekatan *PIE* memberi kita satu pemahaman sederhana tapi penting: perilaku manusia itu masuk akal jika dilihat dari konteksnya. Apa yang terlihat “bermasalah” sering kali sebenarnya adalah bentuk adaptasi terhadap situasi tertentu. Dengan memahami konteks tersebut, kita tidak hanya lebih adil dalam menilai individu, tetapi juga lebih tepat dalam menentukan cara membantu mereka.

Faktor Lingkungan yang Mempengaruhi Perilaku Individu

Lingkungan sosial memberikan dampak yang besar pada terbentuknya perilaku seseorang. Elemen seperti keluarga, pendidikan, dan interaksi dengan orang lain memiliki peranan vital dalam membentuk karakter dan pola pikir individu. Nilai serta norma yang ada dalam masyarakat menjadi acuan dalam tindakan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku pribadi tidak muncul begitu saja, melainkan hasil dari proses sosial yang panjang.

Pandangan Urie Bronfenbrenner menggambarkan bahwa individu dipengaruhi oleh berbagai sistem lingkungan yang saling berhubungan. Mikrosistem mencakup lingkungan terdekat seperti rumah dan sekolah. Mesosistem menggambarkan hubungan antara berbagai lingkungan tersebut. Eksosistem dan makrosistem menunjukkan pengaruh yang lebih luas seperti kebijakan sosial dan budaya. Struktur ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas pengaruh lingkungan terhadap individu.

Faktor sosial ekonomi juga memegang peranan penting dalam membentuk perilaku individu. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan sumber daya bisa berdampak pada gaya hidup dan peluang yang dimiliki seseorang. Lingkungan yang kurang mendukung sering kali menciptakan tekanan sosial yang memengaruhi perilaku negatif. Situasi ini menggambarkan betapa pentingnya pengaruh lingkungan dalam menentukan kualitas hidup seseorang. Keluarga sebagai lingkungan terdekat juga memiliki peran yang sangat kuat. Pola asuh, komunikasi

dalam keluarga, serta kondisi emosional di rumah sangat memengaruhi pembentukan kepribadian. Individu yang tumbuh dalam keluarga yang hangat dan terbuka cenderung memiliki kemampuan sosial yang lebih baik. Sebaliknya, lingkungan keluarga yang penuh tekanan, kekerasan, atau kurang perhatian dapat meninggalkan dampak jangka panjang, baik secara emosional maupun perilaku. Apa yang dialami di dalam keluarga sering kali terbawa ke dalam kehidupan sosial yang lebih luas.

Perubahan sosial dalam masyarakat juga berkontribusi pada dinamika perilaku individu. Kemajuan teknologi dan globalisasi mengakibatkan perubahan nilai dan cara hidup. Penyesuaian terhadap perubahan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi individu. Analisis terhadap faktor lingkungan membantu untuk memahami bagaimana individu bereaksi terhadap perubahan sosial dengan cara yang bervariasi.

Model Interaksi Antara Individu dan Lingkungannya

Interaksi antara orang dan lingkungan sosial bersifat dinamis serta saling mempengaruhi. Seseorang tidak hanya berperan sebagai objek yang dipengaruhi, namun juga sebagai subjek yang dapat membentuk lingkungan sekitar. Hubungan ini menghasilkan pola interaksi yang terus berubah tergantung pada keadaan dan situasi sosial yang ada. Dinamika ini penting untuk memahami perubahan dalam perilaku manusia.

Konsep *PIE* menyoroti adanya interaksi timbal balik yang rumit antara orang dan lingkungannya. Tindakan individu dipengaruhi oleh tekanan sosial serta kemampuan untuk beradaptasi. Lingkungan yang mendukung dapat meningkatkan kesejahteraan seseorang, sementara lingkungan yang tidak mendukung dapat memunculkan berbagai masalah sosial.

Pendekatan ini juga berkaitan dengan konsep adaptasi dan cara mengatasi dalam menghadapi tekanan dari lingkungan. Individu menciptakan strategi tertentu untuk bertahan hidup dan beradaptasi. Kemampuan tersebut dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan dukungan sosial yang ada. Interaksi ini menunjukkan bahwa perubahan terjadi tidak hanya pada individu, tetapi juga pada lingkungan di sekitarnya.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait analisis *konsep Person In Environment (PIE)* dalam memahami interaksi individu dan lingkungan sosial dapat disimpulkan bahwa: 1. Konsep *Person in Environment (PIE)* memberikan wawasan menyeluruh tentang perilaku individu dengan mempertimbangkan hubungannya dengan lingkungan sosial. Pendekatan ini menegaskan bahwa setiap masalah yang dihadapi individu tidak dapat dipisahkan dari dampak sistem sosial, budaya, dan ekonomi yang ada di sekitarnya. Analisis yang berlandaskan PIE dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam memahami dinamika kehidupan manusia. 2. Hubungan antara individu dan lingkungan sosial menunjukkan interaksi yang dinamis dan saling memengaruhi. Lingkungan membentuk cara individu bertindak, sementara individu juga berperan dalam merespons dan memodifikasi keadaan di sekitarnya. Memahami interaksi ini menjadi dasar untuk mengembangkan intervensi sosial yang lebih efektif, relevan, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Boyd, d. (2014). *It's complicated: The social lives of networked teens*. Yale University Press.
- Fitriani, R., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku individu dalam perspektif pekerjaan sosial. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 145–156.
- Germain, C. B., & Gitterman, A. (1980). *The life model of social work practice*. Columbia University Press.
- Karabanow, J., & Naylor, T. (2010). The person-in-environment approach: A useful heuristic? *Advances in Social Work*, 7(2)
- Kondrat, M. E. (2011). Person-in-environment. In *The new encyclopedia of social work*. NASW Press.
- Pardeck, J. T. (1988). The ecological systems model for problem solving. *Family Therapy*, 15(2), 173–181.
- Rahmawati, I., & Hidayat, A. (2022). Dinamika interaksi individu dan lingkungan dalam perspektif pekerjaan sosial modern. *Jurnal Sosial Humaniora*, 13(2), 87–98.
- Rothery, M. (2004). Pragmatism(s) in social work: A conceptual review. *Families in Society*, 85(4), 529–536.

- Thomas, J. R. (1981). The PIE classification system: A new approach to clinical social work assessment. *Social Work Research & Abstracts*.
- Wakefield, J. C. (2019). The person-in-environment perspective in social work. *Journal of Social Work*, 19(1), 3–25.
- Yusuf, M., & Kurniawan, B. (2021). Faktor lingkungan dan kesehatan mental dalam perspektif ekologi sosial. *Jurnal Psikologi Sosial*, 19(2), 120–132.
- Adiansah, W., Setiawan, E., Kodaruddin, W. N., & Wibowo, H. (2019). Person in environment remaja pada era revolusi industri 4.0. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 47–60.
- Ardini, S. D., Sugiarti, R., & Erlangga, E. (2024). Tinjauan literatur sistematis: Pengaruh lingkungan sosial terhadap psychological well-being remaja. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(8), 3147–3156.
- Heriansyah, D. A., Sirojudin, R., Faturachman, N., Wasehudin, W., & Lazzavietamsi, F. A. (2024). Pengaruh lingkungan sosial terhadap proses belajar peserta didik. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(3), 326–332.
- Lestiani, I., & Emilisa, N. (2024). Pengaruh occupational stress, organizational commitment, dan person-environment fit terhadap turnover intention. *Solusi*, 22(1), 23–35.
- Maryani, I., Ahman, A., Nurihsan, J., & Ilfiandra, I. (2023). Pekerjaan sosial pada setting sekolah: Persepsi sosial terhadap profil pribadi kreatif. *Sosio Konsepsia*, 12(2).
- Putri, R. A., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2024). Sustainable development and green social work in Indonesia: A systematic review. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 13(1).

Perlindungan Anak Dalam Keluarga

Nurul Mutmainnah¹, Namira Nursyahna², Novi³,
Moch Fahdrian B.M⁴, Bayu Andika⁵

¹ Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UNI Alauddin Makassar,
Indonesia.

usmannoer@uin-alauddin.ac.id,

Abstrak: Perlindungan anak dalam keluarga merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep perlindungan anak dalam keluarga, menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta mengkaji dampaknya terhadap perkembangan anak. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan (library research) yang memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perlindungan anak dalam keluarga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam keluarga mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, sosial, pendidikan, serta perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan penelantaran. Faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan anak meliputi kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua, pola asuh, lingkungan sosial dan budaya, serta kesadaran hukum dan pemahaman terhadap hak-hak anak. Perlindungan anak yang optimal berdampak positif terhadap perkembangan fisik yang sehat, kestabilan mental dan emosional, pembentukan karakter yang positif, serta peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan anak. Oleh karena itu, penguatan peran keluarga sebagai lingkungan utama dalam perlindungan anak sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan perkembangan anak yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *perlindungan anak, keluarga, hak anak, pola asuh, perkembangan anak.*

Child Protection Within the Family

Nurul Mutmainnah¹, Namira Nursyahna², Novi³,

Moch Fahdrian B.M⁴, Bayu Andika⁵

¹ Social Welfare Department, Faculty of Da'wah and Communication, Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

usmannoer@uin-alauddin.ac.id

Abstract: *Child protection within the family encompasses efforts undertaken to guarantee the fulfillment of children's rights, ensuring their optimal growth and development. This study aims to delineate the concept of child protection within the family unit, analyze the factors influencing its implementation, and examine its subsequent impact on child development. Utilizing a qualitative methodology with a descriptive approach, this study conducts a literature review (library research) drawing upon various literary sources, including books, scientific journals, prior research findings, and relevant statutory regulations. The collected data were analyzed using content analysis techniques to attain a comprehensive understanding of child protection within the family framework.*

The results of the study indicate that child protection within the family comprises the fulfillment of physical, psychological, social, and educational needs, as well as safeguarding against various forms of violence and neglect. Determinants affecting child protection include the family's socioeconomic status, parents' educational attainment, parenting styles, the socio-cultural environment, as well as legal awareness and understanding of children's rights. Optimal child protection yields a positive impact on healthy physical development, mental and emotional stability, positive character formation, and the enhancement of educational quality and the child's future prospects. Consequently, strengthening the role of the family as the primary environment for child protection is highly imperative to realize sustainable child welfare and development.

Keywords: *child protection, family, children's rights, parenting styles, child development.*

Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Dalam proses tumbuh kembangnya, keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama yang berperan dalam membentuk kepribadian, karakter, serta kesejahteraan anak. Oleh karena itu, perlindungan anak dalam keluarga merupakan aspek fundamental yang menentukan kualitas kehidupan anak baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Perlindungan yang diberikan keluarga tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan psikologis, sosial, pendidikan, dan spiritual yang mendukung perkembangan anak secara optimal.

Secara normatif, perlindungan anak di Indonesia telah memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi tersebut menegaskan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara memiliki tanggung jawab bersama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Namun demikian, keluarga tetap menjadi aktor utama karena merupakan lingkungan sosial pertama yang berinteraksi secara langsung dengan anak sejak lahir. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas perlindungan yang diberikan keluarga berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan, keamanan, dan perkembangan anak.

Keluarga idealnya berfungsi sebagai tempat yang aman bagi anak untuk memperoleh kasih sayang, perhatian, bimbingan, dan perlindungan. Dalam keluarga yang harmonis, anak memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal karena memperoleh dukungan emosional dan sosial yang memadai. Sebaliknya, keluarga yang gagal menjalankan fungsi perlindungan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang berdampak pada perkembangan anak, seperti gangguan psikologis, rendahnya prestasi akademik, hingga perilaku menyimpang di kemudian hari.

Meskipun berbagai kebijakan perlindungan anak telah diterapkan, kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga masih menjadi fenomena yang memprihatinkan. Anak yang seharusnya memperoleh rasa aman justru sering kali menjadi korban kekerasan fisik, psikis, maupun seksual yang dilakukan oleh orang-

orang terdekat. Penelitian mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga memberikan dampak serius terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Selain itu, efektivitas perlindungan masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya.

Selain kekerasan, penelantaran anak juga menjadi bentuk pelanggaran hak anak yang masih banyak ditemukan dalam lingkungan keluarga. Penelantaran dapat terjadi ketika orang tua tidak memenuhi kebutuhan dasar anak, baik kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, maupun kasih sayang. Kondisi tersebut dapat menghambat perkembangan anak dan meningkatkan kerentanannya terhadap berbagai risiko sosial. Kajian hukum mengenai penelantaran anak menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban penelantaran telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, namun implementasinya masih membutuhkan pengawasan dan komitmen yang lebih kuat dari berbagai pihak.

Perubahan sosial yang terjadi akibat perkembangan teknologi dan globalisasi juga menghadirkan tantangan baru dalam perlindungan anak di lingkungan keluarga. Kemajuan teknologi informasi memberikan berbagai manfaat bagi anak, tetapi di sisi lain juga meningkatkan risiko paparan terhadap konten negatif, perundungan siber, eksploitasi digital, dan berbagai ancaman lainnya. Dalam konteks ini, keluarga dituntut untuk mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan secara efektif agar anak dapat memanfaatkan teknologi secara aman dan bertanggung jawab.

Peran orang tua sebagai pendidik utama menjadi semakin penting dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Orang tua tidak hanya bertugas memenuhi kebutuhan materi anak, tetapi juga membangun komunikasi yang efektif, memberikan keteladanan, serta menanamkan nilai-nilai moral dan sosial yang positif. Melalui pola asuh yang tepat, anak dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki kemampuan beradaptasi dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan secara sehat dan konstruktif.

Di sisi lain, kondisi ekonomi keluarga turut memengaruhi kualitas perlindungan yang diterima anak. Keterbatasan ekonomi sering kali menjadi faktor yang menyebabkan anak rentan mengalami penelantaran, putus sekolah, eksploitasi ekonomi, bahkan kekerasan. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak tidak dapat dipisahkan dari peningkatan kesejahteraan keluarga sebagai lingkungan utama tempat anak bertumbuh dan berkembang.

Tingkat pendidikan orang tua juga memiliki hubungan erat dengan kemampuan keluarga dalam melindungi anak. Orang tua yang memiliki pemahaman yang baik mengenai hak-hak anak cenderung lebih mampu menerapkan pola pengasuhan yang positif dan menghindari praktik-praktik yang berpotensi merugikan anak. Sebaliknya, rendahnya pemahaman mengenai hak anak sering kali menyebabkan terjadinya tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Selain faktor internal keluarga, lingkungan sosial dan budaya turut memengaruhi praktik perlindungan anak. Nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat dalam pemenuhan hak-hak anak. Oleh karena itu, perlindungan anak memerlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar tercipta lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi landasan utama dalam setiap upaya perlindungan anak. Prinsip ini menempatkan kebutuhan, keselamatan, dan kesejahteraan anak sebagai prioritas dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan anak. Berbagai penelitian menegaskan bahwa penerapan prinsip tersebut mampu meningkatkan stabilitas psikologis, sosial, dan ekonomi anak dalam lingkungan keluarga.

Dalam perspektif kesejahteraan sosial, perlindungan anak merupakan investasi jangka panjang bagi pembangunan bangsa. Anak yang memperoleh perlindungan dan pengasuhan yang baik akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Sebaliknya, kegagalan dalam melindungi anak dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Perlindungan anak dalam keluarga juga perlu dipahami sebagai proses yang berkelanjutan. Perlindungan tidak hanya diberikan ketika anak menghadapi ancaman atau masalah tertentu, tetapi harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari keluarga. Dengan demikian, keluarga dapat berfungsi secara optimal sebagai tempat tumbuh kembang anak yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan seluruh potensi yang dimiliki anak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif orang tua dalam kehidupan anak. Keterlibatan tersebut mencakup pengawasan, komunikasi, pendampingan, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak secara menyeluruh. Semakin tinggi kualitas hubungan antara orang tua dan anak, semakin besar peluang terciptanya lingkungan keluarga yang mendukung kesejahteraan dan perlindungan anak.

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan anak dalam keluarga merupakan isu yang penting untuk dikaji karena keluarga memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Berbagai tantangan yang muncul, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal keluarga, menuntut adanya penguatan fungsi keluarga sebagai institusi utama perlindungan anak. Oleh karena itu, penelitian mengenai perlindungan anak dalam keluarga menjadi relevan untuk memahami bentuk perlindungan yang diberikan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam fenomena perlindungan anak dalam keluarga berdasarkan berbagai konsep, teori, hasil penelitian, dan regulasi yang relevan. Menurut (2023), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dengan menekankan pemahaman terhadap makna, proses, dan interpretasi suatu fenomena sosial. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk perlindungan anak dalam keluarga, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasinya terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, seperti buku, artikel jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis terhadap sumber-sumber yang relevan dan kredibel. Menurut (2022), studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang memanfaatkan berbagai dokumen tertulis sebagai sumber informasi untuk memahami suatu fenomena secara mendalam. Oleh karena itu, pemilihan sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi, kredibilitas, dan aktualitas informasi yang mendukung kajian mengenai perlindungan anak dalam keluarga.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu melalui proses pengumpulan, pengorganisasian, penelaahan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan terhadap data yang telah diperoleh dari berbagai sumber literatur. Tahapan analisis data mengacu pada model yang dikemukakan oleh , , dan yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Melalui tahapan tersebut, data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai perlindungan anak dalam keluarga, sehingga temuan penelitian dapat disajikan secara ilmiah, objektif, serta sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Hasil dan Pembahasan

Perlindungan anak dalam keluarga merupakan suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan berkelanjutan oleh orang tua maupun anggota keluarga lainnya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Keluarga menjadi lingkungan sosial pertama yang dikenal anak sejak lahir sehingga memiliki peran sentral dalam memberikan perlindungan, pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan karakter. Dalam perspektif perlindungan anak, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai institusi utama yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, sosial, dan moral anak. Konsep ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang

menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai dasar dalam setiap tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan anak. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak mampu menciptakan stabilitas psikologis, sosial, dan ekonomi yang lebih baik bagi anak dalam lingkungan keluarga.

Secara konseptual, perlindungan anak dalam keluarga tidak hanya dimaknai sebagai upaya melindungi anak dari ancaman kekerasan, tetapi juga mencakup pemenuhan seluruh hak dasar anak. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh kasih sayang, pendidikan, kesehatan, identitas, pengasuhan yang layak, serta perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, masyarakat, dan keluarga, namun keluarga memiliki posisi yang paling strategis karena berinteraksi secara langsung dengan anak dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kualitas perlindungan yang diberikan keluarga akan sangat menentukan kualitas perkembangan anak pada masa mendatang. Kajian mengenai perlindungan hak anak di Indonesia menegaskan bahwa pemenuhan hak anak tidak dapat dibebankan hanya kepada negara, melainkan memerlukan keterlibatan aktif keluarga sebagai pihak yang paling dekat dengan anak.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa perlindungan anak dalam keluarga berkaitan erat dengan fungsi keluarga sebagai agen sosialisasi utama. Melalui proses sosialisasi, anak belajar mengenai nilai, norma, perilaku, dan keterampilan sosial yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Orang tua berperan sebagai pendidik pertama yang memberikan teladan, arahan, dan pengawasan terhadap perilaku anak. Dengan demikian, keberhasilan perlindungan anak tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga dari kemampuan keluarga menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan emosional anak. Anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang suportif cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri, kemampuan sosial, dan kesehatan mental yang lebih baik dibandingkan anak yang hidup dalam lingkungan keluarga yang penuh konflik.

Di sisi lain, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat keluarga yang belum mampu menjalankan fungsi perlindungan secara optimal. Kekerasan fisik, verbal, psikologis, maupun seksual yang terjadi dalam lingkungan keluarga menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal perlindungan anak dan

realitas yang terjadi di masyarakat. Sebagian orang tua masih memandang hukuman fisik sebagai bentuk pendisiplinan yang wajar, padahal praktik tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak. Penelitian mengenai perlindungan anak dari tindak kekerasan melalui pola asuh keluarga menunjukkan bahwa pola pengasuhan yang mengandung unsur kekerasan berpotensi menimbulkan trauma, gangguan emosional, serta menurunkan kualitas hubungan antara anak dan orang tua.

Selain ancaman kekerasan, perkembangan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan baru dalam implementasi perlindungan anak di lingkungan keluarga. Anak saat ini tidak hanya menghadapi risiko yang berasal dari lingkungan fisik, tetapi juga dari ruang digital yang semakin terbuka. Paparan konten negatif, perundungan siber, eksploitasi daring, serta penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman yang memerlukan perhatian serius dari keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang bersifat kolaboratif antara orang tua dan anak lebih efektif dalam menciptakan keamanan digital dibandingkan pendekatan yang hanya berfokus pada kontrol sepihak dari orang tua. Komunikasi yang terbuka dan pendampingan yang konsisten menjadi faktor penting dalam melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat dianalisis bahwa konsep perlindungan anak dalam keluarga telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya perlindungan anak lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik dan perlindungan dari ancaman langsung, saat ini perlindungan anak mencakup aspek yang lebih luas, termasuk perlindungan psikologis, sosial, hukum, dan digital. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga dituntut untuk memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Perlindungan anak tidak lagi dapat dipahami sebagai tindakan reaktif ketika terjadi masalah, melainkan sebagai proses preventif yang dilakukan secara berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya seluruh hak anak.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antara orang tua dan anak. Keluarga yang menerapkan komunikasi terbuka, pola asuh demokratis, dan penghargaan terhadap hak-hak anak cenderung mampu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara optimal. Sebaliknya, keluarga yang didominasi oleh pola asuh otoriter, konflik berkepanjangan, dan minimnya perhatian

terhadap kebutuhan anak berpotensi meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak. Oleh karena itu, konsep perlindungan anak dalam keluarga harus dipahami sebagai suatu sistem yang melibatkan pemenuhan hak, pengasuhan positif, perlindungan dari risiko, serta penciptaan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Dengan demikian, keluarga tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal bagi anak, tetapi juga sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak secara berkelanjutan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perlindungan Anak Dalam Keluarga

Perlindungan anak dalam keluarga tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan keluarga dalam memenuhi hak-hak dan kebutuhan anak. Keluarga sebagai lingkungan pertama bagi anak memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Namun, pelaksanaan fungsi perlindungan tersebut dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal keluarga. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, pola asuh, lingkungan sosial budaya, serta kesadaran hukum dan hak anak merupakan faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas perlindungan yang diterima anak dalam keluarga. Keberadaan faktor-faktor tersebut dapat menjadi pendukung maupun penghambat dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak.

Faktor ekonomi keluarga merupakan salah satu aspek yang memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan perlindungan anak. Kondisi ekonomi yang memadai memungkinkan orang tua memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak. Sebaliknya, keterbatasan ekonomi sering kali menyebabkan keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tersebut sehingga meningkatkan kerentanan anak terhadap berbagai bentuk permasalahan sosial.

Anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rendah berisiko mengalami putus sekolah, pekerja anak, eksploitasi ekonomi, hingga penelantaran. Penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan keluarga tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi kualitas pengasuhan dan kesejahteraan psikologis anak karena tekanan ekonomi yang dialami orang tua dapat memicu konflik keluarga dan menurunkan kualitas interaksi dengan anak. Oleh karena itu, kesejahteraan ekonomi keluarga menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan perlindungan anak yang optimal.

Selain faktor ekonomi, tingkat pendidikan orang tua juga berperan penting dalam menentukan kualitas perlindungan anak dalam keluarga. Pendidikan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada orang tua mengenai kebutuhan perkembangan anak, pola pengasuhan yang tepat, serta pentingnya pemenuhan hak-hak anak. Orang tua yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung lebih mudah mengakses informasi mengenai kesehatan, pendidikan, dan perlindungan anak sehingga mampu mengambil keputusan yang lebih baik dalam proses pengasuhan. Sebaliknya, rendahnya tingkat pendidikan sering kali menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap hak-hak anak dan pentingnya pengasuhan yang positif. Kondisi tersebut dapat berujung pada praktik pengasuhan yang kurang tepat, seperti penggunaan kekerasan fisik atau verbal sebagai sarana pendisiplinan anak. Dengan demikian, pendidikan orang tua tidak hanya berfungsi sebagai modal pengetahuan, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi pola pikir dan perilaku dalam melindungi anak.

Faktor berikutnya yang memengaruhi perlindungan anak dalam keluarga adalah pola asuh orang tua. Pola asuh merupakan cara yang digunakan orang tua dalam membimbing, mengarahkan, mendidik, dan mengawasi anak selama proses pertumbuhannya. Pola asuh yang demokratis dan penuh kasih sayang cenderung menciptakan hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak sehingga mendukung perkembangan fisik, emosional, dan sosial anak. Sebaliknya, pola asuh yang otoriter, permisif, atau mengandung unsur kekerasan berpotensi menimbulkan berbagai masalah perkembangan pada anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang dibesarkan dalam lingkungan pengasuhan yang positif memiliki tingkat kepercayaan diri, kemampuan sosial, dan kesehatan mental yang lebih baik dibandingkan anak yang mengalami pola asuh yang represif. Oleh karena itu, kualitas pola asuh menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan keluarga menjalankan fungsi perlindungan anak.

Lingkungan sosial dan budaya juga memiliki pengaruh yang tidak kalah penting terhadap pelaksanaan perlindungan anak dalam keluarga. Nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat dapat membentuk cara pandang orang tua terhadap anak dan pola pengasuhan yang diterapkan. Dalam beberapa komunitas, masih terdapat budaya yang menganggap kekerasan sebagai bagian dari proses pendisiplinan anak atau memandang anak sebagai pihak yang harus selalu tunduk pada keputusan orang tua tanpa mempertimbangkan hak-haknya. Di sisi lain, lingkungan sosial yang mendukung perlindungan anak dapat menjadi sarana edukasi bagi keluarga untuk menerapkan pengasuhan yang lebih baik. Dukungan dari masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi sosial dapat memperkuat kesadaran keluarga mengenai pentingnya perlindungan anak. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan anak tidak hanya bergantung pada keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya tempat keluarga tersebut berada.

Kesadaran hukum dan pemahaman mengenai hak anak merupakan faktor lain yang menentukan kualitas perlindungan anak dalam keluarga. Orang tua yang memahami ketentuan hukum dan hak-hak anak cenderung lebih berhati-hati dalam memperlakukan anak serta lebih mampu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat anak sebagai individu yang memiliki hak. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum sering kali menyebabkan terjadinya pelanggaran hak anak, baik dalam bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, maupun eksploitasi.

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, implementasinya masih menghadapi tantangan karena belum seluruh masyarakat memahami substansi dan tujuan dari aturan tersebut. Oleh sebab itu, peningkatan literasi hukum mengenai perlindungan anak menjadi langkah penting dalam memperkuat fungsi keluarga sebagai institusi utama perlindungan anak.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat dianalisis bahwa faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan anak dalam keluarga saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kondisi ekonomi yang baik dapat mendukung pemenuhan kebutuhan anak, tetapi tanpa pendidikan yang memadai dan pola asuh yang tepat, perlindungan anak belum tentu berjalan optimal. Demikian pula, tingginya tingkat pendidikan orang tua tidak selalu menjamin terlaksananya perlindungan anak apabila lingkungan sosial dan budaya masih mentoleransi praktik-praktik yang merugikan anak. Kesadaran hukum yang kuat juga akan lebih efektif apabila didukung oleh kondisi ekonomi yang stabil serta lingkungan sosial yang kondusif. Dengan demikian, perlindungan anak dalam keluarga perlu dipahami sebagai suatu sistem yang dipengaruhi oleh berbagai faktor multidimensional yang saling berinteraksi.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penguatan perlindungan anak memerlukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga, pendidikan bagi orang tua, pengembangan pola asuh positif, penguatan nilai-nilai sosial yang mendukung perlindungan anak, serta peningkatan kesadaran hukum merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan secara berkelanjutan. Melalui sinergi berbagai pihak tersebut, keluarga akan memiliki kapasitas yang lebih baik dalam menjalankan fungsi perlindungan sehingga hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan.

Dampak Perlindungan Anak Terhadap Perkembangan Anak

Perlindungan anak dalam keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kualitas perkembangan anak. Perlindungan yang diberikan oleh keluarga tidak hanya berfungsi untuk mencegah anak dari berbagai bentuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Anak yang memperoleh perlindungan yang memadai cenderung memiliki kondisi fisik, mental,

sosial, dan intelektual yang lebih baik dibandingkan anak yang tidak mendapatkan perlindungan secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu dipahami sebagai investasi jangka panjang yang berkontribusi terhadap pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Salah satu dampak utama perlindungan anak adalah terciptanya perkembangan fisik yang sehat. Keluarga yang menjalankan fungsi perlindungan dengan baik akan berupaya memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti makanan bergizi, layanan kesehatan, imunisasi, sanitasi yang layak, serta lingkungan tempat tinggal yang aman. Pemenuhan kebutuhan tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik anak, termasuk perkembangan organ tubuh, sistem imun, serta kemampuan motorik. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang mendukung kesehatan memiliki risiko lebih rendah mengalami gangguan pertumbuhan, malnutrisi, maupun penyakit kronis. Sebaliknya, kurangnya perlindungan dan perhatian terhadap kebutuhan dasar anak dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan yang berdampak pada kualitas hidup anak di masa depan. Dengan demikian, perlindungan anak dalam keluarga menjadi faktor penting dalam memastikan tercapainya pertumbuhan fisik yang optimal.

Selain perkembangan fisik, perlindungan anak juga berpengaruh terhadap perkembangan mental dan emosional yang stabil. Lingkungan keluarga yang aman, penuh kasih sayang, dan bebas dari kekerasan memberikan rasa nyaman bagi anak untuk mengekspresikan diri serta mengembangkan kemampuan mengelola emosi. Anak yang memperoleh dukungan emosional dari orang tua cenderung memiliki tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi, kemampuan beradaptasi yang baik, serta kesehatan mental yang lebih stabil. Sebaliknya, anak yang mengalami kekerasan, penelantaran, atau pengabaian emosional berisiko mengalami gangguan kecemasan, stres, depresi, bahkan trauma psikologis yang dapat memengaruhi kehidupannya hingga dewasa. Penelitian mengenai kesejahteraan anak menunjukkan bahwa kualitas hubungan antara orang tua dan anak menjadi salah satu faktor utama yang menentukan kesehatan mental anak dalam jangka panjang. Oleh karena itu, perlindungan anak yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan emosional memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan kondisi psikologis yang sehat.

Dampak berikutnya dari perlindungan anak dalam keluarga adalah terbentuknya karakter dan kepribadian yang positif. Keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk belajar mengenai nilai, norma, etika, dan tanggung jawab sosial. Melalui proses pengasuhan dan interaksi sehari-hari, anak memperoleh berbagai pengalaman yang membentuk cara berpikir, sikap, dan perilakunya. Perlindungan yang diberikan melalui pola asuh yang positif memungkinkan anak mengembangkan sikap disiplin, empati, tanggung jawab, kejujuran, serta kemampuan menghargai orang lain. Sebaliknya, lingkungan keluarga yang dipenuhi konflik dan kekerasan berpotensi membentuk karakter yang negatif, seperti perilaku agresif, rendahnya rasa percaya diri, dan kesulitan dalam menjalin hubungan sosial. Dengan demikian, perlindungan anak dalam keluarga tidak hanya berfungsi menjaga keamanan anak, tetapi juga berperan sebagai sarana pembentukan kepribadian yang akan memengaruhi kehidupannya di masa mendatang.

Perlindungan anak juga memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan masa depan anak. Anak yang mendapatkan perlindungan dan dukungan dari keluarga umumnya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan yang layak. Orang tua yang peduli terhadap perkembangan anak akan mendorong anak untuk belajar, menyediakan fasilitas pendidikan yang diperlukan, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi proses belajar. Dukungan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan motivasi belajar, prestasi akademik, dan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Sebaliknya, anak yang mengalami penelantaran atau kekerasan dalam keluarga sering kali menghadapi hambatan dalam proses pendidikan, seperti rendahnya konsentrasi belajar, ketidakhadiran di sekolah, hingga putus sekolah. Oleh karena itu, perlindungan anak menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas pendidikan dan peluang anak untuk mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Hasil berbagai penelitian dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa perlindungan anak yang efektif memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Kajian mengenai perlindungan hak anak dalam lingkungan keluarga menemukan bahwa pemenuhan hak-hak dasar anak berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, kesehatan mental, serta keberhasilan pendidikan anak. Selain itu, penelitian tentang perlindungan anak dalam perspektif kesejahteraan sosial menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dalam

lingkungan keluarga yang aman dan suportif memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan sosial dibandingkan anak yang hidup dalam lingkungan yang tidak mendukung. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan hanya kebutuhan jangka pendek, tetapi merupakan fondasi penting bagi pembangunan kualitas generasi mendatang.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, dapat dianalisis bahwa perlindungan anak memiliki pengaruh multidimensional terhadap perkembangan anak. Perlindungan yang diberikan keluarga tidak hanya berdampak pada satu aspek perkembangan, tetapi mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, moral, dan pendidikan secara bersamaan. Ketika anak memperoleh perlindungan yang optimal, berbagai aspek perkembangan tersebut akan saling mendukung sehingga menghasilkan pertumbuhan yang lebih seimbang dan berkualitas. Sebaliknya, kegagalan keluarga dalam menjalankan fungsi perlindungan dapat menimbulkan dampak negatif yang tidak hanya dirasakan pada masa anak-anak, tetapi juga hingga masa dewasa. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam kehidupan keluarga guna memastikan terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, berakarakter, dan mampu berkontribusi secara positif bagi masyarakat.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak sangat bergantung pada keterlibatan aktif orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan pendidikan anak. Perlindungan yang bersifat komprehensif akan menciptakan lingkungan yang memungkinkan anak berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dengan demikian, semakin baik kualitas perlindungan yang diberikan keluarga, semakin besar pula peluang anak untuk mencapai kesejahteraan, keberhasilan pendidikan, dan kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, keluarga harus terus memperkuat fungsi perlindungannya agar mampu menjadi lingkungan yang aman, mendukung, dan kondusif bagi tumbuh kembang anak secara optimal.

Simpulan

Perlindungan anak dalam keluarga merupakan tanggung jawab utama orang tua dan keluarga dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Perlindungan tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, psikologis, pendidikan, sosial, dan perlindungan dari berbagai bentuk

kekerasan maupun penelantaran. Kualitas perlindungan anak dalam keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua, pola asuh yang diterapkan, lingkungan sosial dan budaya, serta kesadaran hukum dan pemahaman mengenai hak-hak anak.

Perlindungan anak yang dilakukan secara optimal memberikan dampak positif terhadap perkembangan anak, seperti terciptanya pertumbuhan fisik yang sehat, perkembangan mental dan emosional yang stabil, terbentuknya karakter dan kepribadian yang positif, serta meningkatnya kualitas pendidikan dan peluang masa depan anak. Oleh karena itu, penguatan fungsi keluarga melalui pola pengasuhan yang positif, peningkatan kesejahteraan keluarga, serta kesadaran akan pentingnya hak-hak anak menjadi langkah penting dalam mewujudkan lingkungan keluarga yang aman, nyaman, dan mendukung tumbuh kembang anak secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Akter, M., Islam, M. T., Hossain, M. S., & Rahman, M. (2022). From parental control to joint family oversight: Can parents and teens manage mobile online safety and privacy as equals? arXiv. <https://arxiv.org/abs/2204.07749>.
- Hasibuan, S., & Saiin, A. (2024). Revitalisasi kebijakan hak asuh dan perlindungan anak dalam RUU hukum keluarga terhadap kesejahteraan anak di Indonesia. *Indonesian Family Journal*, 2(1), 45–58.
- Khofifah, N., Salsabila, A., & Putri, R. (2025). Urgensi perlindungan hak anak dalam dinamika keluarga: Perspektif hukum Indonesia dan hukum internasional. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 7(1), 12–25.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nazmi, D., & Syofyan, S. (2023). Pengaturan perlindungan hak anak di Indonesia dalam rangka mengeliminir pelanggaran hak anak. *Unes Law Review*, 6(1), 123–135.

- Romdoni, D., Fatimah, S., & Hidayat, A. (2023). Perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 melalui pola asuh keluarga. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(2), 88–101.
- Siregar, R. A., Harahap, M., & Lubis, F. (2024). Penerapan hukum dan praktiknya atas tanggung jawab negara, masyarakat, dan keluarga dalam perlindungan anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(1), 75–89.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif (Edisi ke-3)*. Alfabeta.
- Tsani, N. D. S. R., & Dewi, G. (2023). Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap pelaku penelantaran anak dari perspektif hukum pidana. *Pro Justice: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 4(2), 55–67.

Pekerja Sosial Sebagai Pendamping dalam Perlindungan Lansia

Sri Mardianti Asmah¹, Syahrani Meiranti²,
Nursyafiqah³, Fadilllah⁴, Ibrahim⁵

¹ Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UNI Alauddin Makassar,
Indonesia.

usmannoer@uin-alauddin.ac.id.

Abstrak: Lansia merupakan kelompok usia yang menghadapi berbagai perubahan dalam aspek fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi sebagai bagian dari proses penuaan. Perubahan tersebut dapat menimbulkan berbagai tantangan, seperti menurunnya kondisi kesehatan, berkurangnya kemampuan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, keterbatasan dalam memperoleh layanan yang dibutuhkan, hingga munculnya perasaan kesepian akibat berkurangnya interaksi sosial. Dalam situasi ini, pekerja sosial memiliki peran yang penting dalam memberikan perlindungan dan dukungan bagi lansia agar tetap dapat menjalani kehidupan yang layak dan sejahtera. Artikel ini bertujuan untuk membahas peran pekerja sosial dalam upaya perlindungan lansia melalui kegiatan pendampingan, konseling, advokasi, serta membantu lansia memperoleh akses terhadap berbagai layanan sosial dan kesehatan. Penulisan artikel dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai referensi yang berkaitan dengan kesejahteraan lansia dan praktik pekerjaan sosial.

Hasil kajian menunjukkan bahwa pekerja sosial berperan sebagai fasilitator, mediator, advokat, dan pendamping yang membantu lansia memenuhi kebutuhan hidupnya serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Melalui peran tersebut, pekerja sosial dapat mendukung peningkatan kualitas hidup lansia sehingga mereka mampu hidup dengan lebih mandiri, aman, dan bermartabat. Oleh karena itu, penguatan peran pekerja sosial perlu terus dilakukan melalui peningkatan kapasitas profesional serta dukungan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan lansia.

Kata kunci: *Pekerja sosial, Perlindungan lansia, Kesejahteraan lansia, Pelayanan sosial, Pendampingan sosial*

Social Workers as Companions in Elderly Protection

Sri Mardianti Asmah¹, Syahrani Meiranti²,
Nursyafiqah³, Fadillah⁴, Ibrahim⁵

*Social Welfare Department, Faculty of Da'wah and Communication, Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.*

usmannoer@uin-alauddin.ac.id

Abstract: *The elderly constitute an age group that undergoes various changes in physical, psychological, social, and economic aspects as part of the aging process. These changes can give rise to numerous challenges, such as declining health conditions, a reduced capacity to perform daily activities, limitations in accessing needed services, and the emergence of loneliness due to diminished social interaction. In this situation, social workers play a vital role in providing protection and support for the elderly to ensure they can continue to lead a decent and prosperous life. This article aims to discuss the role of social workers in elderly protection efforts through mentoring, counseling, advocacy, and assisting the elderly in gaining access to various social and healthcare services. This article was written using a literature study method by reviewing various references related to elderly welfare and social work practices.*

The results of the study show that social workers act as facilitators, mediators, advocates, and counselors who help the elderly meet their life needs and overcome various problems they face. Through these roles, social workers can support the improvement of the elderly's quality of life, enabling them to live more independently, safely, and with dignity. Therefore, strengthening the role of social workers needs to be continuously pursued through professional capacity building and policy support that is more partial to the welfare of the elderly.

Keywords: *Social workers, Elderly protection, Elderly welfare, Social services,
Social assistance*

Pendahuluan

Lanjut usia (lansia) merupakan kelompok masyarakat yang berada pada tahap akhir siklus kehidupan dan mengalami proses penuaan yang membawa berbagai perubahan dalam aspek fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Peningkatan angka harapan hidup yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan jumlah penduduk lansia di Indonesia terus bertambah. Di satu sisi, kondisi ini mencerminkan keberhasilan pembangunan, khususnya di bidang kesehatan. Namun, di sisi lain, peningkatan jumlah lansia juga menghadirkan tantangan baru terkait pemenuhan kebutuhan, perlindungan, serta pelayanan sosial bagi mereka. Berbagai persoalan yang sering dihadapi lansia, seperti menurunnya kondisi kesehatan, keterbatasan ekonomi, berkurangnya interaksi sosial, dan menurunnya kemampuan menjalankan fungsi sosial, memerlukan perhatian serta dukungan dari berbagai pihak agar kesejahteraan mereka tetap terjaga.

Menurut Alawiyyah (2025), kesejahteraan lansia tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh kesehatan mental, hubungan sosial yang baik, rasa aman dalam lingkungan tempat tinggal, serta kemudahan dalam mengakses berbagai layanan yang diperlukan. Lansia yang tidak memperoleh dukungan yang memadai cenderung menghadapi berbagai kesulitan yang dapat menurunkan kualitas hidup mereka. Oleh sebab itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan lansia perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan mereka.

Dalam kehidupan sosial, lansia termasuk kelompok yang rentan mengalami berbagai permasalahan. Sebagian dari mereka menghadapi hambatan dalam memperoleh layanan kesehatan dan pelayanan sosial karena keterbatasan ekonomi maupun kurangnya informasi mengenai fasilitas yang tersedia. Selain itu, perubahan pola kehidupan keluarga serta meningkatnya mobilitas masyarakat menyebabkan tidak sedikit lansia yang hidup sendiri atau mendapatkan dukungan keluarga yang terbatas. Situasi tersebut dapat meningkatkan risiko keterasingan sosial, penelantaran, dan menurunnya kesejahteraan hidup lansia.

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk profesi pekerja sosial yang memiliki kompetensi dalam bidang kesejahteraan sosial. Pekerja sosial merupakan tenaga profesional yang bertugas

membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam mengatasi berbagai masalah sosial yang mereka alami. Dalam pelayanan kepada lansia, pekerja sosial berperan memberikan pendampingan, dukungan, serta membantu menghubungkan lansia dengan berbagai sumber daya dan layanan yang dapat menunjang kesejahteraan mereka.³

Hilmawan dan Hamid (2024) menjelaskan bahwa pekerja sosial memiliki peran yang penting dalam pelayanan bagi lansia melalui berbagai kegiatan, seperti melakukan asesmen kebutuhan, memberikan konseling, melakukan pendampingan, serta memfasilitasi akses terhadap layanan kesehatan maupun bantuan sosial. Melalui berbagai bentuk intervensi tersebut, pekerja sosial dapat membantu lansia memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka sehingga mampu mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik.

Selain memberikan pendampingan dan fasilitasi layanan, pekerja sosial juga menjalankan fungsi advokasi untuk memperjuangkan hak-hak lansia. Peran ini menjadi penting karena masih terdapat lansia yang mengalami perlakuan diskriminatif, kesulitan mengakses layanan publik, maupun kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan sekitar. Melalui kegiatan advokasi, pekerja sosial berupaya memastikan bahwa lansia memperoleh perlindungan serta pelayanan yang layak sesuai dengan hak-hak yang dimiliki sebagai warga negara.

Peran pekerja sosial semakin terlihat penting dalam situasi darurat atau krisis, seperti pada masa pandemi Covid-19. Syamsuddin dan Setiyawan (2021) menyatakan bahwa pekerja sosial dan pendamping lansia memiliki kontribusi besar dalam memberikan informasi, dukungan psikososial, motivasi, serta membantu lansia memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang diperlukan selama pandemi. Kehadiran mereka membantu lansia menghadapi berbagai risiko sosial maupun kesehatan yang muncul akibat kondisi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan lansia. Melalui peran sebagai fasilitator, konselor, mediator, dan advokat, pekerja sosial membantu lansia memenuhi kebutuhan hidupnya, memperoleh akses terhadap layanan yang diperlukan, serta mempertahankan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, kajian mengenai peran pekerja sosial dalam perlindungan lansia menjadi penting untuk memahami kontribusi profesi ini dalam mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial bagi kelompok lanjut usia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*). Data diperoleh dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik peran pekerja sosial dalam perlindungan lansia, seperti jurnal ilmiah, buku, artikel ilmiah, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan lansia serta praktik pekerjaan sosial.

Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan tema penelitian dan kemudian dikaji secara mendalam untuk memperoleh informasi mengenai peran pekerja sosial dalam memberikan perlindungan, pendampingan, advokasi, dan pelayanan sosial kepada lansia. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai temuan yang terdapat dalam sumber-sumber literatur tersebut.

Hasil kajian literatur kemudian disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai peran pekerja sosial dalam upaya perlindungan dan peningkatan kesejahteraan lansia.

Hasil dan Pembahasan

Proses penuaan merupakan suatu tahapan alami yang akan dialami oleh setiap manusia sepanjang siklus kehidupannya. Memasuki usia lanjut, individu mengalami berbagai perubahan yang meliputi aspek biologis, psikologis, maupun sosial. Perubahan tersebut sering kali memunculkan berbagai permasalahan yang dapat memengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup lansia. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat empat permasalahan utama yang banyak dihadapi oleh lansia, yaitu masalah kesehatan, ekonomi, psikologis, dan sosial. Keempat permasalahan tersebut saling berkaitan satu sama lain sehingga kondisi yang muncul pada satu aspek dapat memengaruhi aspek lainnya dalam kehidupan lansia.

Permasalahan kesehatan menjadi persoalan yang paling dominan dialami oleh kelompok lanjut usia. Menurut Nugroho (2019) proses penuaan ditandai dengan terjadinya penurunan fungsi organ tubuh, melemahnya sistem kekebalan tubuh, serta meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit kronis. Kondisi tersebut menyebabkan lansia lebih rentan mengalami gangguan kesehatan dibandingkan kelompok usia lainnya. Penurunan kemampuan fisik yang terjadi secara bertahap juga berpengaruh terhadap kemampuan lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara mandiri.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lansia yang menjadi responden mengalami lebih dari satu penyakit degeneratif, seperti hipertensi, diabetes melitus, osteoarthritis, dan penyakit jantung koroner. Keberadaan beberapa penyakit kronis secara bersamaan atau yang dikenal sebagai multimorbiditas menyebabkan kondisi kesehatan lansia menjadi semakin kompleks. Mereka harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin, mengonsumsi obat-obatan dalam jangka panjang, serta melakukan berbagai bentuk perawatan untuk menjaga kondisi kesehatannya. Situasi tersebut tidak hanya menguras tenaga dan waktu, tetapi juga membutuhkan biaya yang relatif besar sehingga dapat menambah beban kehidupan lansia.

Selain berdampak pada kondisi fisik, penyakit kronis yang dialami lansia juga berpengaruh terhadap tingkat kemandirian mereka. Keterbatasan gerak, penurunan kekuatan otot, gangguan keseimbangan tubuh, serta berbagai keluhan kesehatan lainnya sering kali membuat lansia kesulitan melakukan aktivitas dasar sehari-hari, seperti mandi, berpakaian, berjalan, atau menyiapkan kebutuhan pribadi. Menurut

Kementerian Kesehatan RI (2020) kondisi tersebut dapat menyebabkan lansia mengalami ketergantungan fungsional, yaitu keadaan ketika seseorang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi aktivitas kehidupan sehari-hari. Ketergantungan ini menjadi tantangan yang cukup serius, terutama bagi lansia yang tinggal sendiri atau tidak memiliki anggota keluarga yang dapat mendampingi mereka secara langsung.

Lebih lanjut, kondisi kesehatan yang terus menurun sering kali menimbulkan berbagai dampak lanjutan pada aspek kehidupan lainnya. Kebutuhan pengobatan yang berkelanjutan dapat meningkatkan pengeluaran ekonomi keluarga, sementara keterbatasan fisik yang dialami lansia berpotensi mengurangi interaksi sosial mereka dengan lingkungan sekitar. Akibatnya, banyak lansia yang tidak hanya menghadapi masalah kesehatan, tetapi juga mengalami kesulitan ekonomi, perasaan kesepian, hingga menurunnya kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, permasalahan kesehatan pada lansia perlu dipahami sebagai persoalan multidimensional yang memerlukan perhatian dan penanganan secara komprehensif dari keluarga, masyarakat, maupun pemerintah.

Selain permasalahan kesehatan, aspek ekonomi juga menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh lansia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kondisi ekonomi yang tidak stabil sering kali menyebabkan lansia mengalami kesulitan dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar mereka. Memasuki usia lanjut, sebagian besar individu tidak lagi berada pada usia produktif sehingga kemampuan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan mengalami penurunan. Banyak lansia yang telah memasuki masa pensiun atau terpaksa berhenti bekerja karena kondisi fisik yang tidak lagi memungkinkan untuk melakukan aktivitas pekerjaan secara optimal. Akibatnya, sumber pendapatan yang sebelumnya menjadi penopang kehidupan mereka berkurang bahkan hilang sama sekali.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar lansia tidak memiliki sumber penghasilan tetap yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kondisi tersebut membuat mereka rentan mengalami kesulitan ekonomi, terutama apabila tidak memiliki tabungan, aset, atau jaminan sosial yang memadai. Menurut Suharto (2018), banyak lansia yang pada akhirnya harus bergantung pada dukungan anggota keluarga, kerabat, maupun bantuan dari pemerintah dan lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta biaya pelayanan kesehatan. Ketergantungan ekonomi ini tidak hanya memengaruhi kemampuan lansia dalam memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga dapat berdampak pada kondisi psikologis mereka, seperti munculnya perasaan tidak berdaya, rendah diri, dan menjadi beban bagi keluarga.

Permasalahan ekonomi yang dialami lansia semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tingginya tingkat kemiskinan pada kelompok usia lanjut. Berdasarkan temuan penelitian, tingkat kerentanan ekonomi pada lansia cenderung lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Kondisi ini terutama ditemukan pada lansia yang tinggal di wilayah pedesaan maupun kawasan perkotaan yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah. Keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan, rendahnya kepemilikan aset produktif, serta minimnya perlindungan sosial menjadi faktor yang memperbesar risiko kemiskinan pada kelompok lansia. Tidak sedikit lansia yang harus tetap bekerja di sektor informal meskipun kondisi fisiknya sudah menurun, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Di sisi lain, permasalahan ekonomi yang dihadapi lansia sering kali bertambah berat karena kebutuhan pengeluaran mereka justru meningkat seiring bertambahnya usia. Berbeda dengan kelompok usia produktif yang masih memiliki peluang untuk meningkatkan pendapatan, lansia menghadapi kondisi yang berlawanan, yaitu menurunnya kemampuan ekonomi di tengah meningkatnya kebutuhan hidup. Salah satu pengeluaran terbesar yang harus ditanggung lansia adalah biaya kesehatan. Penyakit kronis yang banyak dialami pada usia lanjut mengharuskan mereka menjalani pemeriksaan rutin, mengonsumsi obat-obatan dalam jangka panjang, serta memperoleh layanan kesehatan yang berkesinambungan. Kebutuhan tersebut tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit dan sering kali menjadi beban tambahan bagi lansia maupun keluarganya.

Ironisnya, peningkatan kebutuhan finansial akibat biaya kesehatan terjadi pada saat kemampuan lansia untuk menghasilkan pendapatan semakin terbatas. Situasi ini menciptakan kondisi yang rentan, di mana lansia harus menghadapi tuntutan pengeluaran yang terus meningkat tanpa diimbangi oleh sumber pendapatan yang memadai. Apabila keluarga juga memiliki keterbatasan ekonomi, maka risiko terjadinya penelantaran, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, dan menurunnya kualitas hidup lansia menjadi semakin besar. Oleh karena itu, permasalahan ekonomi pada lansia tidak dapat dipandang sebagai persoalan finansial semata, melainkan sebagai masalah sosial yang berkaitan erat dengan kesejahteraan, kesehatan, serta keberlangsungan hidup mereka. Dengan demikian, diperlukan dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui berbagai program perlindungan sosial agar lansia dapat menjalani masa tuanya secara lebih layak dan sejahtera (Suharto, 2018).

Selain permasalahan kesehatan dan ekonomi, aspek psikologis juga menjadi salah satu persoalan penting yang banyak dialami oleh lansia. Namun demikian, dibandingkan dengan masalah fisik dan ekonomi, permasalahan psikologis sering kali kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, kondisi psikologis memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas hidup, kesejahteraan, serta kemampuan lansia dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kesehatan mental yang terganggu dapat memperburuk kondisi fisik lansia, menurunkan motivasi hidup, serta menghambat mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Oleh karena itu, permasalahan psikologis perlu dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penuaan dan kesejahteraan lanjut usia.

Dalam penelitian ditemukan bahwa depresi, kecemasan, perasaan kesepian, serta rasa tidak berdaya merupakan masalah psikologis yang paling sering dialami oleh lansia. Berbagai kondisi tersebut muncul sebagai akibat dari perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan mereka seiring bertambahnya usia. Lansia sering kali harus menghadapi berbagai kehilangan yang bersifat emosional maupun sosial, seperti menurunnya kondisi kesehatan, berkurangnya kemampuan fisik, hilangnya kemandirian, hingga kehilangan orang-orang terdekat yang selama ini menjadi sumber dukungan emosional. Akumulasi dari berbagai perubahan tersebut dapat memengaruhi kondisi mental lansia dan meningkatkan risiko terjadinya gangguan psikologis.

Salah satu faktor yang paling banyak memengaruhi kesehatan mental lansia adalah kehilangan pasangan hidup. Kehilangan suami atau istri tidak hanya berarti kehilangan seseorang yang dicintai, tetapi juga kehilangan teman berbagi, pendamping hidup, serta sumber dukungan emosional yang selama bertahun-tahun hadir dalam kehidupan mereka. Peristiwa tersebut sering kali menimbulkan perasaan sedih yang mendalam, kesepian, bahkan depresi yang berkepanjangan. Selain kehilangan pasangan, perubahan struktur keluarga juga menjadi faktor yang berkontribusi terhadap munculnya masalah psikologis pada lansia. Anak-anak yang telah dewasa umumnya membangun kehidupan sendiri, menikah, dan tinggal terpisah dari orang tua. Kondisi ini menyebabkan intensitas interaksi antara lansia dengan anggota keluarganya menjadi semakin berkurang.

Menurut Papalia dan Feldman (2019), berkurangnya kehadiran anak-anak dalam kehidupan sehari-hari dapat memunculkan kondisi yang dikenal sebagai empty nest syndrome atau sindrom sarang kosong. Sindrom ini terjadi ketika orang tua, khususnya lansia, merasakan kesedihan, kehilangan, dan kesepian setelah anak-anak mereka meninggalkan rumah untuk membangun kehidupan yang mandiri. Dalam kondisi tersebut, banyak lansia merasa bahwa peran yang selama ini mereka jalankan sebagai pengasuh, pendidik, dan pelindung keluarga telah berakhir. Perasaan kehilangan peran sosial ini sering kali menimbulkan anggapan bahwa keberadaan mereka tidak lagi dibutuhkan oleh orang-orang di sekitarnya, sehingga memicu munculnya perasaan tidak berarti dan rendah diri.

Selain itu, berkurangnya keterlibatan lansia dalam berbagai aktivitas sosial dan kemasyarakatan juga dapat memperkuat perasaan terisolasi. Ketika kemampuan fisik mulai menurun, kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial menjadi semakin terbatas. Akibatnya, jaringan pertemanan dan dukungan sosial yang dimiliki lansia perlahan menyusut. Situasi tersebut dapat menimbulkan rasa kesepian yang mendalam, terutama bagi lansia yang tinggal sendiri atau memiliki hubungan yang kurang dekat dengan anggota keluarganya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat meningkatkan risiko depresi serta menurunkan kepuasan hidup mereka.

Di samping berbagai faktor tersebut, lansia juga sering mengalami kecemasan yang berkaitan dengan masa depan dan kondisi hidup yang mereka hadapi. Ketakutan terhadap kematian, kekhawatiran akan memburuknya kondisi kesehatan, serta ketidakpastian mengenai kehidupan di masa mendatang menjadi sumber stres yang cukup besar. Banyak lansia merasa cemas apabila suatu saat mereka tidak lagi

mampu merawat diri sendiri dan harus bergantung sepenuhnya pada bantuan orang lain. Kekhawatiran untuk menjadi beban bagi keluarga juga merupakan salah satu sumber tekanan psikologis yang sering muncul. Perasaan tersebut dapat menyebabkan lansia menarik diri dari lingkungan sosial, menekan kebutuhan mereka sendiri, bahkan enggan meminta bantuan ketika menghadapi kesulitan.

Dengan demikian, permasalahan psikologis pada lansia merupakan persoalan yang kompleks dan memiliki dampak yang luas terhadap kesejahteraan mereka. Gangguan psikologis tidak hanya memengaruhi kondisi emosional, tetapi juga dapat berdampak pada kesehatan fisik, hubungan sosial, serta kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan dukungan emosional yang memadai dari keluarga, masyarakat, dan berbagai lembaga pelayanan sosial agar lansia dapat menjalani masa tua dengan perasaan aman, dihargai, serta tetap memiliki makna dan tujuan dalam kehidupannya (Papalia & Feldman, 2019).

Terakhir, Permasalahan sosial menjadi aspek lain yang turut memperumit kehidupan lansia pada masa sekarang. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern, lansia tidak hanya menghadapi tantangan yang berkaitan dengan kesehatan, ekonomi, dan psikologis, tetapi juga berbagai persoalan sosial yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan. Aspek sosial memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan lansia karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi, dukungan, dan pengakuan dari lingkungan sekitarnya. Ketika kebutuhan sosial tersebut tidak terpenuhi, lansia berisiko mengalami penurunan kesejahteraan yang dapat berdampak pada kondisi fisik maupun mental mereka.

Berdasarkan hasil penelitian, isolasi sosial dan marginalisasi merupakan dua permasalahan sosial yang paling sering dialami oleh lansia. Isolasi sosial terjadi ketika lansia memiliki keterbatasan dalam menjalin hubungan dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga mereka merasa terpisah atau terasing dari kehidupan sosial. Kondisi ini dapat muncul akibat berkurangnya jumlah teman sebaya, menurunnya kemampuan fisik untuk beraktivitas di luar rumah, maupun minimnya kesempatan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sosial. Akibatnya, lansia sering kali mengalami kesepian dan kehilangan dukungan sosial yang sebenarnya sangat dibutuhkan pada masa tua.

Menurut Nurcholis (2021), perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi telah membawa dampak yang cukup besar terhadap kehidupan lansia. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah bergesernya pola keluarga dari keluarga besar (extended family) menuju keluarga inti (nuclear family). Pada masa lalu, lansia umumnya tinggal bersama anak, cucu, maupun anggota keluarga lainnya dalam satu rumah atau lingkungan yang berdekatan. Kondisi tersebut memungkinkan mereka memperoleh dukungan emosional, bantuan dalam aktivitas sehari-hari, serta perlindungan sosial yang kuat dari keluarga. Namun, seiring berkembangnya modernisasi, pola kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang menyebabkan hubungan antaranggota keluarga menjadi lebih longgar dan tidak seintensif sebelumnya.

Mobilitas penduduk yang semakin tinggi juga menjadi faktor yang memperkuat terjadinya kerentanan sosial pada lansia. Banyak anak yang harus berpindah ke kota lain bahkan ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan yang lebih baik. Akibatnya, tidak sedikit lansia yang harus menjalani masa tuanya seorang diri tanpa kehadiran anggota keluarga yang dapat memberikan pendampingan secara langsung. Meskipun teknologi komunikasi memungkinkan hubungan tetap terjalin, interaksi melalui media digital tidak selalu mampu menggantikan kebutuhan lansia akan kehadiran fisik dan dukungan emosional secara langsung. Situasi ini sering kali membuat lansia merasa kesepian, kurang diperhatikan, dan kehilangan rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.

Kondisi tinggal sendiri juga meningkatkan berbagai risiko sosial yang dapat mengancam kesejahteraan lansia. Ketika menghadapi masalah kesehatan, kesulitan ekonomi, atau keadaan darurat lainnya, lansia yang tidak memiliki jaringan dukungan sosial yang kuat cenderung mengalami kesulitan dalam memperoleh bantuan. Keterbatasan tersebut dapat memperburuk kondisi yang mereka alami dan meningkatkan kerentanan terhadap penelantaran sosial. Oleh karena itu, keberadaan keluarga, tetangga, kelompok masyarakat, serta lembaga sosial memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan dan perlindungan kepada lansia.

Selain isolasi sosial, fenomena marginalisasi juga menjadi permasalahan yang cukup menonjol dalam kehidupan lansia. Marginalisasi terjadi ketika lansia kurang mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas sosial dan pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat. Banyak lansia yang tidak lagi dilibatkan dalam kegiatan kemasyarakatan karena dianggap tidak memiliki

kemampuan yang memadai untuk berkontribusi. Dalam beberapa kasus, keterbatasan fisik memang menjadi penghambat partisipasi mereka. Namun, tidak jarang marginalisasi juga muncul akibat adanya stereotip atau pandangan negatif masyarakat terhadap lansia.

Pandangan bahwa lansia merupakan kelompok yang tidak lagi produktif, lemah, dan kurang relevan dengan perkembangan zaman sering kali menyebabkan mereka tersisih dari berbagai aktivitas sosial. Akibatnya, pengalaman, pengetahuan, dan kebijaksanaan yang dimiliki lansia kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. Padahal, lansia memiliki potensi besar untuk tetap berkontribusi dalam kehidupan sosial melalui berbagai bentuk peran, seperti menjadi sumber nasihat, pendidik dalam keluarga, maupun tokoh yang menjaga nilai-nilai budaya dan sosial di masyarakat. Ketika kesempatan untuk berpartisipasi semakin berkurang, lansia dapat kehilangan rasa percaya diri, merasa tidak dihargai, dan mengalami penurunan kepuasan hidup.

Dengan demikian, permasalahan sosial yang dihadapi lansia menunjukkan bahwa proses penuaan tidak hanya berkaitan dengan perubahan biologis, tetapi juga erat hubungannya dengan perubahan struktur sosial dan dinamika kehidupan masyarakat modern. Isolasi sosial dan marginalisasi dapat mengurangi kualitas hidup lansia serta memperburuk berbagai masalah lain yang mereka hadapi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, lembaga sosial, dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, ramah lansia, serta mampu memberikan ruang bagi mereka untuk tetap berpartisipasi dan merasa menjadi bagian yang berharga dalam kehidupan sosial (Nurcholis, 2021). menjalani hari-hari. Sebab itu, peran keluarga sebagai penyokong utama dalam hal emosional, sosial, fisik, dan spiritual bagi orang tua sangatlah penting.

Berbagai jenis perlindungan yang diberikan oleh keluarga mencakup pemenuhan kebutuhan utama, perawatan kesehatan, dukungan mental, kebersamaan sosial, dan pemberian rasa aman serta kasih sayang. Perlindungan semacam ini terbukti mampu memajukan kualitas hidup lansia, mengurangi rasa kesepian, meningkatkan kesehatan mental, serta membantu mereka tetap aktif dan berkontribusi dalam kegiatan sosial. Selain itu, dengan adanya dukungan dari anggota keluarga, aktivitas fisik yang rutin, partisipasi dalam acara sosial, pemenuhan kebutuhan spiritual, serta akses pada layanan kesehatan yang layak, kesejahteraan orang tua dapat lebih ditingkatkan.

Namun, pelaksanaan perlindungan bagi lansia di dalam keluarga masih menemukan berbagai rintangan, seperti keterbatasan finansial, perubahan dalam struktur keluarga, minimnya pengetahuan mengenai perawatan lansia, masalah kesehatan yang rumit, dan risiko isolasi sosial. Untuk menghadapi tantangan ini, penting untuk meningkatkan pemahaman keluarga tentang proses penuaan, memperkuat komunikasi diantara anggota keluarga, memanfaatkan teknologi yang ada, serta mendapatkan dukungan berkelanjutan dari masyarakat dan pemerintah.

Uraian diatas dapat dilihat bahwa perlindungan lansia dalam keluarga tak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga memerlukan kolaborasi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Melalui perlindungan yang efektif, lansia dapat menjalani masa tua mereka dengan lebih sehat, mandiri, bermartabat, serta sejahtera.

Peran Pekerja Sosial dalam Perlindungan Lansia

Menghadapi kompleksitas permasalahan yang dialami lansia sebagaimana diuraikan di atas, kehadiran pekerja sosial menjadi sangat krusial. Pekerja sosial merupakan profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai khusus untuk membantu individu, keluarga, kelompok, dan komunitas dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial (Ife, 2018, hlm. 23). Dalam konteks perlindungan lansia, penelitian ini mengidentifikasi setidaknya enam peran utama yang dimainkan oleh pekerja sosial, yakni sebagai fasilitator, konselor, advokat, edukator, mediator, dan pendamping sosial. Keenam peran ini saling melengkapi dan secara bersama-sama membentuk praktik pekerjaan sosial yang komprehensif dan holistik dalam melayani lansia.

Peran sebagai fasilitator merupakan peran pertama dan paling fundamental yang dijalankan oleh pekerja sosial dalam sistem perlindungan lansia. Sebagai fasilitator, pekerja sosial bertugas untuk memperlancar akses lansia terhadap berbagai sumber daya, layanan, dan dukungan yang dibutuhkan. Hal ini mencakup upaya menghubungkan lansia dengan lembaga-lembaga pelayanan sosial, program bantuan pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Asistensi Sosial Lanjut Usia (ASLU), serta jaringan dukungan komunitas yang ada (Kementerian Sosial RI, 2021). Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak lansia yang sebenarnya berhak mendapatkan berbagai bentuk bantuan sosial, namun tidak berhasil mengaksesnya karena ketidaktahuan prosedur administratif, keterbatasan mobilitas fisik, atau kurangnya informasi. Pekerja sosial hadir untuk menjembatani kesenjangan antara kebutuhan lansia dengan sumber daya yang tersedia di masyarakat.

Peran sebagai konselor menjadi sangat relevan mengingat tingginya prevalensi masalah psikologis di kalangan lansia. Dalam peran ini, pekerja sosial memberikan dukungan emosional, membantu lansia untuk memproses perasaan kehilangan dan kesedihan, serta memfasilitasi pengembangan coping yang adaptif dalam menghadapi perubahan-perubahan yang menyertai proses penuaan (Zastrow, 2019). Sesi konseling yang dilakukan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga mencakup konseling kelompok yang memungkinkan lansia untuk saling berbagi pengalaman dan dukungan satu sama lain. Penelitian ini menemukan bahwa intervensi konseling yang dilakukan secara teratur dan konsisten secara signifikan mampu mengurangi gejala depresi dan meningkatkan kesejahteraan psikologis lansia. Kemampuan untuk mendengarkan secara aktif, empati yang tulus, dan ketulusan dalam membantu menjadi kunci keberhasilan pekerja sosial dalam menjalankan peran konseling ini.

Peran sebagai advokat mencerminkan komitmen pekerja sosial terhadap keadilan sosial dan pemenuhan hak-hak lansia. Advokasi dalam konteks ini mencakup dua dimensi: advokasi kasus (case advocacy) yang berfokus pada pemenuhan hak individual lansia tertentu, dan advokasi kelas (class advocacy) yang berupaya mengubah kebijakan atau sistem yang secara struktural merugikan kelompok lansia (Hepworth et al., 2020). Dalam praktiknya, pekerja sosial seringkali harus berhadapan dengan birokrasi yang kaku, kebijakan yang diskriminatif terhadap lansia, atau keluarga yang lalai dalam memenuhi kewajiban merawat anggota

keluarga yang sudah tua. Penelitian ini mendokumentasikan beberapa kasus di mana pekerja sosial berhasil memperjuangkan hak lansia untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak setelah menghadapi penolakan dari lembaga-lembaga terkait. Keberhasilan advokasi semacam ini tidak hanya bermanfaat bagi lansia yang bersangkutan, tetapi juga menciptakan preseden positif yang dapat mengubah praktik kelembagaan secara lebih luas.

Peran sebagai edukator berkaitan erat dengan upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran, baik pada diri lansia itu sendiri maupun pada keluarga dan masyarakat luas. Sebagai edukator, pekerja sosial memberikan informasi tentang proses penuaan yang normal, cara-cara menjaga kesehatan fisik dan mental di usia lanjut, hak-hak hukum yang dimiliki lansia, serta cara memanfaatkan layanan sosial yang tersedia (Compton et al., 2018). Edukasi kepada keluarga mencakup pemberian pemahaman tentang tantangan yang dihadapi anggota keluarga yang sudah tua, cara-cara memberikan perawatan yang tepat dan bermartabat, serta pentingnya mempertahankan komunikasi yang hangat dan terbuka dengan lansia. Sementara itu, edukasi kepada masyarakat bertujuan untuk mengubah stigma negatif terhadap lansia dan membangun kesadaran kolektif tentang tanggung jawab bersama dalam melindungi dan menghormati kelompok usia lanjut.

Peran sebagai mediator menjadi penting ketika terjadi konflik atau ketegangan antara lansia dengan pihak-pihak di sekitarnya, baik itu keluarga, institusi, maupun komunitas. Pekerja sosial sebagai mediator berupaya untuk memfasilitasi dialog yang konstruktif, membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk saling memahami perspektif satu sama lain, dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak (Corcoran, 2020). Dalam konteks keluarga misalnya, konflik sering muncul terkait dengan pembagian tanggung jawab perawatan lansia di antara anak-anak, persoalan warisan, atau perbedaan pandangan tentang tempat tinggal dan perawatan yang paling sesuai untuk lansia. Pekerja sosial dengan keahlian mediasi yang baik mampu mengubah konflik-konflik tersebut menjadi peluang untuk mempererat hubungan keluarga dan memperkuat sistem dukungan sosial bagi lansia.

Peran sebagai pendamping sosial melengkapi rangkaian peran pekerja sosial yang telah diuraikan di atas. Pendampingan sosial merupakan proses berkelanjutan di mana pekerja sosial hadir secara konsisten mendampingi lansia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, menghadapi krisis, dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Berbeda dengan intervensi yang bersifat episodik,

pendampingan sosial meniscayakan pembangunan hubungan jangka panjang yang berbasis kepercayaan antara pekerja sosial dengan lansia (Sudirman, 2020), Penelitian ini menemukan bahwa kualitas hubungan terapeutik antara pekerja sosial dengan lansia merupakan salah satu faktor yang paling menentukan keberhasilan intervensi. Lansia yang merasa didampingi secara tulus dan konsisten menunjukkan tingkat kesejahteraan subjektif yang lebih tinggi dan lebih mampu menghadapi berbagai permasalahan kehidupan dibandingkan mereka yang hanya menerima layanan yang bersifat transaksional dan sporadis.

Tantangan dalam Perlindungan Lansia

Meskipun pekerja sosial telah menjalankan berbagai peran penting dalam sistem perlindungan lansia, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan serius yang menghambat efektivitas intervensi. Penelitian ini mengidentifikasi tiga tantangan utama yang secara struktural dan sistemik menghambat upaya perlindungan lansia secara optimal, yakni keterbatasan layanan sosial, kurangnya dukungan keluarga, dan kelangkaan tenaga profesional. Ketiga tantangan ini saling berinteraksi dan menciptakan kondisi yang secara keseluruhan melemahkan kapasitas sistem perlindungan sosial dalam merespons kebutuhan lansia yang terus berkembang.

Keterbatasan layanan sosial merupakan tantangan pertama dan paling mendasar yang dihadapi dalam sistem perlindungan lansia di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan terkait perlindungan lansia, termasuk Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia beserta peraturan pelaksanaannya, implementasi di lapangan masih sangat jauh dari ideal (Suyono, 2019). Jumlah panti sosial lanjut usia yang tersedia masih sangat tidak proporsional dengan jumlah lansia yang membutuhkan perawatan institusional. Lebih dari itu, program layanan berbasis komunitas yang seharusnya menjadi lini pertama perlindungan lansia belum berkembang secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Wilayah terpencil dan pedesaan mengalami defisit layanan yang jauh lebih parah dibandingkan daerah perkotaan, sehingga menciptakan kesenjangan akses yang tajam berdasarkan lokasi geografis. Keterbatasan anggaran pemerintah untuk sektor kesejahteraan sosial juga menjadi faktor pembatas yang tidak bisa diabaikan, mengingat alokasi anggaran untuk layanan lansia masih sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.

Tantangan kedua, kurangnya dukungan keluarga, merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan dalam konteks masyarakat Indonesia yang sedang mengalami perubahan sosial yang cepat. Secara historis, keluarga besar dalam tradisi masyarakat Indonesia telah menjadi pilar utama perlindungan dan perawatan lansia. Namun, modernisasi, urbanisasi, dan pergeseran nilai-nilai sosial telah secara perlahan menggerus sistem perlindungan berbasis keluarga tersebut (Wilensky & Lebeaux, 2018). Penelitian ini menemukan sejumlah faktor yang berkontribusi pada melemahnya dukungan keluarga terhadap lansia, di antaranya adalah tuntutan ekonomi yang memaksa anak-anak untuk bermigrasi ke kota atau luar negeri demi mencari penghidupan yang lebih baik, perubahan norma sosial tentang kewajiban merawat orang tua, serta konflik nilai antara generasi muda yang telah terinternalisasi nilai-nilai individualistik dengan generasi tua yang masih menjunjung nilai-nilai kolektivisme. Dalam beberapa kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, lansia bahkan mengalami penelantaran yang dilakukan secara sengaja oleh anggota keluarganya, sebuah fenomena yang dalam literatur gerontologi dikenal sebagai elder abuse atau penganiayaan lansia.

Tantangan ketiga, kurangnya tenaga profesional pekerja sosial yang terlatih khusus dalam bidang gerontologi, merupakan hambatan serius yang berpengaruh langsung pada kualitas layanan yang diterima lansia. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa rasio pekerja sosial terhadap populasi lansia masih sangat tidak memadai, jauh di bawah standar internasional yang direkomendasikan oleh International Federation of Social Workers (IFSW) (Sumodiningrat, 2021). Selain persoalan kuantitas, kualifikasi dan kompetensi pekerja sosial yang bertugas di bidang layanan lansia juga masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Banyak petugas yang bekerja di lembaga-lembaga layanan lansia belum memiliki latar belakang pendidikan pekerjaan sosial yang formal, sehingga intervensi yang dilakukan seringkali bersifat intuitif dan tidak terstruktur secara metodologis. Kurangnya pelatihan berkelanjutan dan supervisi profesional semakin memperparah kondisi ini, karena pekerja sosial tidak mendapatkan kesempatan yang cukup untuk mengembangkan dan memperbarui kompetensinya sesuai dengan perkembangan terbaru dalam ilmu gerontologi dan praktik pekerjaan sosial.

Selain ketiga tantangan utama tersebut, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat lain yang turut memengaruhi efektivitas sistem perlindungan lansia. Stigma sosial terhadap proses penuaan dan pandangan ageisme yang masih kuat dalam masyarakat Indonesia menciptakan iklim budaya yang kurang kondusif bagi perlindungan martabat lansia. Koordinasi lintas sektor yang lemah antara instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga menyebabkan duplikasi program di satu sisi dan kekosongan layanan di sisi lain. Terakhir, minimnya data yang komprehensif dan akurat tentang kondisi dan kebutuhan lansia di tingkat lokal menyulitkan perencanaan program yang responsif dan berbasis bukti (Rustanto, 2020).

Upaya Penguatan Perlindungan Lansia

Berbagai tantangan yang telah diidentifikasi dalam bagian sebelumnya menuntut respons yang sistematis, terencana, dan berbasis bukti dari seluruh pemangku kepentingan dalam sistem perlindungan lansia. Berdasarkan analisis mendalam terhadap temuan penelitian dan kajian literatur yang relevan, penelitian ini merumuskan empat strategi penguatan yang saling melengkapi dan secara bersama-sama diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perlindungan lansia secara substansial. Keempat strategi tersebut adalah penguatan kebijakan sosial, peningkatan layanan kesehatan dan sosial, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta pengembangan kompetensi pekerja sosial.

Penguatan kebijakan sosial menjadi fondasi yang tidak tergantikan bagi seluruh upaya perlindungan lansia yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kebijakan yang bergerak pada beberapa level sekaligus. Pada level nasional, diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 yang sudah berusia lebih dari dua dekade dan belum sepenuhnya mengakomodasi perubahan-perubahan demografis dan sosial yang telah terjadi (Djunaidi, 2021). Revisi tersebut perlu mencakup penguatan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak lansia, perluasan cakupan penerima manfaat program jaminan sosial lansia, dan penetapan standar minimal layanan yang harus dipenuhi oleh seluruh lembaga yang memberikan pelayanan kepada lansia. Pada level daerah, pemerintah kabupaten dan kota perlu didorong untuk mengembangkan peraturan daerah yang lebih operasional dan responsif terhadap karakteristik kebutuhan lansia di masing-masing wilayahnya, disertai dengan alokasi anggaran yang memadai untuk implementasinya.

Kerangka kebijakan yang kuat juga perlu diperkuat dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang sistematis dan partisipatif. Pelibatan lansia sendiri sebagai subjek aktif dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam setiap proses pengambilan keputusan (Ife, 2018). Pendekatan yang menempatkan lansia semata-mata sebagai objek penerima manfaat kebijakan, tanpa memberi mereka ruang untuk bersuara dan berpartisipasi, pada dasarnya bertentangan dengan semangat perlindungan berbasis hak asasi manusia yang seharusnya menjadi landasan etis seluruh sistem perlindungan sosial.

Strategi kedua, peningkatan layanan kesehatan dan sosial, berkaitan langsung dengan upaya memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas layanan yang diterima lansia. Dalam dimensi layanan kesehatan, penelitian ini merekomendasikan pengembangan model layanan kesehatan primer yang ramah lansia di tingkat puskesmas, termasuk pembentukan poli geriatri yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan yang terlatih dalam ilmu geriatri dan gerontologi (Kementerian Kesehatan RI, 2020), Program kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan untuk lansia yang tidak mampu mengakses fasilitas kesehatan secara mandiri juga perlu diintegrasikan secara sistematis ke dalam sistem layanan kesehatan primer. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui program telemedicine dapat menjadi solusi inovatif untuk menjangkau lansia yang tinggal di daerah terpencil tanpa harus menanggung beban biaya perjalanan yang besar.

Dalam dimensi layanan sosial, pengembangan sistem layanan berbasis komunitas perlu mendapat prioritas sebagai alternatif yang lebih humanis dan lebih terjangkau dibandingkan perawatan institusional. Program-program seperti day care center untuk lansia, layanan penitipan sementara (respite care), dan klub kesehatan lansia yang dikelola dari, oleh, dan untuk komunitas perlu didukung secara aktif oleh pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil (Suharto, 2018). Layanan semacam ini tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan praktis lansia, tetapi juga berperan penting dalam mencegah isolasi sosial dan mempertahankan keterlibatan sosial yang bermakna bagi lansia. Pendekatan layanan yang bersifat proaktif, yang tidak menunggu lansia mengalami krisis sebelum memberikan bantuan, juga perlu menjadi paradigma baru dalam sistem pelayanan sosial lansia di Indonesia.

Strategi ketiga, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, mengakui bahwa keluarga dan komunitas tetap merupakan sumber daya terpenting dalam sistem perlindungan lansia, meskipun menghadapi berbagai tekanan dan perubahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Strategi ini bertujuan untuk memperkuat, bukan menggantikan, kapasitas keluarga dan komunitas dalam merawat dan melindungi anggotanya yang sudah lanjut usia. Program-program edukasi dan pelatihan bagi anggota keluarga yang berperan sebagai caregiver informal perlu dikembangkan secara sistematis, mencakup pengetahuan tentang perawatan fisik dasar, pemahaman tentang perubahan psikologis yang lazim terjadi pada lansia, serta keterampilan komunikasi yang efektif dengan lansia yang mungkin mengalami gangguan kognitif (Nurcholis, 2021).

Di samping pemberdayaan keluarga, penguatan modal sosial masyarakat dalam konteks perlindungan lansia merupakan investasi jangka panjang yang tidak kalah pentingnya. Revitalisasi nilai-nilai gotong royong, hormat kepada orang yang lebih tua, dan tanggung jawab kolektif terhadap warga masyarakat yang rentan perlu terus dipromosikan sebagai bagian dari identitas budaya bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Program-program antargenerasi yang mempertemukan lansia dengan generasi muda dalam kegiatan yang bermakna dan saling menguntungkan dapat menjadi wahana yang efektif untuk membangun jembatan pemahaman dan solidaritas antargenerasi (Papalia & Feldman, 2019). Pengalaman dan kearifan yang dimiliki lansia merupakan aset sosial yang tidak ternilai, dan masyarakat yang mampu memanfaatkan aset tersebut dengan bijak akan memiliki daya tahan sosial yang lebih kuat dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Strategi keempat, pengembangan kompetensi pekerja sosial, menutup kerangka penguatan perlindungan lansia dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang merupakan ujung tombak sistem layanan. Penelitian ini menegaskan bahwa investasi dalam pengembangan kompetensi pekerja sosial adalah investasi yang memiliki dampak berlipat ganda, karena pekerja sosial yang terlatih dengan baik mampu memberikan layanan yang lebih efektif kepada lebih banyak lansia sekaligus (Hepworth et al., 2020). Reformasi kurikulum pendidikan pekerjaan sosial di perguruan tinggi perlu dilakukan untuk memberikan penekanan yang lebih kuat pada gerontologi sosial sebagai bidang spesialisasi yang semakin relevan mengingat tren demografis yang menua secara cepat. Materi pembelajaran perlu mencakup tidak hanya pengetahuan teoritis tentang proses penuaan, tetapi juga keterampilan praktis dalam melakukan asesmen kebutuhan lansia, merancang dan mengimplementasikan rencana intervensi berbasis bukti, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas intervensi yang dilakukan.

Selain reformasi kurikulum pendidikan formal, pengembangan sistem pelatihan berkelanjutan bagi pekerja sosial yang sudah bekerja di lapangan juga perlu menjadi prioritas. Pelatihan-pelatihan tersebut perlu didesain secara responsif terhadap tantangan-tantangan nyata yang dihadapi pekerja sosial dalam praktik sehari-hari, dan jika memungkinkan, melibatkan pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman (*experiential learning*) yang telah terbukti lebih efektif dalam mengembangkan keterampilan praktis (Zastrow, 2019). Sistem supervisi profesional yang terstruktur juga perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa pekerja sosial mendapatkan dukungan dan bimbingan yang dibutuhkan dalam menghadapi situasi-situasi kerja yang kompleks dan penuh tekanan emosional. Pengakuan formal terhadap profesi pekerjaan sosial melalui regulasi tentang sertifikasi dan lisensi pekerja sosial yang komprehensif juga merupakan langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas layanan yang diberikan kepada lansia.

Secara keseluruhan, keempat strategi penguatan yang telah diuraikan di atas hanya akan mencapai potensi maksimalnya apabila diimplementasikan secara sinergis dan terintegrasi dalam kerangka sistem perlindungan sosial yang kohesif. Tidak ada satu pun strategi yang dapat berdiri sendiri sebagai solusi tunggal atas kompleksitas permasalahan perlindungan lansia. Dibutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah, keterlibatan aktif dari masyarakat sipil dan sektor swasta, serta kesadaran dan partisipasi dari masyarakat luas untuk mewujudkan sistem

perlindungan lansia yang benar-benar komprehensif, adil, dan bermartabat. Lansia bukan hanya kelompok yang membutuhkan perlindungan pasif, melainkan warga masyarakat yang memiliki hak penuh untuk menjalani kehidupan yang bermakna, dihormati, dan sejahtera sepanjang sisa usia mereka (Komnas Lansia, 2020).

Simpulan

Penuaan merupakan proses alami yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan lansia, mencakup aspek kesehatan, ekonomi, psikologis, dan sosial. Keempat aspek ini saling berkaitan dan secara bersama-sama memengaruhi kualitas hidup lansia. Masalah kesehatan, seperti penyakit kronis, sering kali menimbulkan ketergantungan yang kemudian berdampak pada kondisi ekonomi dan hubungan sosial. Di sisi lain, penurunan kemampuan produktif serta meningkatnya kebutuhan hidup turut memperburuk kondisi ekonomi lansia. Situasi ini juga dapat memicu permasalahan psikologis, seperti rasa kesepian, depresi, dan kecemasan, yang diperparah oleh kondisi sosial seperti isolasi dan kurangnya keterlibatan dalam masyarakat.

Dalam konteks tersebut, keluarga memegang peranan penting sebagai sumber utama dukungan, baik secara emosional, sosial, maupun fisik. Selain itu, pekerja sosial memiliki posisi strategis dalam upaya perlindungan lansia melalui berbagai peran, seperti fasilitator, konselor, advokat, edukator, mediator, dan pendamping. Meskipun demikian, upaya perlindungan lansia masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan layanan sosial, lemahnya dukungan keluarga, serta kurangnya tenaga profesional yang kompeten. Oleh karena itu, diperlukan langkah penguatan yang melibatkan berbagai pihak, melalui perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas layanan, pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta pengembangan kapasitas pekerja sosial. Dengan pendekatan yang terpadu dan kolaboratif, diharapkan lansia dapat menjalani kehidupan di masa tua secara lebih sehat, mandiri, bermartabat, dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Compton, B. R., Galaway, B., & Cournoyer, B. R. (2018). *Social work processes* (10th ed.). Cengage Learning.
- Corcoran, J. (2020). *Social workers' desk reference* (4th ed.). Oxford University Press.

- Djunaidi, M. (2021). Kebijakan sosial dan kesejahteraan lansia di Indonesia. Rajawali Pers.
- Hepworth, D. H., Rooney, R. H., Rooney, G. D., Strom-Gottfried, K., & Larsen, J. A. (2020). Direct social work practice: Theory and skills (11th ed.). Cengage Learning.
- Ife, J. (2018). Human rights and social work: Towards rights-based practice (3rd ed.). Cambridge University Press.
- International Federation of Social Workers. (2024). Social work and older persons.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelayanan kesehatan lanjut usia. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Pedoman asistensi sosial lanjut usia (ASLU). Kementerian Sosial RI.
- Komisi Nasional Lanjut Usia. (2020). Profil lanjut usia Indonesia. Komnas Lansia.
- Nugroho, W. (2019). Keperawatan gerontik dan geriatrik (5th ed.). EGC.
- Nurcholis, H. (2021). Pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Grasindo.
- Papalia, D. E., & Feldman, R. D. (2019). Experience human development (14th ed.). McGraw-Hill Education.
- Rahmadhani, A., Achdiani, Y., & Nastia, G. I. P. (2024). Peran pekerja sosial dan tantangan lanjut usia terlantar: Sinergi program pemberdayaan dan spiritualitas. *Global: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 195–203.
- Rustanto, B. (2020). Penelitian pekerjaan sosial. Remaja Rosdakarya.
- Sudirman. (2020). Praktik pekerjaan sosial dengan kelompok rentan. Deepublish.
- Suharto, E. (2018). Analisis kebijakan publik: Panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial. Alfabeta.
- Sumodiningrat, G. (2021). Pemberdayaan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kompas Gramedia.
- Suryanti, U. M., Incen, M., & Niko, N. (2023). Peran Dinas Sosial dalam peningkatan kesejahteraan lansia terlantar di Kota Tanjungpinang. *Journal of Religion and Social Transformation*, 1(2), 46–58.
- Suyono, H. (2019). Kesejahteraan sosial lansia di Indonesia. Bumi Aksara.
- United Nations. (2023). World Social Report 2023.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

- Wilensky, H. L., & Lebeaux, C. N. (2018). *Industrial society and social welfare*. Free Press.
- World Health Organization. (2022). *Ageing and health*.
- Zastrow, C. (2019). *Introduction to social work and social welfare* (13th ed.). Cengage Learning.

Pemenuhan Hak Dan Kebutuhan Dasar Lanjut Usia

Dalam Mewujudkan Penuaan Aktif

Nayla Saputri Jayanti¹, Usman Noer², Nur Insani³,
Sri Rahmayunita⁴, Andi Nurhidayah Hatta⁵

¹ Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UNI Alauddin Makassar,
Indonesia.

naylasaputrijayanti@gmail.com

Abstrak: Pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar kaum lansia merupakan topik penting dalam menyikapi pertumbuhan jumlah populasi lanjut usia. Fenomena ini mengharuskan adanya perhatian yang serius terhadap kualitas hidup lansia agar mereka tetap produktif, mandiri, dan memiliki kesejahteraan yang maksimal. Artikel ini bertujuan untuk meneliti pemenuhan hak-hak lansia serta kebutuhan dasar yang mencakup aspek fisik, emosional, sosial, dan ekonomi guna mendukung tercapainya penuaan yang aktif. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan studi literatur yang mengulas berbagai sumber akademik yang berhubungan dengan lansia serta gagasan penuaan aktif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pemenuhan hak lansia, seperti hak atas layanan kesehatan, perlindungan sosial, dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, memiliki dampak besar dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Ketika kebutuhan dasar lansia terpenuhi dengan baik, hal ini dapat menciptakan kondisi penuaan aktif yang ditandai oleh keterlibatan sosial, kemandirian, serta kesejahteraan mental. Ketidacukupan dalam memenuhi kebutuhan ini berisiko menimbulkan berbagai masalah sosial, termasuk ketergantungan dan penurunan kualitas hidup. Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya kerjasama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung lansia. Upaya ini dapat diwujudkan melalui kebijakan yang inklusif dan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan kebijakan dan praktik sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan lansia serta mewujudkan penuaan yang aktif di masyarakat.

Kata kunci: Lansia, hak lansia, kebutuhan dasar, penuaan aktif, kesejahteraan lansia.

Fulfilling The Rights And Basic Needs Of The Elderly In Achieving Active Ageing

Nayla Saputri Jayanti¹, Usman Noer², Nur Insani³,
Sri Rahmayunita⁴, Andi Nurhidayah Hatta⁵

¹ Social Welfare Department, Faculty of Da'wah and Communication, Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

naylasaputrijayanti@gmail.com

Abstract: Fulfilling the rights and basic needs of the elderly is a crucial topic in addressing the growing elderly population. This phenomenon requires serious attention to the quality of life of the elderly to ensure they remain productive, independent, and achieve maximum well-being. This article aims to examine the fulfillment of the rights and basic needs of the elderly, encompassing physical, emotional, social, and economic aspects, to support active aging. The method used is a qualitative literature study approach, reviewing various academic sources related to the elderly and the concept of active aging. The analysis shows that fulfilling the rights of the elderly, such as the right to health services, social protection, and participation in community life, has a significant impact on improving the quality of life of the elderly. When the basic needs of the elderly are adequately met, this can create conditions for active aging characterized by social engagement, independence, and mental well-being. Inadequate fulfillment of these needs risks creating various social problems, including dependency and a reduced quality of life. The implications of this research emphasize the importance of collaboration between families, communities, and the government in creating a supportive environment for the elderly. This effort can be realized through inclusive policies and sustainable empowerment programs. These findings are expected to serve as a reference in developing social policies and practices aimed at improving the well-being of the elderly and realizing active aging in society.

Keywords: Elderly, elderly rights, basic needs, active aging, elderly welfare.

Pendahuluan

Peningkatan jumlah orang lanjut usia kini menjadi hal yang tidak bisa dihindari seiring dengan perkembangan dalam kesehatan, teknologi, dan kesejahteraan masyarakat. Situasi ini menimbulkan tantangan baru dalam menjaga agar kualitas hidup lansia tetap tinggi. Mereka tidak hanya dianggap sebagai kelompok yang rentan, tetapi juga sebagai individu yang berhak mendapatkan hidup yang bermartabat dan sehat serta turut serta dalam aktivitas sosial. Di lapangan, kenyataannya masih banyak lansia yang belum mendapatkan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar dengan baik.

Masalah yang dihadapi oleh lansia seringkali terkait dengan akses terbatas terhadap layanan kesehatan, dukungan sosial yang rendah, serta minimnya lingkungan yang mendukung lansia. Hal ini berakibat pada penurunan kualitas hidup, meningkatnya ketergantungan, dan hilangnya kesempatan lansia untuk berkontribusi aktif dalam masyarakat. Pemenuhan kebutuhan mendasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, layanan kesehatan, serta dukungan psikososial merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut sangat berkaitan dengan usaha untuk menciptakan kehidupan lansia yang lebih mandiri dan sejahtera.

Perhatian terhadap kesehatan lansia menjadi salah satu indikator utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Lansia sering kali berhadapan dengan penyakit menahun yang memerlukan perawatan terus-menerus serta akses yang gampang ke layanan kesehatan. Kendala ekonomi sering kali menjadi penghalang dalam mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Keadaan ini menunjukkan pentingnya sistem jaminan sosial yang inklusif dan berkelanjutan agar lansia bisa menerima pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi.

Aspek psikologis dan sosial juga memiliki peranan penting dalam kehidupan lansia. Rasa kesepian, keterasingan, dan kehilangan peran sosial sering menjadi masalah yang dihadapi. Dukungan dari keluarga dan lingkungan sosial sangat penting dalam menjaga kesehatan mental lansia. Interaksi sosial yang baik mampu meningkatkan kepercayaan diri dan memberi makna hidup yang lebih baik bagi mereka. Hal ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan lansia tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional dan sosial.

Konsep penuaan aktif muncul sebagai pendekatan yang menekankan pentingnya memaksimalkan peluang kesehatan, partisipasi, dan keselamatan bagi lansia. Pendekatan ini melihat lansia sebagai subjek pembangunan yang tetap memiliki potensi dan kontribusi dalam masyarakat. Penuaan aktif tidak hanya berfokus pada kondisi fisik, tapi juga melibatkan kesejahteraan mental dan sosial. Penerapan konsep ini sangat tergantung pada sejauh mana hak dan kebutuhan dasar lansia dapat dipenuhi secara keseluruhan.

Upaya untuk mewujudkan penuaan aktif memerlukan strategi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Program pemberdayaan bagi lansia yang meliputi pelatihan keterampilan, kegiatan sosial, dan peningkatan kesadaran kesehatan dapat menjadi langkah konkret untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan lansia menjadi faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Lingkungan yang inklusif dan ramah lansia akan mendorong terwujudnya kehidupan yang lebih mandiri dan produktif.

Perbedaan antara harapan dan kenyataan dalam pemenuhan hak lansia menjadi alasan penting untuk diteliti lebih lanjut. Usaha pemenuhan hak dan kebutuhan dasar bagi lansia memerlukan partisipasi dari berbagai pihak, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Peran kebijakan publik yang inklusif dan program pemberdayaan yang berkelanjutan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung penuaan aktif. Penelitian ini menjadi relevan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai pentingnya pemenuhan hak dan kebutuhan dasar lansia sebagai dasar dalam mewujudkan penuaan aktif yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang maka yang dibahas adalah: Bagaimana pemenuhan hak dan kebutuhan dasar lansia dapat dioptimalkan guna meningkatkan kualitas hidup serta mendukung terwujudnya konsep penuaan aktif dalam kehidupan masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Lansia

Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia lanjut, biasanya di atas 60 tahun, yang mengalami perubahan fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi sebagai bagian dari proses penuaan. Di Indonesia, istilah lansia merujuk pada kelompok usia 60 tahun ke atas, dengan kategori lansia potensial, lansia tidak potensial, dan lansia terlantar sesuai UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Klasifikasi Lansia

Secara umum lansia dikelompokkan menjadi lansia potensial (masih produktif dan dapat berkontribusi), lansia tidak potensial (mengalami penurunan kemampuan fisik dan ekonomi), serta lansia terlantar (kurang atau tidak memiliki sandaran sosial dan ekonomi). Klasifikasi ini penting untuk menentukan jenis intervensi dan dukungan yang dibutuhkan, baik dalam bentuk layanan kesehatan, jaminan sosial, maupun perlindungan hukum. Interaksi Dinamis antara Individu dan Lingkungan Sosial.

Hak-hak Lansia

Hak lansia adalah hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang, termasuk hak atas hidup, kesehatan, pendidikan sepanjang hayat, pekerjaan, keamanan, dan bebas dari diskriminasi. Di Indonesia, hak-hak lansia diatur dalam UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan PP No. 43 Tahun 2004, yang menegaskan kewajiban negara memastikan hak lansia seperti pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, bantuan hukum, dan kemudahan akses layanan publik.

Kebutuhan dasar lansia

Kajian menunjukkan adanya delapan kebutuhan dasar lansia, yaitu: pelayanan kesehatan, makanan bergizi, perumahan layak, keamanan finansial, keamanan diri, pendidikan/peningkatan diri, aktualisasi diri, dan hubungan sosial yang bermakna. Pemenuhan kebutuhan ini menjadi dasar bagi lansia untuk tetap mandiri, produktif, dan berpartisipasi dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat sebagai bagian dari konsep penuaan aktif.

Konsep penuaan aktif lansia

Konsep penuaan aktif (active ageing) menekankan upaya memaksimalkan kesempatan lansia untuk tetap sehat, berpartisipasi secara aktif, dan menjamin kesejahteraan serta keamanannya di usia lanjut. Konsep ini berpijak pada tiga pilar: kesehatan, partisipasi, dan keamanan, yang terkait erat dengan pemenuhan hak dan kebutuhan dasar lansia. Pemerintah Indonesia mengembangkan Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Perpres No. 88 Tahun 2021) untuk mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, produktif, dan terlindungi dalam konteks penuaan aktif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan memahami secara mendalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar lanjut usia dalam mewujudkan penuaan aktif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, serta realitas sosial yang dialami oleh lansia dalam kehidupan sehari-hari. Fokus penelitian diarahkan pada aspek pemenuhan hak, kebutuhan dasar, serta faktor pendukung dan penghambat dalam mencapai penuaan aktif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif kualitatif. Penelitian ini berupaya menggambarkan fenomena secara sistematis dan faktual berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Kepekaan peneliti terhadap konteks sosial menjadi kunci dalam memperoleh data yang akurat dan bermakna.

Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lansia, keluarga, serta pihak terkait seperti kader sosial atau tenaga kesehatan. Teknik wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar memberikan ruang bagi informan untuk menyampaikan pengalaman secara bebas namun tetap terarah. Observasi lapangan juga dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi kehidupan lansia dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi dan kajian literatur yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait pengalaman dan persepsi lansia. Observasi dilakukan untuk mengamati kondisi lingkungan serta interaksi sosial yang terjadi. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa catatan, laporan, serta kebijakan yang berkaitan dengan lansia. Proses pengumpulan data dilakukan secara berkesinambungan hingga mencapai titik kejenuhan data.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh diseleksi dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif sehingga memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan keterkaitan antar data yang telah dianalisis.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode. Perbandingan data dari berbagai informan dan teknik pengumpulan data dilakukan untuk memastikan validitas informasi. Proses pengecekan ulang kepada informan juga dilakukan untuk meningkatkan kredibilitas data. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, reliabel, serta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pemenuhan hak dan kebutuhan dasar lansia dalam mewujudkan penuaan aktif.

Hasil dan Pembahasan

Pemahaman Lansia sebagai Dasar Intervensi Sosial

Pemahaman mengenai lansia merupakan fondasi utama dalam merancang intervensi sosial yang efektif, terarah, dan berkelanjutan. Lansia tidak hanya dipandang sebagai individu yang mengalami penurunan fungsi biologis akibat proses penuaan, tetapi juga sebagai kelompok sosial yang memiliki pengalaman hidup yang kaya, nilai-nilai kearifan, serta potensi yang masih dapat diberdayakan. Perspektif ini menegaskan pentingnya perubahan paradigma dari pendekatan berbasis masalah (problem-based approach) menuju pendekatan berbasis potensi (strength-based approach), yang lebih menghargai kapasitas dan kontribusi lansia dalam kehidupan sosial.

Dalam kajian yang lebih luas, pemahaman terhadap lansia perlu dilihat melalui pendekatan multidimensional yang mencakup aspek biologis, psikologis, sosial, dan bahkan spiritual. Secara biologis, lansia mengalami perubahan fisik seperti penurunan fungsi organ, daya tahan tubuh, serta risiko penyakit degeneratif. Dari sisi psikologis, lansia dapat menghadapi berbagai tantangan seperti penurunan kognitif, stres, hingga perasaan kesepian akibat kehilangan peran sosial atau orang terdekat. Sementara itu, dari aspek sosial, lansia sering mengalami perubahan status dan peran dalam keluarga maupun masyarakat yang dapat memengaruhi identitas diri dan kesejahteraan mereka.

Interaksi antara berbagai aspek tersebut sangat menentukan tingkat kemandirian dan kualitas hidup lansia. Sebagai contoh, lansia yang secara fisik sehat namun kurang mendapatkan dukungan sosial berpotensi mengalami gangguan kesehatan mental. Sebaliknya, lansia dengan keterbatasan fisik tetapi memiliki dukungan keluarga yang kuat dapat tetap menjalani kehidupan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan intervensi sosial tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat holistik dan terintegrasi.

pemahaman yang komprehensif terhadap lansia juga berperan penting dalam proses perumusan kebijakan publik. Kebijakan yang berbasis pada data dan realitas kondisi lansia akan menghasilkan program yang lebih relevan dan tepat sasaran. Misalnya, pengembangan layanan kesehatan berbasis komunitas, program pemberdayaan ekonomi lansia, serta penyediaan ruang partisipasi sosial merupakan bentuk intervensi yang dapat meningkatkan kesejahteraan lansia secara signifikan.

Variasi Kondisi Lansia melalui Klasifikasi dan Implikasinya

Lansia merupakan kelompok yang sangat heterogen, sehingga diperlukan klasifikasi untuk memahami keragaman kondisi yang ada. Klasifikasi ini dapat didasarkan pada usia (young old, middle old, old-old), tingkat kemandirian (mandiri, semi mandiri, tergantung), kondisi kesehatan (sehat, sakit kronis, disabilitas), maupun aspek sosial ekonomi. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa lansia tidak dapat diperlakukan secara seragam dalam pelayanan sosial maupun kesehatan.

Keberagaman kondisi ini menuntut adanya pendekatan diferensiasi dalam perencanaan program. Lansia yang aktif dan mandiri membutuhkan dukungan berupa ruang partisipasi sosial, akses terhadap kegiatan produktif, serta kesempatan untuk mengembangkan potensi diri. Sementara itu, lansia yang mengalami keterbatasan fisik atau kognitif membutuhkan perlindungan yang lebih intensif, termasuk layanan perawatan jangka panjang (long-term care) dan pendampingan berkelanjutan.

Pendekatan berbasis klasifikasi ini memberikan implikasi penting dalam peningkatan efektivitas pelayanan. Program yang dirancang secara spesifik akan lebih mampu menjawab kebutuhan masing-masing kelompok lansia, sehingga tidak terjadi kesalahan sasaran (mistargeting). Selain itu, pendekatan ini juga membantu dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya, baik dari segi anggaran, tenaga profesional, maupun fasilitas pelayanan.

Klasifikasi lansia memberikan gambaran mengenai keragaman kondisi yang dimiliki oleh individu pada usia lanjut. Perbedaan tingkat kemandirian dan kesehatan menunjukkan bahwa lansia tidak dapat diperlakukan secara homogen. Lansia yang aktif membutuhkan ruang untuk berpartisipasi, sedangkan lansia yang rentan membutuhkan perlindungan dan pendampingan.

Pendekatan berbasis klasifikasi memungkinkan adanya penyesuaian dalam pelayanan sosial dan kesehatan. Program yang dirancang secara spesifik akan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan lansia. Strategi ini juga membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Pemahaman terhadap variasi kondisi lansia menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Kebijakan yang adaptif akan mampu menjangkau seluruh kelompok lansia secara lebih merata.

Kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap variasi kondisi lansia akan meningkatkan pemerataan akses layanan. Hal ini penting untuk mengurangi kesenjangan sosial, terutama bagi lansia yang berada dalam kondisi rentan, seperti lansia miskin, lansia terlantar, atau lansia dengan disabilitas. Dengan demikian, pemahaman terhadap variasi kondisi lansia menjadi kunci dalam menciptakan sistem pelayanan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemenuhan Hak Lansia sebagai Pilar Kesejahteraan

Hak lansia merupakan bagian penting dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat. Lansia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, perlindungan sosial, serta kesempatan untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Pemenuhan hak ini mencerminkan komitmen terhadap keadilan sosial.

Kerangka hukum di Indonesia telah mengatur berbagai bentuk perlindungan bagi lansia. Kebijakan tersebut menegaskan pentingnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan lansia. Implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Akses terhadap layanan kesehatan menjadi salah satu hak yang sering kali belum terpenuhi secara optimal. Lansia di daerah terpencil sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan yang memadai. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi layanan.

Jaminan sosial menjadi aspek penting dalam pemenuhan hak lansia. Lansia yang tidak memiliki sumber penghasilan tetap sangat bergantung pada sistem perlindungan sosial. Keberadaan program jaminan sosial menjadi faktor penentu dalam menjaga kesejahteraan lansia. Perlindungan terhadap lansia dari kekerasan dan penelantaran juga menjadi bagian penting dalam pemenuhan hak. Lansia yang tidak mendapatkan perlindungan berisiko mengalami penurunan kualitas hidup. Kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak.

Pendekatan berbasis hak mendorong keterlibatan lansia dalam kehidupan sosial. Lansia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri lansia. Pemenuhan hak lansia akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Lansia yang mendapatkan haknya secara optimal cenderung memiliki kondisi fisik dan mental yang lebih baik. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi antara kebijakan dan implementasi.

Realitas menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam pemenuhan hak lansia. Akses terhadap layanan kesehatan dan jaminan sosial belum merata, terutama pada kelompok lansia dengan kondisi ekonomi rendah. Situasi ini menuntut adanya penguatan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif. Pemenuhan hak lansia akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup. Lansia yang mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang memadai cenderung memiliki kondisi fisik dan mental yang lebih baik.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagai Faktor Penentu Kualitas Hidup

Kebutuhan dasar lansia merupakan aspek fundamental yang menentukan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kebutuhan ini mencakup dimensi fisik, psikologis, dan sosial yang saling berkaitan serta tidak dapat dipisahkan. Pemenuhan kebutuhan fisik seperti gizi seimbang, tempat tinggal yang layak, serta akses terhadap layanan kesehatan menjadi prioritas utama, karena berhubungan langsung dengan kondisi kesehatan dan kemampuan lansia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Lansia yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan dengan lansia yang bergantung pada orang lain.

Selain aspek fisik, kebutuhan psikologis juga memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan emosional lansia. Lansia sering menghadapi berbagai perubahan dalam hidupnya, seperti pensiun, kehilangan pasangan, maupun penurunan fungsi tubuh, yang dapat memicu stres, kecemasan, bahkan depresi. Oleh karena itu, dukungan psikologis seperti rasa dihargai, diperhatikan, dan diterima menjadi kebutuhan yang tidak kalah penting. Penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis lansia sangat dipengaruhi oleh dukungan sosial yang mereka terima dari keluarga maupun lingkungan sekitar.

kebutuhan sosial juga berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. Interaksi sosial yang baik dapat membantu lansia mempertahankan peran sosialnya, mengurangi perasaan kesepian, serta meningkatkan rasa memiliki dalam masyarakat. Studi terbaru menunjukkan bahwa interaksi sosial memiliki hubungan positif dengan kualitas hidup lansia, di mana lansia yang aktif berinteraksi cenderung memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi.

Kebutuhan dasar lansia mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial yang saling berkaitan. Pemenuhan kebutuhan fisik seperti makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, dan layanan kesehatan menjadi prioritas utama. Kondisi fisik yang baik akan mendukung aktivitas dan kemandirian lansia.

Aspek psikologis berperan dalam menjaga keseimbangan emosional lansia. Dukungan keluarga dan lingkungan sosial menjadi faktor penting dalam mengurangi rasa kesepian dan keterasingan. Kebutuhan sosial juga memiliki peranan dalam meningkatkan kualitas hidup melalui interaksi dan partisipasi. Pendekatan terpadu dalam pemenuhan kebutuhan dasar akan menghasilkan dampak yang lebih optimal. Integrasi antara pelayanan kesehatan, dukungan sosial, dan kebijakan publik menjadi kunci dalam menciptakan kesejahteraan lansia.

Penuaan Aktif sebagai Tujuan dari Pemenuhan Hak dan Kebutuhan Lansia

Penuaan aktif menjadi konsep yang menekankan pentingnya keterlibatan lansia dalam berbagai aspek kehidupan. Lansia didorong untuk tetap sehat, mandiri, dan produktif sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Pendekatan ini memberikan ruang bagi lansia untuk tetap berkontribusi dalam masyarakat.

Dimensi kesehatan menjadi bagian utama dalam penuaan aktif. Lansia perlu menjaga kondisi fisik melalui pola hidup sehat dan aktivitas yang teratur. Kondisi kesehatan yang baik akan mendukung keterlibatan dalam aktivitas sosial.

Partisipasi sosial menjadi elemen penting dalam konsep penuaan aktif. Lansia yang aktif dalam kegiatan masyarakat akan memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi. Keterlibatan ini juga memberikan makna dalam kehidupan lansia. Keamanan dan perlindungan menjadi faktor pendukung dalam penuaan aktif. Lansia membutuhkan lingkungan yang aman untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Kondisi ini akan meningkatkan rasa nyaman dan kesejahteraan.

Penuaan aktif juga berkaitan dengan pemberdayaan lansia. Program pelatihan dan kegiatan sosial dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan lansia. Lansia yang diberdayakan akan lebih mandiri dan produktif. Pemenuhan hak dan kebutuhan dasar menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan penuaan aktif. Lansia yang mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan dan dukungan sosial akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Peran pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang inklusif menjadi sangat penting. Program yang berkelanjutan akan mendukung terwujudnya penuaan aktif. Kondisi ini membutuhkan komitmen dari berbagai pihak. Sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah akan memperkuat implementasi penuaan aktif. Kerja sama yang baik akan menciptakan lingkungan yang mendukung kehidupan lansia yang sejahtera dan bermakna.

Keberhasilan penuaan aktif sangat dipengaruhi oleh pemenuhan hak dan kebutuhan dasar lansia. Akses terhadap layanan kesehatan, dukungan sosial, serta lingkungan yang ramah lansia menjadi faktor utama. Kondisi ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan makna hidup bagi lansia.

Upaya mewujudkan penuaan aktif memerlukan sinergi antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kebijakan yang inklusif serta program pemberdayaan yang berkelanjutan akan memperkuat terciptanya kehidupan lansia yang sejahtera dan berkualitas.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pemenuhan hak dan kebutuhan dasar lanjut usia dalam mewujudkan penuaan aktif dapat disimpulkan bahwa: 1. Pemenuhan hak dan kebutuhan dasar lanjut usia merupakan fondasi utama dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat, sehat, dan sejahtera. Lansia tidak hanya membutuhkan dukungan secara fisik, tetapi juga perhatian pada aspek psikologis dan sosial agar tetap merasa dihargai dan memiliki peran dalam masyarakat. Upaya yang terintegrasi melalui kebijakan, pelayanan kesehatan, serta dukungan keluarga dan lingkungan sosial akan memperkuat kualitas hidup lansia secara menyeluruh. 2. Penuaan aktif dapat terwujud apabila lansia memperoleh akses yang adil terhadap hak dan kebutuhan dasarnya. Kondisi kesehatan yang terjaga, keterlibatan dalam aktivitas sosial, serta lingkungan yang inklusif akan mendorong lansia tetap mandiri dan produktif. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi kunci dalam menciptakan sistem yang mendukung kehidupan lansia yang berkualitas dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Hurlock, E. B. (2017). Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan (Edisi ke-5). Erlangga.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Pedoman pelayanan kesehatan lanjut usia di Indonesia. Kemenkes RI.
- Santrock, J. W. (2019). Life-span development (17th ed.). McGraw-Hill Education.

- Suharto, E. (2014). Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Refika Aditama.
- World Health Organization. (2002). Active ageing: A policy framework. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. (2015). World report on ageing and health. Geneva: World Health Organization.
- United Nations. (2019). World population ageing 2019: Highlights. New York: United Nations.
- Papalia, D. E., & Martorell, G. (2021). Experience human development (14th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Hooyman, N. R., & Kiyak, H. A. (2011). Social gerontology: A multidisciplinary perspective (9th ed.). Boston, MA: Pearson.
- Oktarina, R., Maryana, M., & Agustiani, S. (2024). Faktor-faktor yang berhubungan dengan kualitas hidup lansia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5(4).
- Ulziamil, M., Arjuna, A., & Murod, A. (2024). Hubungan interaksi sosial dengan kualitas hidup lansia. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(2).
- Widinarsih, D. (2023). Kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar lansia dan optimum aging. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2018). Kebijakan dan program pelayanan lanjut usia di Indonesia. Kementerian Sosial RI.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik penduduk lanjut usia 2022.
- Achenbaum, W. A., & Bengtson, V. L. (1994). Re-engaging the disengagement theory of aging: On the history and assessment of theory development in gerontology. *The Gerontologist*, 34(6), 756–763.
- Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (1997). Successful aging. *The Gerontologist*, 37(4), 433–440.
- Putri, R. A., Raharjo, S. T., & Resnawaty, R. (2024). Sustainable development and green social work in Indonesia: A systematic review. *Welfare: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 13(1).
- Atchley, R. C., & Barusch, A. S. (2004). Social forces and aging: An introduction to social gerontology (10th ed.). Belmont, CA: Wadsworth/Thomson Learning.
- Cumming, E., & Henry, W. E. (1961). Growing old: The process of disengagement. New York, NY: Basic Books.
- Utami, N. W., & Handayani, S. (2022). Penerapan konsep penuaan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup lansia. *Jurnal Gerontologi Indonesia*, 5(1), 11–20.

- Rahmawati, F., & Prasetyo, B. (2018). Kesejahteraan sosial lanjut usia melalui program pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 17(2), 89–102.
- Hidayat, T., & Nurhayati, E. (2021). Akses pelayanan kesehatan bagi lansia di daerah pedesaan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(1), 34–42.
- Sari, R. P., & Wulandari, A. (2020). Pemenuhan kebutuhan dasar lansia dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 12(2), 145–158.

Kepemimpinan Perempuan Perspektif Tafsir Al-Qur'an

Septhiany Meryam Saleh^{1*}, Muh. Yusuf²

¹ Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

² Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

*E-mail Korespondensi:

sesasepthianysaleh@gmail.com

Abstrak: Latar Belakang: Kepemimpinan perempuan masih menimbulkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, antara lain karena latar belakang budaya, pengaruh tradisi patriarki, kondisi sosial, dan perbedaan pemahaman terhadap teks keagamaan, sehingga posisi sosial perempuan masih timpang. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan mengkaji kepemimpinan perempuan dalam perspektif tafsir Al-Qur'an, khususnya melalui ayat-ayat yang berkaitan dengan hak, peran, dan kapasitas perempuan sebagai pemimpin. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif analitis serta pendekatan tekstual dan kontekstual. Data primer berupa Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir, sedangkan data sekunder berupa buku, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil: Kajian terhadap Q.S. At-Taubah/9: 71 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan beriman sama-sama berperan sebagai penolong (*auliya'*) yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, sehingga Al-Qur'an tidak melarang perempuan memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya. Kisah Ratu Balqis di negeri Saba' menggambarkan perempuan yang cerdas, bijaksana, dan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan perempuan menduduki posisi pemimpin tertinggi; jumhur ulama melarangnya dengan merujuk pada Q.S. An-Nisa/4: 34, sedangkan penafsiran lain memahami ayat tersebut terbatas pada kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Kesimpulan: Al-Qur'an menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara dalam kapasitas kepemimpinan selama keduanya memenuhi kriteria kepemimpinan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga tafsir Al-Qur'an memberikan legitimasi yang kuat bagi perempuan untuk berperan sebagai pemimpin di berbagai aspek kehidupan.

Kata kunci: kepemimpinan perempuan; tafsir Al-Qur'an; kesetaraan gender; Ratu Balqis; Q.S. At-Taubah ayat 71

Women's Leadership from the Perspective of Qur'anic Exegesis

Septhiany Meryam Saleh^{1*}, Muh. Yusuf²

¹ Postgraduate Program, Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia.

² Postgraduate Program, Alauddin State Islamic University of Makassar, Indonesia.

*Corresponding Email: sesasepthianysaleh@gmail.com

Abstract: *Background: Women's leadership remains a subject of debate in Indonesian society, where Muslims form the majority, owing to cultural background, patriarchal traditions, social conditions, and differing understandings of religious texts, which contribute to the unequal social position of women. Objective: This study examines women's leadership from the perspective of Qur'anic exegesis, focusing on verses concerning the rights, roles, and capacity of women as leaders. Methods: This is library research using a descriptive-analytical method with textual and contextual approaches. Primary data consist of the Qur'an and works of exegesis, while secondary data comprise relevant books, research findings, and scholarly articles. Results: The analysis of Q.S. At-Taubah/9: 71 shows that believing men and women alike serve as allies (auliya') who enjoin good and forbid evil, so the Qur'an does not prohibit women from entering various professions according to their expertise. The story of Queen Balqis of Saba' portrays an intelligent, prudent woman who consulted others in making decisions. Scholars differ on whether women may hold the highest leadership positions: the majority of scholars prohibit it by referring to Q.S. An-Nisa/4: 34, whereas other interpretations understand the verse as limited to a husband's leadership within the household. Conclusion: The Qur'an places men and women on an equal footing in leadership capacity, provided that both meet the criteria of leadership and act in accordance with Islamic values. Qur'anic exegesis therefore provides strong legitimacy for women to serve as leaders in various aspects of life.*

Keywords: *women's leadership; Qur'anic exegesis; gender equality; Queen Balqis; Q.S. At-Taubah verse 71*

Pendahuluan

Mayoritas masyarakat masih memandang kaum perempuan sebagai makhluk Tuhan kelas dua di hadapan laki-laki. Akibatnya, perempuan bukan saja ter subordinasi, tetapi juga terpinggirkan dalam proses kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik (Rabiatun, 2018). Namun, yang perlu dicermati adalah apakah pelanggaran ketidakadilan gender secara luas dalam agama bersumber dari watak agama itu sendiri, ataukah justru berasal dari pemahaman, penafsiran, dan pemikiran keagamaan yang tidak mustahil dipengaruhi oleh tradisi dan kultur patriarki ataupun pandangan-pandangan lainnya. Karena itulah, menelusuri kembali ajaran-ajaran Islam yang autentik merupakan sebuah keniscayaan, sebab sejak awal Islam memiliki konsep yang sangat matang dalam memposisikan perempuan, yang didasari atas tuntunan moral dasar Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an

maupun Hadis, justru ketika agama-agama lain hingga saat ini masih berselisih pendapat dalam menetapkan hukum perempuan dan kemanusiaannya (Janah, 2017).

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, implementasi demokrasi—yang juga merupakan bagian dari ajaran Islam—sejak awal hingga kini masih cukup memprihatinkan. Hal ini tampak antara lain pada ketimpangan posisi sosial perempuan. Padahal, sejak empat belas abad yang lalu Al-Qur'an telah menghapus berbagai bentuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan serta memberikan hak-hak kepada perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada laki-laki. Dalam konteks kepemimpinan, Islam memberikan hak kepada perempuan sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki, dan menetapkan kewajiban kepada perempuan seperti yang ditetapkan kepada laki-laki, kecuali hak atau kewajiban tertentu yang khusus untuk laki-laki.

Pembicaraan tentang kepemimpinan perempuan sampai saat ini di kalangan masyarakat masih menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini dimungkinkan karena latar belakang budaya, kedangkalan agama, peradaban, dan kondisi sosial kehidupan manusia sehingga menyebabkan terjadinya benturan dan perbedaan persepsi di kalangan masyarakat. Isu kepemimpinan perempuan menjadi pembahasan hangat dewasa ini, terutama ketika masyarakat Indonesia menghadapi pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah (Azizah et al., 2023).

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji kepemimpinan perempuan dalam perspektif tafsir Al-Qur'an, dengan menelaah ayat-ayat yang berkaitan dengan hak, peran, dan kapasitas perempuan sebagai pemimpin serta pandangan para mufasir dan ulama tentangnya. Penelitian ini berangkat dari argumen bahwa Al-Qur'an tidak melarang perempuan menjadi pemimpin selama ia mampu dan memenuhi kriteria kepemimpinan.

Tinjauan Pustaka

Konsep Kepemimpinan

Kata pemimpin berakar dari kata pimpin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), memimpin berarti membimbing, memandu, dan melatih (mendidik, mengajar); orang yang menjalankan hal tersebut dinamakan pemimpin. Adapun kepemimpinan, yang kata dasarnya pemimpin, berarti (1) orang yang memimpin dan (2) petunjuk, yakni buku petunjuk atau pedoman. Dalam Islam, kepemimpinan sering dikenal dengan istilah *khalifah*. Dalam Al-Qur'an, konsep

pemimpin diungkapkan dengan istilah *khalifah*, yang merujuk pada seseorang yang mampu menangani beragam tantangan, melindungi yang tertindas, dan menjalankan keadilan dengan menegakkan hukum terhadap segala tindakan yang tidak bermoral dan tercela (Setiawati et al., 2024). Selain *khalifah*, Al-Qur'an menyebut pemimpin dengan istilah *ulil amri*, yang secara harfiah dapat diartikan sebagai para pemimpin. Ibnu Katsir berpandangan bahwa istilah *ulil amri* memiliki makna yang umum, mencakup pemimpin pemerintahan maupun pemimpin keagamaan seperti ulama (Ibn Kasir, 2004, h. 59). Dalam agama Islam, kepemimpinan juga dikenal dengan sebutan *imamah*, yang menurut bahasa berarti kepemimpinan, seperti ketua atau yang lainnya, baik ia memberi petunjuk ataupun menyesatkan. Imam juga disebut *khalifah*, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat.

Kepemimpinan merujuk pada kemampuan memengaruhi tingkah laku individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Islam, gelar atau sebutan bagi seorang pemimpin dianggap kurang signifikan, sebagaimana terbukti dalam sejarah bahwa Rasulullah Saw. tidak pernah mengidentifikasi dirinya sebagai *khalifatud daulah*, karena bagi beliau kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Oleh karena itu, menjadi pemimpin bukan hanya sekadar memiliki jabatan, tetapi juga mengemban tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, baik sebuah negara maupun masyarakat.

Jacobs dan Jacques mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan guna mencapai sasaran (dalam Yukl, 1994, h. 2). Sementara itu, Tannenbaum, Weschler, dan Massarik mengartikan kepemimpinan sebagai pengaruh antarpribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu (dalam Yukl, 1994, h. 2). Marno dan Supriyatno (2008) memahami kepemimpinan sebagai segala daya dan upaya bersama untuk menggerakkan semua sumber dan alat yang tersedia dalam suatu organisasi. Adapun Sugeng Listyo mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses memimpin untuk memberikan pengaruh sosial kepada orang lain sehingga orang tersebut menjalankan suatu proses sebagaimana diinginkan oleh pemimpin (Marno & Supriyatno, 2008, h. 29). Pemimpin adalah orang yang mempunyai pengikut, yang mengatur dan mengoordinasikan aktivitas kelompoknya untuk mencapai tujuan bersama. Untuk

mencapai tujuan yang diinginkan, pemimpin membutuhkan staf dan anggota, yang kemudian memunculkan istilah kepemimpinan.

Kepemimpinan Perempuan dalam Islam

Dalam panggung sejarah, pembicaraan mengenai wacana gender, feminisme, dan kesetaraan laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari emansipasi, demokratisasi, dan humanisasi kebudayaan. Dari waktu ke waktu, gugatan dan pembongkaran terhadap struktur ketidakadilan, diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan tampaknya semakin meluas.

Sebagai agama yang ajarannya sempurna, Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara, baik sebagai hamba (*'abid*) maupun sebagai penguasa bumi (*khalifatullah fil ardh*). Kepemimpinan perempuan menurut Islam diperbolehkan selama kepemimpinan itu baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, Islam memberikan batasan terhadap perempuan karena beberapa kendala kodrati yang dimilikinya, seperti menstruasi, mengandung, melahirkan, dan menyusui, yang menyebabkan kondisi perempuan pada saat itu lemah, sementara seorang pemimpin membutuhkan kekuatan fisik maupun akal. Meskipun demikian, kepemimpinan perempuan sebenarnya telah diceritakan dalam Al-Qur'an, yakni kepemimpinan Ratu Balqis dari negeri Saba'. Hal ini bermakna bahwa perempuan pun layak dijadikan pemimpin suatu bangsa; jika hal itu tidak diperbolehkan, tentu tidak akan disebutkan dalam Al-Qur'an (Azizah et al., 2023).

Syarat-Syarat Kepemimpinan

Konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan selalu dikaitkan dengan tiga hal pokok, yaitu kekuasaan, kewibawaan, dan kemampuan (Kartono, 1998, h. 28). Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk memengaruhi dan menggerakkan bawahan agar berbuat sesuatu. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, dan keutamaan yang membuat seseorang mampu mengatur orang lain sehingga orang tersebut patuh kepada pimpinan dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan, dan kecakapan, baik keterampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi kemampuan anggota biasa.

Prinsip-Prinsip Kepemimpinan dalam Al-Qur'an

Amanah

Dalam Kamus Kontemporer (al-‘Ashr), amanah diartikan sebagai kejujuran dan kepercayaan (hal yang dapat dipercaya). Amanah merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Ada ungkapan “kekuasaan adalah amanah, karena itu harus dilaksanakan dengan penuh amanah”. Menurut Said Agil Husin Al-Munawar (2002), ungkapan ini menyiratkan dua hal. Pertama, apabila manusia berkuasa di muka bumi sebagai khalifah, maka kekuasaan yang diperoleh merupakan pendelegasian kewenangan dari Allah Swt. (*delegation of authority*), karena Allah adalah sumber segala kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki hanyalah amanah dari Allah yang bersifat relatif dan kelak harus dipertanggungjawabkan di hadapan-Nya. Kedua, karena kekuasaan pada dasarnya adalah amanah, maka pelaksanaannya pun memerlukan amanah, yakni sikap penuh pertanggungjawaban, jujur, dan memegang teguh prinsip. Amanah dalam arti ini merupakan prinsip atau nilai. Mengenai amanah, Allah berfirman dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 72:

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.” (Q.S. Al-Ahzab/33: 72)

Keadilan

Kata adil merupakan serapan dari bahasa Arab ‘*adl*. Dalam Al-Qur'an, keadilan diungkapkan dengan tiga istilah, yaitu ‘*adl*, *qisth*, dan *haqq*. Kata ‘*adl* sebagai kata benda disebut sebanyak 14 kali dalam Al-Qur'an, sedangkan kata *qisth*, juga sebagai kata benda, diulang sebanyak 15 kali (Rahardjo, 2002, h. 639). Di antara ayat yang berbicara mengenai keadilan adalah Q.S. Al-A'raf/7: 29:

“Katakanlah: ‘Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.’ Dan (katakanlah): ‘Luruskanlah muka (diri)mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepada-Nya).’” (Q.S. Al-A'raf/7: 29)

Musyawarah

Istilah musyawarah, apabila diambil dari kata kerja *syawara*–*yusyawiru*, atau *syura*, yang berasal dari kata *syawara*–*yasyuru*, terdapat dalam Al-Qur'an. Istilah yang pertama merujuk pada Q.S. Ali 'Imran ayat 159, sedangkan istilah *syura*

merujuk pada Q.S. Asy-Syura ayat 38 (Rahardjo, 2002, h. 441–442). Selain kedua istilah tersebut, kata *i'tamiru* dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 6 juga menunjukkan makna musyawarah. Salah satu ayat tersebut adalah Q.S. Ali 'Imran/3: 159:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.” (Q.S. Ali 'Imran/3: 159)

Amr Ma'ruf Nahi Munkar

Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia, “amar makruf nahi munkar” diartikan sebagai suruhan untuk berbuat baik serta mencegah perbuatan jahat. Istilah itu diperlakukan dalam satu kesatuan istilah dan satu kesatuan arti, seolah-olah keduanya tidak dapat dipisahkan (Rahardjo, 2002, h. 619). Ungkapan *ya 'muruna bi al-ma'ruf wa yanhawna 'an al-munkar* disebut secara utuh dan berulang, artinya tidak dipisahkan antara *amr ma'ruf* dan *nahy munkar*, yakni sebanyak sembilan kali dalam lima surat (Rahardjo, 2002, h. 624). Salah satunya adalah Q.S. Ali 'Imran/3: 104:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali 'Imran/3: 104)

Keempat prinsip tersebut—amanah, keadilan, musyawarah, dan *amr ma'ruf nahi munkar*—menjadi kerangka untuk menilai kelayakan seseorang, laki-laki maupun perempuan, sebagai pemimpin, sebagaimana ditelaah pada bagian hasil dan pembahasan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode deskriptif analitis. Fokus kajian penelitian ini adalah ayat-ayat tentang perempuan, baik di wilayah domestik maupun politik, yang dianalisis dengan pendekatan tekstual dan kontekstual, kemudian ditarik relevansinya. Sumber data penelitian ini berupa data-data yang terkait dengan kesetaraan gender. Rujukan lain

berupa kitab-kitab tafsir dan data-data yang terkait dengan kondisi Indonesia dalam membangun kebudayaan berperadaban kesetaraan gender.

Untuk itu, penulis melakukan langkah-langkah identifikasi, pengumpulan, pengolahan, dan pengkajian terhadap data yang telah ada terkait masalah kepemimpinan perempuan, baik data primer maupun data sekunder, secara akurat dan faktual. Data primer adalah Al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir yang membahas kepemimpinan perempuan. Sedangkan data sekunder berupa literatur lain, yaitu buku-buku, hasil penelitian, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan perempuan guna memperkaya atau melengkapi data primer.

Hasil dan Pembahasan

Kepemimpinan Perempuan dalam Q.S. At-Taubah/9: 71

Sejak empat belas abad yang silam, Al-Qur'an telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan serta memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak kaum laki-laki. Di antaranya dalam masalah kepemimpinan, Al-Qur'an memberikan hak kepada perempuan untuk menjadi pemimpin, sebagaimana hak laki-laki. Yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuan dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Dengan demikian, kepemimpinan bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi dapat diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan; bahkan jika perempuan itu mampu dan memenuhi kriteria, ia boleh menjadi hakim dan pemimpin tertinggi (perdana menteri atau kepala negara). Hal ini disebutkan dalam Q.S. At-Taubah/9: 71:

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. At-Taubah/9: 71)

Dalam ayat tersebut Allah Swt. menggunakan kata *auliya'* (pemimpin) yang tidak hanya ditujukan kepada laki-laki, tetapi kepada laki-laki dan perempuan secara bersamaan. Berdasarkan ayat ini, perempuan juga dapat menjadi pemimpin selama ia mampu memenuhi kriteria sebagai pemimpin, karena menurut tafsir al-Maraghi dan tafsir al-Manar, kata *auliya'* mencakup wali dalam arti penolong, solidaritas, dan kasih sayang. Dari Q.S. At-Taubah ayat 71 dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak melarang perempuan memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya,

seperti menjadi guru, dosen, pengusaha, menteri, hakim, bahkan kepala negara. Akan tetapi, dalam menjalankan tugasnya perempuan tetap harus memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah, misalnya urusan rumah tangganya tidak terbengkalai dan adanya izin serta rida suami bagi perempuan yang sudah bersuami, guna menghindari efek negatif terhadap diri dan agamanya.

Perbedaan Pendapat Ulama tentang Kepemimpinan Puncak Perempuan

Hanya saja, ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya perempuan menempati posisi puncak, yakni sebagai hakim, menteri, atau kepala negara. Jumhur ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim atau pemimpin tertinggi, berdasarkan Q.S. An-Nisa/4: 34:

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.” (Q.S. An-Nisa/4: 34)

Menurut Jawad Mughniyah dalam tafsir *al-Kasyif*, maksud Q.S. An-Nisa ayat 34 bukanlah menciptakan perbedaan yang menganggap perempuan lebih rendah daripada laki-laki, melainkan keduanya sama. Ayat tersebut hanya ditujukan kepada laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri. Keduanya adalah rukun kehidupan; tidak satu pun dapat hidup tanpa yang lain, dan keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditujukan untuk kepemimpinan suami dalam rumah tangga, yaitu memimpin istrinya, bukan untuk menjadi penguasa atau diktator (As-Suyuti, 1968, h. 314).

Kepemimpinan Ratu Balqis di Negeri Saba'

Selain itu, Al-Qur'an mempertegas dengan memaparkan kisah seorang ratu yang memimpin kerajaan besar, yaitu Ratu Balqis di negeri Saba'. Hal ini disebutkan dalam Q.S. An-Naml/27: 23:

“Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.” (Q.S. An-Naml/27: 23)

Adapun keadaan negeri Saba’ digambarkan dalam Q.S. Saba’/34: 15:

“Sungguh, pada kaum Saba’ benar-benar ada suatu tanda (kebesaran dan kekuasaan Allah) di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri. (Kami berpesan kepada mereka,) ‘Makanlah rezeki (yang dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik (nyaman), sedangkan (Tuhanmu) Tuhan Yang Maha Pengampun.’” (Q.S. Saba’/34: 15)

Ratu Balqis adalah seorang perempuan yang berpikir lincah, bersikap hati-hati, dan teliti dalam memutuskan sesuatu. Ia tidak gegabah dan tidak terburu-buru dalam memutuskan sesuatu, sehingga ketika ditanya tentang singgasananya yang telah dipindahkan, ia menjawab dengan ungkapan diplomatis, bukan dengan jawaban vulgar yang dapat menjebak. Kecerdasan Balqis dalam berlogika dan bertauhid terlihat pula ketika ia melihat keindahan istana Sulaiman yang lantainya dari marmer berkilauan laksana air. Dalam ketakjuban itu, Ratu Balqis tidak menyerah begitu saja kepada Sulaiman, tetapi berkata, “Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam.”

Demikianlah Al-Qur’an bercerita tentang kepemimpinan seorang perempuan melalui contoh historis Ratu Balqis di negeri Saba’, yang menggambarkan perempuan dengan kecemerlangan pemikiran, ketajaman pandangan, kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, dan strategi politik yang baik. Ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman, ia bermusyawarah dengan para pembesarnya. Walaupun merasa kuat dan siap menghadapi perang melawan Sulaiman, ia memiliki pandangan yang jauh. Ia tidak ingin negerinya hancur dan rakyatnya menjadi korban. Ia memiliki intuisi bahwa Sulaiman adalah seorang nabi, sehingga tidaklah bijaksana melawan kebenaran yang tentu dijamin oleh Tuhan dengan kemenangan. Tidaklah bijaksana pula menghalangi kaum dan rakyatnya menikmati kebenaran tersebut dengan berperang melawannya untuk mempertahankan kebatilan.

Simpulan

Kepemimpinan adalah suatu proses memimpin untuk memberikan pengaruh sosial kepada orang lain sehingga orang lain tersebut menjalankan suatu proses

sebagaimana diinginkan oleh pemimpin. Istilah yang digunakan Al-Qur'an untuk menyebut kepemimpinan adalah *khalifah*, *imam*, dan *ulil amri*, sedangkan prinsip-prinsip kepemimpinan meliputi amanah, adil, musyawarah, dan *amr ma'ruf nahi munkar*.

Secara keseluruhan, Al-Qur'an menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kedudukan yang setara dalam hal kapasitas kepemimpinan, dengan syarat keduanya bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pemimpin perempuan sebagaimana dicontohkan oleh Ratu Balqis dan panduan dalam Q.S. At-Taubah menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam kepemimpinan, baik dalam konteks keluarga, sosial, maupun politik, sangat dihargai. Dengan demikian, tafsir Al-Qur'an memberikan legitimasi yang kuat bagi perempuan untuk berperan aktif sebagai pemimpin di berbagai aspek kehidupan. Meskipun demikian, ulama masih berbeda pendapat mengenai kebolehan perempuan menduduki posisi pemimpin tertinggi. Penelitian selanjutnya dapat menelaah penafsiran para mufasir klasik dan kontemporer secara lebih mendalam serta implementasinya dalam konteks kepemimpinan perempuan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Al-Munawar, S. A. H. (2002). *Al-Qur'an membangun tradisi kesalehan hakiki*. Ciputat Press.
- As-Suyuti. (1968). *Al-Jami' al-shagir*. Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Azizah, Maulana, A., & Jannah, R. (2023). Wacana kepemimpinan perempuan dalam Al-Qur'an: Studi penafsiran tekstual dan kontekstual Abdullah Saeed. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2.
- Ibn Kasir, I. (2004). *Tafsir Al-Qur'an al-'Azim* (Jil. 4). Dar 'Alam al-Kutub.
- Janah, N. (2017). Telaah buku Argumentasi kesetaraan gender perspektif Al-Qur'an karya Nasaruddin Umar. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(2).
- Kartono, K. (1998). *Pemimpin dan kepemimpinan: Apakah pemimpin abnormal itu?* Raja Grafindo Persada.
- Marno, & Supriyatno, T. (2008). *Manajemen dan kepemimpinan pendidikan Islam*. Refika Aditama.
- Rabiatun, A. (2018). Wacana kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dan Hadis menurut Husein Muhammad. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, 7(1), 15–33.

- Rahardjo, M. D. (2002). *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir sosial berdasarkan konsep-konsep kunci* (Cet. II). Paramadina.
- Setiawati, P., Nur, A., Khairiah, K., & Amin, S. (2024). Islam dan kepemimpinan perempuan: Prototipe leadership Ratu Balqis perspektif Tafsir Al-Azhar. *Al-Qudwah*, 2(2).
- Yukl, G. (1994). *Kepemimpinan dalam organisasi* (J. Udaya, Penerj.). Prenhallindo.